

LAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN



TAHUN **2021**



PENGADILAN TINGGI MAKASSAR

Jl. Urip Sumoharjo KM 4, Kota Makassar, Sulawesi Selatan
Telepon: 0411 448365, e-mail : info@pt-makassar.go.id

KATA PENGANTAR



Puji syukur kita panjatkan kehadiran Allah SWT atas segala limpahan rahmat dan nikmat Nya, sehingga penyusunan Laporan Pelaksanaan Kegiatan yang menggambarkan pelaksanaan tugas Pengadilan Tinggi Makassar dan Pengadilan Negeri se-Sulawesi Selatan dan Barat tahun 2021, dapat diselesaikan. Laporan Pelaksanaan Kegiatan Tahun 2021 ini meliputi bidang teknis yudisial, pengawasan internal, pembinaan sumber daya manusia, pengelolaan sarana dan prasarana, pengelolaan keuangan, serta pengelolaan administrasi. Disamping memberikan informasi sebagai bentuk pertanggung jawaban tentang pelaksanaan tugas, diharapkan pula dapat menjadi bahan evaluasi dan perencanaan di masa mendatang agar kinerja Pengadilan Tinggi Makassar dan Pengadilan Negeri se-Sulawesi Selatan dan Barat menjadi lebih baik, untuk dapat mendukung pelaksanaan reformasi birokrasi.

Penyusunan laporan Pelaksanaan Kegiatan tahun 2021 telah diupayakan secara optimal dan objektif, namun apabila masih terdapat kekurangan dan ketidaksempurnaan. Oleh karena itu adanya saran yang konstruktif sangat diharapkan dari semua pihak, untuk kesempurnaan laporan dan peningkatan kinerja yang lebih baik lagi.

Akhirnya, dengan tersusunnya laporan Pelaksanaan Kegiatan Tahunan 2021 kami memberikan penghargaan dan apresiasi yang tinggi dan ucapan terimakasih kepada segenap Tim Penyusun dan semua warga Pengadilan Tinggi Makassar dan Pengadilan Negeri se- Sulawesi Selatan dan Barat yang telah mendukung penyusunan laporan ini dan melaksanakan tugas dengan bersungguh-sungguh, dengan semangat demi terwujudnya Pengadilan Tinggi Makassar dan Pengadilan Negeri se-Sulawesi Selatan dan Barat yang Agung.



Makassar, 21 Januari 2022

Ketua Pengadilan Tinggi Makassar



Dr. H. SYAHRIAL SIDIK, SH., MH.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	ii
DAFTAR TABEL.....	iii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
BAB II KEADAAN DAN PELAKSANAAN PERKARA SERTA PELAYANAN HUKUM.....	9
A. Keadaan Perkara di Peradilan Umum.....	9
- Keadaan Perkara Tingkat Pertama.....	9
- Keadaan Perkara Tingkat Banding.....	15
B. Penyelesaian Perkara.....	17
- Jumlah Sisa Perkara yang Diputus.....	17
- Jumlah Perkara yang Diputus Tepat Waktu.....	20
- Jumlah Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding, Kasasi dan PK.....	21
- Jumlah Perkara Perdata yang Berhasil dimediasi.....	23
- Jumlah Perkara Anak yang Berhasil Melalui Diversi.....	24
C. Akreditasi Penjaminan Mutu (Sertifikasi ISO Pengadilan)	26
- Posbakum.....	26
- Sidang Keliling/Pelayanan Terpadu.....	28
- Perkara Prodeo (pembebasan Biaya Perkara).....	30
BAB III SUMBER DAYA MANUSIA.....	33
- Mutasi.....	43
- Promosi.....	54
- Pensiun.....	57
- Meninggal.....	59
- Diklat (SDM Teknis/Non Teknis yang Telah Mengikuti Diklat).....	60
BAB IV PENGELOLAAN KEUANGAN, SARANA DAN PRASARANA DAN TEKNOLOGI INFORMASI.....	62
A. Pengelolaan Keuangan.....	62
B. Pengelolaan Sarana dan Prasarana.....	65
C. Pengelolaan Teknologi Informasi.....	76
- Implementasi e-court di Lingkungan Peradilan Umum.....	78
- Implementasi SIPP di Lingkungan Peradilan Umum.....	80
BAB V PENINGKATAN PELAYANAN PUBLIK.....	81
- Akreditasi Penjaminan Mutu.....	82
- Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP).....	83
- Inovasi Pelayanan Publik.....	84
BAB VI PENGAWASAN.....	91
A. Internal.....	91
B. Evaluasi.....	92
BAB VII PENUTUP.....	93
A. Kesimpulan.....	93
B. Rekomendasi.....	94

DAFTAR TABEL

1	Tabel II.1. Keadaan Perkara Tingkat Pertama Tahun 2021	9
2	Tabel II.2. Keadaan Perkara Perdata Tingkat Banding Tahun 2021	15
3	Tabel II.3. Keadaan Perkara Pidana Tingkat Banding Tahun 2021	16
4	Tabel II.4. Keadaan Perkara Tipior Tingkat Banding Tahun 2021	16
5	Tabel II.5. Keadaan Perkara Pidana Anak Tingkat Banding Tahun 2021	17
6	Tabel II. 6. Rekapitulasi Sisa Perkara Perdata, Pidana, Tipikor dan Pidana Anak Tahun 2020 Pengadilan Tinggi Makassar Yang Diputus Tahun 2021	17
7	Tabel II.7. Keadaan Sisa Perkara Tahun 2020 Pengadilan Tingkat Pertama yang di Putus Tahun 2021	18
8	Tabel II.8. Keadaan Perkara Pengadilan Tinggi Makassar yang Diputus Tepat Waktu	20
9	Tabel II. 9. Rekapitulasi Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding, Kasasi Pada Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Makassar Tahun 2021	21
10	Tabel II.10. Jumlah Perkara yang Berhasil Dimediasi	23
11	Tabel II.11. Jumlah Perkara Anak yang Berhasil Melalui Diversi	24
12	Tabel II.12. Jumlah Perkara ecourt Tahun 2021	24
13	Tabel II.13. Data Perkara ecourt dan e-litigasi Tahun 2021	25
14	Tabel II.14. Realisasi Anggaran POSBAKUM	27
15	Tabel II.15. Alokasi dan Realisasi Anggaran Sidang Keliling Tahun 2021	30
16	Tabel II.16. Alokasi dan Realisasi Anggaran Prodeo Tahun 2021	32
17	Tabel III.1. Rekap Personil Wilayah Pengadilan Tinggi Makassar Tahun 2021	33
18	Tabel III.2. Jumlah Personil Pengadilan Dalam Lingkungan Peradilan Umum Se Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Makassar Di Sulawesi Selatan dan Barat Per : 2021	35
19	Tabel III.3. Jumlah Jabatan Yang Kosong Pada Pengadilan Dalam Lingkungan Peradilan Umum Se Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Makassar Di Sulawesi Selatan Bulan Desember 2021	36
20	Tabel III.4. Perbandingan Majelis Hakim Dan Fungsional Kepaniteraan Serta Beban Kerja / Perkara Yang Harus Ditangani	37
21	Tabel III.5. Beban Kerja Berdasarkan Perkara Pidana dan Perdata Dalam 1 Bulan Tiap Majelis Hakim	39
22	Tabel III.6. Mutasi Tenaga Teknis Selama Tahun 2021	41
23	Tabel III.7. Kenaikan Pangkat Periode April 2021	42
24	Tabel III.8. Kenaikan Pangkat Periode Oktober 2021	43
25	Tabel III.9. Mutasi Masuk Tahun 2021	43
26	Tabel III.10. Mutasi Keluar Tahun 2021	50
27	Tabel III.11. Promosi Jabatan Tahun 2021	54
28	Tabel III.12. Pensiun Tahun 2021	57
29	Tabel III.13. Meninggal Dunia Tahun 2021	59
30	Tabel III.14. Tenaga Tehnis Yang Pernah Mengikuti Diklat Peningkatan Profesionalisme Dan Pendidikan Formal Hukum (S1, S2 Dan S3)	60
31	Tabel III.15. Prosentase Tenaga Teknis yang telah mengikuti Diklat Peningkatan Profesionalisme	60

32	Tabel IV.1. LRADIPA 01 PT Makassar dan PN Se-Sulawesi Selatan dan Barat Tahun 2021	63
33	Tabel IV.2. LRADIPA 03 PT Makassar dan PN Se-Sulawesi Selatan dan Barat Tahun 2021	65
34	Tabel IV.3. Sarana/Prasarana Pengadilan Tinggi Makassar dan Pengadilan Negeri Se-Sulawesi Selatan dan Barat Tahun 2021	66
35	Tabel IV.4. Rumah Dinas Pengadilan Tinggi Makassar dan Pengadilan Negeri Se-Sulawesi Selatan dan Barat Tahun 2021	67
36	Tabel IV.5 Data Kendaraan Dinas Pengadilan Tinggi Makassar dan Pengadilan Negeri Se-Sulawesi Selatan dan Barat Tahun 2021	71
37	Tabel IV.6. Implementasi e-court di lingkungan Peradilan Umum	79
38	Tabel IV.7. Implementasi SIPP di lingkungan Peradilan Umum Tahun 2021	80
39	Tabel V.1. Peradilan Umum di Wilayah Pengadilan Tinggi Makassar Yang Telah Terakreditasi	81
40	Tabel V.2. Daftar Inovasi pada Pengadilan Negeri di Wilayah Pengadilan Tinggi Makassar	86

BAB I PENDAHULUAN

Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Hal ini berdasarkan pada Undang Undang Dasar 1945 Pasal 24 ayat 1 dan 2 jo Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi. Pada lingkungan Peradilan Umum, Kekuasaan Kehakiman dilaksanakan oleh Pengadilan Negeri sebagai Pengadilan Tingkat Pertama dan Pengadilan Tinggi sebagai Pengadilan Tingkat Banding.

Pengadilan Tinggi Makassar mempunyai tugas pokok untuk memeriksa, memutus dan mengadili perkara pidana, perkara perdata, perkara tipikor di tingkat banding serta mengadili di tingkat pertama dan terakhir sengketa kewenangan mengadili antar pengadilan negeri di daerah hukumnya. Selain tugas pokok tersebut, Pengadilan Tinggi juga mempunyai beberapa fungsi yaitu sebagai kawal depan (voorpost) Mahkamah Agung dalam melakukan pengawasan di wilayah

hukumnya, melakukan pembinaan dan konsultasi terhadap penyelenggaraan peradilan di wilayah hukumnya, menyusun laporan hasil pengawasan, menyusun laporan perkara, menyusun statistik perkara serta mengkaji hasil evaluasi dan laporan periodik dari semua pengadilan negeri di wilayah hukum pengadilan tinggi dan salah satunya adalah Laporan Pelaksanaan Kegiatan.

Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Makassar sebagai salah satu kawal depan Mahkamah Agung mempunyai yurisdiksi yang sangat luas dengan wilayah yurisdiksi 27 (dua puluh tujuh) satuan kerja Pengadilan Negeri yang tersebar di Kota dan Kabupaten se Sulawesi Selatan dan Barat.



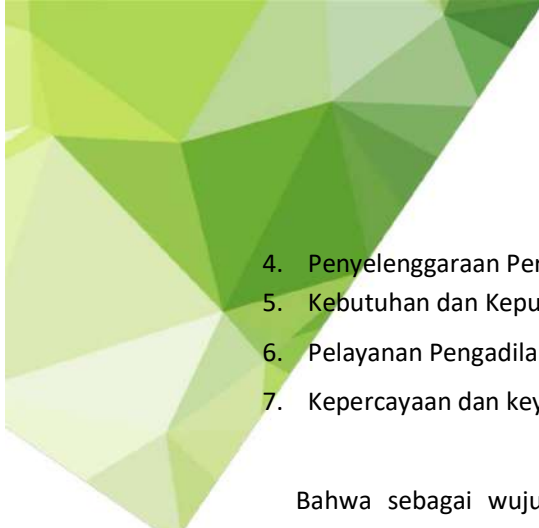
Pengadilan Tinggi Makassar mengharapkan terwujudnya transparansi peradilan dan pelayanan publik yang baik guna mendukung transparansi peradilan yang sangat ditunggu dan didambakan oleh masyarakat pencari keadilan di Makassar.



Sejalan dengan itu seluruh satuan kerja Peradilan Negeri se Sulawesi Selatan dan Barat telah mengelola website sebagai sarana penunjang kemudahan untuk memperoleh layanan informasi dan selain itu transparansi seluruh Pengadilan Negeri se Sulawesi Selatan dan Barat diwajibkan untuk mengelola meja informasi dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) sebagai garda depan untuk memberikan informasi kepada masyarakat pencari keadilan, serta mewajibkan seluruh aparat Peradilan untuk meng-input data perkara kedalam Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP).

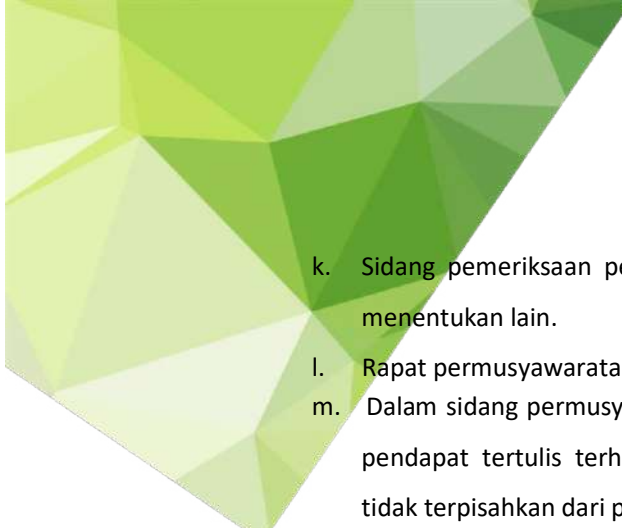
Bahwa sejalan dengan transparansi Informasi melalui Informasi Teknologi (IT) Pengadilan Tinggi Makassar tetap berupaya untuk melakukan upaya mendukung Pembaruan di Mahkamah Agung, sebagaimana yang digariskan didalam Cetak Biru Pembaruan Badan Peradilan 2010-2035 yang berisi langkah-langkah dan upaya pengadilan unggul meliputi 7 (tujuh) area yang harus dikembangkan yaitu :

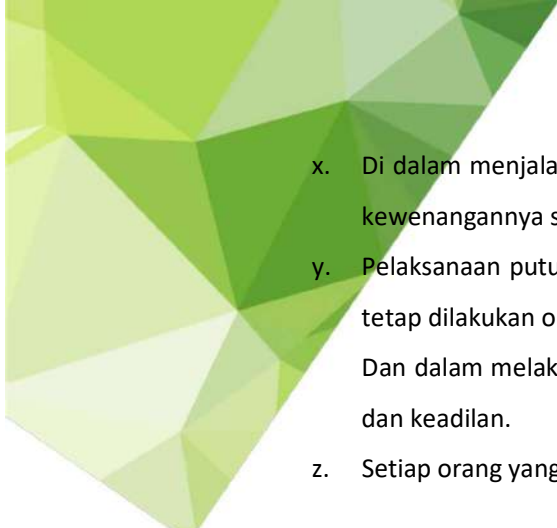
1. Kepemimpinan dan Manajemen Pengadilan;
2. Kebijakan-kebijakan Pengadilan;
3. Sumber Daya Manusia, Sarana Prasarana dan Anggaran;

- 
4. Penyelenggaraan Persidangan;
 5. Kebutuhan dan Kepuasan Pengguna Keadilan;
 6. Pelayanan Pengadilan yang terjangkau;
 7. Kepercayaan dan keyakinan masyarakat pada pengadilan;

Bahwa sebagai wujud kongkrit Pengadilan Tinggi Makassar sebagai salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman, telah melakukan langkah-langkah kongkrit yaitu :

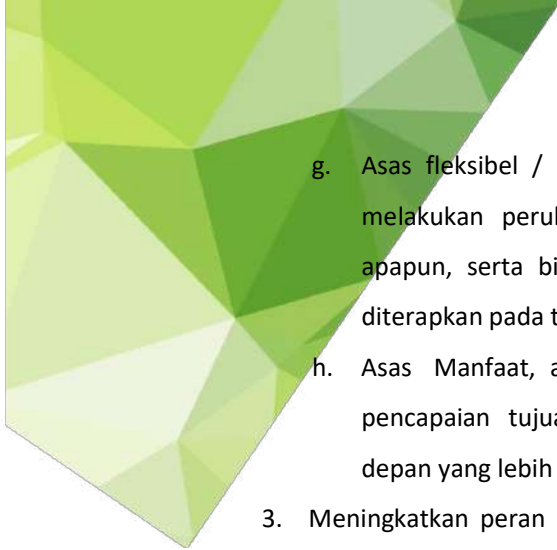
1. **Dalam Menyelenggarakan Kekuasaan Kehakiman**, terus meningkatkan ketaatan pada asas dan peraturan perundangan yang berlaku dalam melaksanakan kekuasaan kehakiman, dengan lebih memperhatikan hal-hal yang sudah diatur dalam peraturan. Asas-asas penyelenggaraan peradilan adalah sebagai berikut :
 - a. Semua pengadilan menerapkan dan menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila.
 - b. Peradilan dilakukan **“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA KUASA”**.
 - c. Peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat dan biaya ringan.
 - d. Segala campur tangan dalam urusan peradilan oleh pihak lain di luar kekuasaan kehakiman dilarang, kecuali dalam hal-hal sebagaimana disebut dalam Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
 - e. Pengadilan mengadili menurut hukum dengan tidak membeda-bedakan orang.
 - f. Pengadilan membantu pencari keadilan dan berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk dapat tercapainya peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan.
 - g. Tidak seorangpun dapat dihadapkan di depan pengadilan selain dari pada yang ditentukan oleh undang-undang.
 - h. Pengadilan tidak boleh menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya.
 - i. Semua pengadilan memeriksa, mengadili, dan memutus dengan sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang hakim, kecuali undang-undang menentukan lain.
 - j. Sidang dibantu oleh seorang Panitera atau seseorang yang ditugaskan melakukan pekerjaan panitera.

- 
- k. Sidang pemeriksaan pengadilan adalah terbuka untuk umum, kecuali undang-undang menentukan lain.
 - l. Rapat permusyawaratan hakim bersifat rahasia.
 - m. Dalam sidang permusyawaratan, setiap hakim wajib menyampaikan pertimbangan atau pendapat tertulis terhadap perkara yang sedang diperiksa dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan.
 - n. Dalam hal sidang permusyawaratan tidak dapat dicapai mufakat bulat, pendapat hakim yang berbeda wajib dimuat dalam putusan.
 - o. Semua putusan pengadilan hanya sah dan mempunyai kekuatan hukum apabila diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum.
 - p. Terhadap putusan pengadilan tingkat pertama dapat dimintakan banding kepada Pengadilan Tinggi oleh pihak-pihak yang bersangkutan, kecuali undang-undang menentukan lain.
 - q. Terhadap putusan pengadilan dalam tingkat banding dapat dimintakan kasasi kepada Mahkamah Agung oleh pihak-pihak yang bersangkutan, kecuali undang-undang menentukan lain.
 - r. Terhadap putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, pihak-pihak yang bersangkutan dapat mengajukan peninjauan kembali kepada Mahkamah Agung, apabila terdapat hal atau keadaan tertentu yang ditentukan dalam undang-undang. Terhadap putusan peninjauan kembali tidak dapat dilakukan peninjauan kembali.
 - s. Segala putusan pengadilan selain harus memuat alasan dan dasar putusan tersebut, memuat pula pasal tertentu dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili.
 - t. Tiap putusan pengadilan harus ditandatangani oleh Hakim Ketua Sidang dan Hakim Anggota yang memutus dan juga oleh Panitera yang membantu persidangan.
 - u. Setiap Berita Acara Sidang ditandatangani oleh Hakim Ketua dan Panitera sidang.
 - v. Untuk kepentingan peradilan semua aparatur Pengadilan wajib saling memberi bantuan yang diminta.
 - w. Setiap hakim wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.

- 
- x. Di dalam menjalankan tugasnya, setiap hakim harus memperhatikan hak, kewajiban dan kewenangannya sebagaimana di atur dalam peraturan-perundangan yang berlaku.
 - y. Pelaksanaan putusan pengadilan dalam perkara perdata yang telah berkekuatan hukum tetap dilakukan oleh Panitera dan Juru Sita dipimpin oleh Ketua Pengadilan.
Dan dalam melaksanakan Putusan Pengadilan, harus memperhatikan nilai kemanusiaan dan keadilan.
 - z. Setiap orang yang tersangkut perkara berhak memperoleh bantuan hukum.

2. **Di dalam Menyusun Suatu Perencanaan**, harus lebih meningkatkan dan memperhatikan asas-asas sebagai berikut :

- a. Asas stabilitas (*principle of planning stability*), artinya perencanaan diadakan untuk masa mendatang yang penuh perubahan dan ketidakpastian, dan karena kondisi yang penuh perubahan maka perlu adanya stabilitas, baik program kegiatan, *schedule/jadwal* maupun anggarannya.
- b. Asas rasional, yaitu berdasarkan pemikiran-pemikiran dan perhitungan secara rasional, logis, bukan sekedar ramalan dan bukan sekedar atas kebiasaan yang telah dilakukan selama ini.
- c. Asas kontinyu, yaitu mempunyai wawasan ke masa depan yang diinginkan atau berkelanjutan. Artinya perencanaan harus terus menerus dibuat dan berkelanjutan. Tidak sekali saja dibuat untuk seumur hidup organisasi.
- d. Asas alternatif (*principle of present choices*). Perlu menentukan pilihan sejak awal, yang disusun sekarang. Oleh karena itu : orang, biaya, metoda, dan lain-lain, ditentukan untuk ikut menentukan hasilnya nanti.
- e. Asas perkiraan (*principle of positive action*). Untuk tidak gagal dalam mendapatkan hasil di masa datang, harus menyusun / membuat rencana sekarang yang tepat (*sound plan*) dan yang dapat direalisasikan secara positif.
- f. Asas keseimbangan (*principle of common surate effert*). Perencanaan harus mengarah kepada usaha-usaha yang serasi / seimbang. Jadi, tidak mengedepankan masalah teknis yudisial saja, akan tetapi juga memikirkan pula masalah non teknis yudisial.

- 
- g. Asas fleksibel / lentur (*principle of resistance to change*). Mengikut sertakan untuk melakukan perubahan melalui perencanaan, artinya luwes, dimanapun dalam hal apapun, serta bila manapun perencanaan itu cocok dapat dilaksanakan. Jadi dapat diterapkan pada tempat, waktu dan keadaan bagaimanapun juga.
 - h. Asas Manfaat, artinya perencanaan itu betul-betul memberikan manfaat dalam pencapaian tujuan organisasi, menghilangkan ketidakpastian dan membentuk hari depan yang lebih baik.
3. Meningkatkan peran serta seluruh aparatur / komponen Pengadilan, yaitu Hakim, Pejabat Struktural, pejabat fungsional kepaniteraan / kejurusitaan dan staf, di dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi pengadilan;
 4. Menyederhanakan ketentuan dan tata cara untuk mempercepat proses pengambilan keputusan;
 5. Meningkatkan kualitas pelayanan kepada publik, melalui Standard Operasional Procedure (SOP) dengan baik ;
 6. Meningkatkan profesionalisme, kemandirian dan tanggung jawab aparatur Pengadilan/seluruh komponen Pengadilan.
 7. Membuat penetapan kinerja bagi seluruh Pejabat Pengadilan dan pejabat-pejabat di bawahnya secara berjenjang, yang bertujuan untuk meningkatkan dan mewujudkan suatu capaian kinerja tertentu dengan sumber daya tertentu, melalui penetapan target kinerja serta indikator kinerja yang menggambarkan keberhasilan pencapaiannya baik berupa hasil maupun manfaat .
 8. Melaporkan harta kekayaan seluruh aparatur Pengadilan yang terkena peraturan untuk itu, kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)
 9. Mencegah berbagai macam kebocoran dan pemborosan penggunaan keuangan negara yang berasal dari Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) masing-masing Pengadilan.
 10. Pengadilan Tinggi Makassar terus meningkatkan upaya pengawasan dan pembinaan terhadap seluruh kinerja aparatur Peradilan dibawahnya, dengan cara sebagai berikut :

a. Pembinaan

Bahwa jadwal kunjungan kerja disetiap Pengadilan Negeri di Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Makassar, sebagaimana yang telah ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Makassar dilakukan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Makassar, dengan didampingi oleh Hakim Tinggi, Panitera, dan Sekretaris. Selain Pembinaan dengan kunjungan langsung ke Pengadilan Negeri juga dilakukan pembinaan melalui *teleconference*.

b. Pengawasan

Bahwa jadwal kunjungan kerja disetiap Pengadilan Negeri di Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Makassar, sebagaimana yang telah ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Makassar, dilakukan oleh Hakim Tinggi Pengawas Daerah dengan didampingi oleh Pejabat struktural dan Pejabat fungsional kepaniteraan yang ditunjuk, dengan melakukan pemeriksaan terhadap bidang Kepaniteraan dan bidang Kesekretariatan.

11. Pelaksanaan Tugas Pokok Dan Fungsi (Tupoksi) Pengadilan, seiring dengan berjalannya waktu maka di akhir penghujung tahun 2015, Mahkamah Agung telah mengeluarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015, tentang **ORGANISASI DAN TATA KERJA KEPANITERAAN DAN KESEKRETARIATAN PERADILAN** yang berlaku sejak tanggal di Undangkan pada tanggal 7 Oktober 2015.
12. Dalam pengelolaan keuangan negara, Pengadilan Tinggi Makassar, telah meningkatkan :
 - a. Kualitas dalam tata cara dan keterampilan dalam penyusunan perencanaan anggaran (RKA-KL) yang aspiratif (memenuhi standar kebutuhan Pengadilan), partisipatif (melibatkan seluruh komponen pengadilan), didasarkan argumentasi, parameter yang obyektif dan skala prioritas.
 - b. Kualitas dalam pengelolaan anggaran, mulai dari pemenuhan kebutuhan anggaran pengadilan, adanya revisi anggaran, proses pencairan anggaran yang lebih terjadwal, adanya penentuan skala prioritas penggunaan anggaran dan lain sebagainya.

VISI dan MISI

Salah satu syarat agar organisasi Mahkamah Agung ini dapat berjalan dengan baik adalah adanya suatu **VISI dan MISI**.

Adapun **Visi Mahkamah Agung RI** (yang juga merupakan penegasan dan perwujudan kehendak atau cita-cita rakyat Indonesia di bidang pelaksanaan kekuasaan kehakiman) telah dirumuskan oleh Mahkamah Agung sebagai berikut :



VISI MAHKAMAH AGUNG :

“Terwujudnya Badan Peradilan Indonesia Yang Agung”

MISI MAHKAMAH AGUNG :

1. Menjaga kemandirian Badan Peradilan
2. Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan
3. Meningkatkan kualitas kepemimpinan Badan Peradilan
4. Meningkatkan kredibilitas dan transparansi Badan Peradilan

Bahwa Pengadilan Tinggi Makassar sebagai salah satu pelaksana Kekuasaan Kehakiman dalam menunjang dan mendukung serta mewujudkan visi dan misi Mahkamah Agung, telah melakukan langkah-langkah konkrit mewujudkan visi dan misinya, yaitu :

Visi Pengadilan Tinggi Makassar adalah:

“Terwujudnya Pengadilan Tinggi Makassar Yang Agung”

Sedangkan bersamaan dengan visi tersebut, Pengadilan Tinggi Makassar dalam menjalankan tugas dan wewenangnya juga mempunyai Misi, yaitu :

1. Menjaga kemandirian Pengadilan Tinggi Makassar.
2. Memberikan Pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan
3. Meningkatkan Kualitas kepemimpinan di Pengadilan Tinggi Makassar
4. Meningkatkan Kredibilitas dan transparansi di Pengadilan Tinggi Makassar

BAB II

KEADAAN DAN PENYELESAIAN PERKARA SERTA PELAYANAN HUKUM

A. Keadaan Perkara di Peradilan Umum

Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan (Pasal 24 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 Amandemen ke-IV, kekuasaan kehakiman dilaksanakan oleh Mahkamah Agung RI, Badan-badan peradilan lain di bawah Mahkamah Agung (Peradilan Umum, Peradilan Tata Usaha Negara, Peradilan Militer, Peradilan Agama) dan Mahkamah

Konstitusi (Pasal 24 ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945). Penyelenggaraan kekuasaan Kehakiman tersebut diserahkan kepada badan-badan peradilan (Peradilan Umum, Peradilan Agama, Peradilan Militer, dan Mahkamah Agung sebagai pengadilan tertinggi dengan tugas pokok untuk menerima, memeriksa dan mengadili serta menyelesaikan setiap perkara yang diajukan kepadanya).

- Keadaan Perkara Tingkat Pertama

Berikut ini rincian keadaan perkara Pengadilan Tingkat Pertama di wilayah hukum Pengadilan Tinggi Makassar tahun 2021.

Tabel II.1. Keadaan Perkara Tingkat Pertama Tahun 2021

NO	SATKER	PERKARA	PERKARA MASUK 2021	PUTUS 2021	SISA	KET
1	PN MAKASSAR	Pidana Biasa	2425	1995	433	
	KELAS I A KHUSUS	Pidana Singkat	6	6	0	
		Pidana Cepat/Ringan	6	6	0	
		Pidana Lalu Lintas	7227	7227	0	
		Pidana Khusus Tipikor	99	86	43	
		Pidana Khusus Anak	81	78	3	
		Pidana Pra Peradilan	19	21	1	
		Perdata Gugatan	453	406	200	
		Perdata Permohonan	436	372	21	
		Perdata Khusus Kepailitan	4	2	2	
		Perdata Khusus Niaga PKPU	10	9	1	
		Perdata Khusus Niaga HKI	0	0	0	
		Perdata Khusus Niaga Lain	3	1	2	
		Perdata Khusus PHI	61	59	13	
		Perdata Perlawanan	24	18	13	
		Perdata Gugatan Sederhana	61	44	11	
		Perdata Eksekusi	45	20	74	
2	PN SUNGGUMINASA	Pidana Biasa	415	430	68	
	KELAS I A	Pidana Singkat	0	1	1	
		Pidana Cepat/Ringan	4	4	0	
		Pidana Lalu Lintas	5010	5010	0	
		Pidana Khusus Anak	21	21	0	
		Pidana Pra Peradilan	7	6	1	
		Perdata Gugatan	89	86	43	

		Perdata Permohonan	174	174	3
		Perdata Perlawanan	0	0	0
		Perdata Gugatan Sederhana	6	6	0
		Perdata Eksekusi	9	9	36
3	PN MAMUJU	Pidana Biasa	277	277	55
	KELAS I A	Pidana Singkat	0	0	0
		Pidana Cepat/Ringan	0	0	0
		Pidana Lalu Lintas	3033	3033	0
		Pidana Khusus Tipikor	21	25	6
		Pidana Khusus Anak	8	8	0
		Pidana Pra Peradilan	2	1	1
		Perdata Gugatan	28	24	13
		Perdata Permohonan	40	41	0
		Perdata Khusus PHI	4	4	0
		Perdata Perlawanan	2	1	1
		Perdata Gugatan Sederhana	8	9	0
		Perdata Eksekusi	4	6	11
4	PN WATAMPONE	Pidana Biasa	292	296	29
	KELAS I A	Pidana Singkat	2	2	0
		Pidana Cepat/Ringan	3	3	0
		Pidana Lalu Lintas	764	764	0
		Pidana Khusus Anak	10	10	0
		Pidana Pra Peradilan	2	2	0
		Perdata Gugatan	46	57	16
		Perdata Permohonan	26	32	0
		Perdata Gugatan Sederhana	11	16	0
		Perdata Eksekusi	3	0	3
5	PN MAROS	Pidana Biasa	185	190	4
	KELAS I B	Pidana Singkat	0	0	0
		Pidana Cepat/Ringan	6	6	0
		Pidana Lalu Lintas	1539	1539	0
		Pidana Khusus Anak	7	7	0
		Pidana Pra Peradilan	0	0	0
		Perdata Gugatan	57	51	19
		Perdata Permohonan	89	89	0
		Perdata Perlawanan	2	0	2
		Perdata Gugatan Sederhana	2	2	0
		Perdata Eksekusi	42	18	44
6	PN MAKALE	Pidana Biasa	169	169	19
	KELAS I B	Pidana Singkat	0	0	0
		Pidana Cepat/Ringan	10	10	0
		Pidana Lalu Lintas	1537	1537	0
		Pidana Khusus Anak	20	20	1
		Pidana Pra Peradilan	2	2	0
		Perdata Gugatan	253	194	59
		Perdata Permohonan	72	68	4
		Perdata Perlawanan	1	0	1
		Perdata Gugatan Sederhana	4	4	0
		Perdata Eksekusi	19	9	10
7	PN PALOPO	Pidana Biasa	212	187	25
	KELAS I B	Pidana Singkat	0	0	0
		Pidana Cepat/Ringan	11	11	0
		Pidana Lalu Lintas	181	181	0
		Pidana Khusus Anak	20	20	0
		Perdata Gugatan	31	24	7
		Perdata Permohonan	26	26	0

		Perdata Perlawanan	2	2	0	
		Perdata Gugatan Sederhana	3	3	0	
		Perdata Eksekusi	8	3	7	1 dicabut
8	PN SENGKANG	Pidana Biasa	254	234	33	sisa tahun 2020=13
	KELAS I B	Pidana Singkat	0	0	0	
		Pidana Cepat/Ringan	24	24	0	
		Pidana Lalu Lintas	2,781	2781	0	
		Pidana Khusus Anak	5	5	0	
		Perdata Gugatan	51	45	26	
		Perdata Permohonan	58	57	2	sisa tahun 2020 =1
		Perdata Gugatan Sederhana	9	8	1	
		Perdata Eksekusi	5	16	1	sisa tahun 2020=12
9	PN BULUKUMBA	Pidana Biasa	271	241	30	
	KELAS I B	Pidana Singkat	0	0	0	
		Pidana Cepat/Ringan	6	6	0	
		Pidana Lalu Lintas	1142	1142	0	
		Pidana Khusus Anak	16	15	1	
		Pidana Pra Peradilan	2	2	0	
		Perdata Gugatan	35	31	12	
		Perdata Permohonan	116	115	1	
		Perdata Gugatan Sederhana	16	16	0	
		Perdata Eksekusi	6	14	20	
10	PN PANGKAJENE	Pidana Biasa	130	22	18	
	KELAS II	Pidana Singkat	0	18	0	
		Pidana Cepat/Ringan	2	6	0	
		Pidana Lalu Lintas	268	129	18	
		Pidana Khusus Anak	1	0	0	
		Perdata Gugatan	32	2	0	
		Perdata Permohonan	19	268	0	
		Perdata Gugatan Sederhana	5	1	0	
		Perdata Eksekusi	2	1	1	Termohon III ajukan perlawanan
11	PN BARRU	Pidana Biasa	97	98	5	
	KELAS II	Pidana Singkat	0	0	0	
		Pidana Cepat/Ringan	7	7	0	
		Pidana Lalu Lintas	1117	1117	0	
		Pidana Khusus Anak	5	5	0	
		Pidana Pra Peradilan	0	0	0	
		Perdata Gugatan	21	17	9	
		Perdata Permohonan	49	46	3	
		Perdata Gugatan Sederhana	12	12	0	
		Perdata Eksekusi	1	0	1	
12	PN PAREPARE	Pidana Biasa	237	244	7	
	KELAS II	Pidana Singkat	0	0	0	
		Pidana Cepat/Ringan	2	2	0	
		Pidana Lalu Lintas	434	434	0	
		Pidana Khusus Anak	6	6	0	
		Perdata Gugatan	35	26	12	
		Perdata Permohonan	78	78	0	
		Perdata Perlawanan	0	0	0	
		Perdata Gugatan Sederhana	1	1	0	
		Perdata Eksekusi	4	7	20	
13	PN SIDENRENG RAPPANG	Pidana Biasa	266	251	28	
	KELAS II	Pidana Singkat	0	0	0	
		Pidana Cepat/Ringan	7	7	0	

		Pidana Lalu Lintas	3432	3432	0	
		Pidana Pra Peradilan	2	1	1	
		Perdata Gugatan	44	39	12	
		Perdata Permohonan	22	22	0	
		Perdata Gugatan Sederhana	0	0	0	
		Perdata Eksekusi	8	13	12	
14	PN PINRANG	Pidana Biasa	284	248	36	
	KELAS II	Pidana Singkat	0	0	0	
		Pidana Cepat/Ringan	10	10	0	
		Pidana Lalu Lintas	632	632	0	
		Pidana Khusus Anak	10	10	0	
		Pidana Pra Peradilan	1	1	0	
		Perdata Gugatan	27	16	11	
		Perdata Permohonan	34	29	5	
		Perdata Perlawanan	1	0	1	
		Perdata Gugatan Sederhana	9	9	0	
		Perdata Eksekusi	3	2	1	
15	PN TAKALAR	Pidana Biasa	180	178	2	
	KELAS II	Pidana Singkat	0	0	0	
		Pidana Cepat/Ringan	4	4	0	
		Pidana Lalu Lintas	1829	1829	0	
		Pidana Khusus Tipikor	0	0	0	
		Pidana Khusus Anak	18	18	0	
		Pidana Pra Peradilan	2	2	0	
		Perdata Gugatan	54	59	8	sisa tahun lalu : 13
		Perdata Permohonan	24	23	1	
		Perdata Perlawanan	0	0	0	
		Perdata Gugatan Sederhana	14	14	0	
		Perdata Eksekusi	2	7	3	Sisa Tahun Lalu : 7
16	PN JENEPONTO	Pidana Biasa	156	131	25	
	KELAS II	Pidana Singkat	0	0	0	
		Pidana Cepat/Ringan	7	7	0	
		Pidana Lalu Lintas	678	678	0	
		Pidana Khusus Anak	4	4	0	
		Perdata Gugatan	35	28	7	
		Perdata Permohonan	5	5	0	
		Perdata Gugatan Sederhana	3	3	0	
		Perdata Eksekusi	3	0	3	
17	PN BANTAENG	Pidana Biasa	134	129	5	
	KELAS II	Pidana Singkat	0	0	0	
		Pidana Cepat/Ringan	9	9	0	
		Pidana Lalu Lintas	1324	1324	0	
		Pidana Khusus Anak	9	9	0	
		Pidana Pra Peradilan	1	1	0	
		Perdata Gugatan	9	6	3	
		Perdata Permohonan	16	16	0	
		Perdata Gugatan Sederhana	2	2	0	
		Perdata Eksekusi	1	0	1	
18	PN SINJAI	Pidana Biasa	102	102	18	Sisa Tahun 2020:18
	KELAS II	Pidana Singkat	0	0	0	Sisa Tahun 2020 : 0
		Pidana Cepat/Ringan	2	2	0	Sisa Tahun 2020: 0
		Pidana Lalu Lintas	157	157	0	Sisa Tahun 2020 : 0
		Pidana Khusus Anak	8	7	1	Sisa Tahun 2020 : 0
		Perdata Gugatan	16	23	4	
		Perdata Permohonan	99	74	0	
		Perdata Eksekusi	2	0	2	

19	PN WATANSOPPENG	Pidana Biasa	126	146	19	sisa tahun 2020:39
	KELAS II	Pidana Singkat	0	0	0	
		Pidana Cepat/Ringan	4	4	0	
		Pidana Lalu Lintas	1172	1172	0	
		Pidana Khusus Anak	3	5	0	sisa tahun 2020 : 2
		Perdata Gugatan	11	7	5	sisa tahun 2020 : 1
		Perdata Permohonan	50	50	0	
		Perdata Gugatan Sederhana	2	2	0	
		Perdata Eksekusi	2	4	0	sisa tahun 2020 : 2
20	PN SELAYAR	Pidana Biasa	76	76	9	sisa tahun 2020 = 9
	KELAS II	Pidana Singkat	0	0	0	
		Pidana Cepat/Ringan	5	5	0	
		Pidana Lalu Lintas	252	252	0	
		Pidana Khusus Anak	8	8	0	
		Pidana Pra Peradilan	0	0	0	
		Perdata Gugatan	10	9	5	sisa tahun 2020 = 4
		Perdata Permohonan	105	105	0	
		Perdata Perlawanan	0	0	0	
		Perdata Gugatan Sederhana	2	2	0	
		Perdata Eksekusi	2	2	0	
21	PN MALILI	Pidana Biasa	155	145	16	sisa Tahun 2020 = 6
	KELAS II	Pidana Singkat	0	0	0	
		Pidana Cepat/Ringan	5	5	0	
		Pidana Lalu Lintas	804	804	0	
		Pidana Khusus Anak	15	15	0	
		Pidana Pra Peradilan	0	0	0	
		Perdata Gugatan	63	61	13	sisa Tahun 2020=11
		Perdata Gugatan Sederhana	2	2	0	
		Perdata Permohonan	27	27	0	
		Perdata Eksekusi	4	1	3	
22	PN MASAMBA	Pidana Biasa	123	122	11	sisa tahun 2020 = 9
	KELAS II	Pidana Singkat	0	0	0	sisa tahun 2020 = 0
		Pidana Cepat/Ringan	2	2	0	sisa tahun 2020 = 0
		Pidana Lalu Lintas	632	632	0	sisa tahun 2020 = 0
		Pidana Khusus Anak	8	8	0	sisa tahun 2020 = 0
		Pidana Pra Peradilan	1	1	0	sisa tahun 2020 = 0
		Perdata Gugatan	42	44	7	sisa tahun 2020 = 9
		Perdata Permohonan	24	24	0	sisa tahun 2020 = 0
		Perdata Gugatan Sederhana	1	1	0	sisa tahun 2020 = 0
		Perdata Eksekusi	8	5	3	
23	PN ENREKANG	Pidana Biasa	65	71	13	sisa tahun 2020=19
	KELAS II	Pidana Singkat	0	0	0	sisa tahun 2020=0
		Pidana Cepat/Ringan	1	1	0	sisa tahun 2020=0
		Pidana Lalu Lintas	53	53	0	sisa tahun 2020=0
		Pidana Khusus Anak	3	3	0	sisa tahun 2020=0
		Pidana Pra Peradilan	1	1	0	sisa tahun 2020=0
		Perdata Gugatan	17	16	8	sisa tahun 2020=7
		Perdata Permohonan	25	24	1	sisa tahun 2020=0
		Perdata Gugatan Sederhana	1	1	0	sisa tahun 2020=0
		Perdata Eksekusi	5	2	7	
24	PN POLEWALI	Pidana Biasa	314	316	12	sisa Tahun 2020=14
	KELAS II	Pidana Singkat	0	0	0	sisa Tahun 2020=0
		Pidana Cepat/Ringan	5	5	0	sisa Tahun 2020=0
		Pidana Lalu Lintas	2847	2847	0	sisa Tahun 2020=0
		Pidana Khusus Anak	9	9	0	sisa Tahun 2020=0

		Pidana Pra Peradilan	3	3	0	sisa Tahun 2020=0)
		Perdata Gugatan	76	68	21	sisa Tahun 2020=13
		Perdata Permohonan	69	69	0	sisa Tahun 2020=0
		Perdata Gugatan Sederhana	9	10	0	sisa Tahun 2020=1
		Perdata Eksekusi	5	6	10	sisa Tahun 2020=11
25	PN MAJENE	Pidana Biasa	72	79	15	sisa tahun 2020=22
	KELAS II	Pidana Singkat	0	0	0	sisa tahun 2020 = 0
		Pidana Cepat/Ringan	2	2	0	sisa tahun 2020 = 0
		Pidana Lalu Lintas	1880	1880	0	sisa tahun 2020 = 0
		Pidana Khusus Anak	1	1	0	sisa tahun 2020 = 0
		Pidana Pra Peradilan	0	0	0	sisa tahun 2020 = 0
		Perdata Gugatan	13	16	2	sisa tahun 2020 = 5
		Perdata Permohonan	18	18	0	sisa tahun 2020 = 0
		Perdata Gugatan Sederhana	0	0	0	sisa tahun 2020 = 0
		Perdata Eksekusi	1	1	0	sisa tahun 2020 = 0
26	PN PASANGKAYU	Pidana Biasa	200	189	25	
	KELAS II	Pidana Singkat	0	0	0	
		Pidana Cepat/Ringan	0	0	0	
		Pidana Lalu Lintas	1076	1076	1076	
		Pidana Khusus Tipikor	0	0	0	
		Pidana Khusus Anak	10	10	0	
		Perdata Gugatan	11	10	2	
		Perdata Permohonan	15	15	0	
		Perdata Gugatan Sederhana	0	0	0	
		Perdata Eksekusi	1	0	1	
27	PN BELOPA	Pidana Biasa	116	116	19	sisa Tahun 2020=19
	KELAS II	Pidana Singkat	0	0	0	sisa Tahun 2020=0
		Pidana Cepat/Ringan	2	2	0	sisa Tahun 2020=0
		Pidana Lalu Lintas	1795	1795	0	sisa Tahun 2020=0
		Pidana Khusus Anak	13	13	0	Sisa Tahun 2020=0
		Pidana Pra Peradilan	0	0	0	sisa Tahun 2020=0
		Perdata Gugatan	30	36	7	sisa Tahun 2020=13
		Perdata Permohonan	59	60	0	sisa Tahun 2020=1
		Perdata Gugatan Sederhana	0	0	0	sisa Tahun 2020=0
		Perdata Eksekusi	2	0	2	sisa Tahun 2020=0

- **Keadaan Perkara Tingkat Banding**

Sebagai Pengadilan Tingkat Banding Pengadilan Tinggi Makassar menerima, meneliti, memeriksa dan memutus perkara banding pidana, perdata dan perkara Tindak pidana korupsi yang diajukan, oleh Pengadilan Negeri Se Sulawesi Selatan dan Barat terdiri dari 27 (dua puluh tujuh) Satker. Berkas perkara yang dimohon banding adalah Perkara Perdata Gugatan, untuk Perkara Pidana terdiri Pidana Biasa, Pidana Singkat, Pidana Cepat/Ringan/Lalu Lintas serta Pidana Khusus Tipikor.

Dalam Tahun 2021 keadaan perkara banding Pengadilan Tinggi Makassar secara umum dapat digambarkan sebagai berikut :

Tabel II.2.

Keadaan Perkara Perdata Tingkat Banding Tahun 2021

NO	BULAN	SISA BULAN LALU	MASUK	PUTUSAN AKHIR	SISA AKHIR	KET
1	JANUARI	99	34	64	69	
2	FEBRUARI	69	17	33	53	
3	MARET	53	50	41	62	
4	APRIL	62	35	29	68	
5	MEI	68	25	30	63	
6	JUNI	63	38	34	67	
7	JULI	67	29	25	71	
8	AGUSTUS	71	36	58	49	
9	SETEMBER	49	26	31	44	
10	OKTOBER	44	20	29	35	
11	NOVEMBER	35	40	22	53	
12	DESEMBER	53	33	35	51	
	JUMLAH		383	431		

Tabel II.3. Keadaan Perkara Pidana Tingkat Banding Tahun 2021

NO	BULAN	SISA BULAN	MASUK	PUTUSAN	SISA AKHIR	KET
1	JANUARI	86	77	72	91	
2	FEBRUARI	91	23	67	47	
3	MARET	47	125	49	123	
4	APRIL	123	71	103	91	
5	MEI	91	52	55	88	
6	JUNI	88	70	59	99	
7	JULI	99	58	77	80	
8	AGUSTUS	80	79	68	91	
9	SETEMBER	91	74	71	94	
10	OKTOBER	94	88	76	106	
11	NOVEMBER	106	96	76	126	
12	DESEMBER	126	99	122	103	
	JUMLAH		912	895		

Tabel II.4. Keadaan Perkara Tipikor Tingkat Banding Tahun 2021

NO	BULAN	SISA BULAN LALU	MASUK	PUTUSAN AKHIR	SISA AKHIR	KET
1	JANUARI	7	2	4	5	
2	FEBRUARI	5	2	3	4	
3	MARET	4	12	3	13	
4	APRIL	13	2	2	13	
5	MEI	13	0	11	2	
6	JUNI	2	4	1	5	
7	JULI	5	4	2	7	
8	AGUSTUS	7	8	7	8	
9	SETEMBER	8	3	6	5	
10	OKTOBER	5	3	5	3	
11	NOVEMBER	3	1	3	1	
12	DESEMBER	1	0	1	0	
	JUMLAH		41	48		

Tabel II.5. Keadaan Perkara Pidana Anak Tingkat Banding Tahun 2021

NO	BULAN	SISA BULAN LALU	MASUK	PUTUSAN AKHIR	SISA AKHIR	KET
1	JANUARI	0	5	5	0	
2	FEBRUARI	0	2	2	0	
3	MARET	0	2	2	0	
4	APRIL	0	3	2	1	
5	MEI	1	2	3	0	
6	JUNI	0	7	7	0	
7	JULI	0	1	1	0	
8	AGUSTUS	0	1	0	1	
9	SETEMBER	1	3	3	1	
10	OKTOBER	1	3	3	1	
11	NOVEMBER	1	1	2	0	
12	DESEMBER	0	2	1	1	
	JUMLAH		32	31		

B. Penyelesaian Perkara

- Jumlah Sisa Perkara Yang Diputus

Dalam Tahun 2021 keadaan Sisa perkara banding Pengadilan Tinggi Makassar yang diputus secara umum dapat digambarkan sebagai berikut :

Tabel II. 6. Rekapitulasi Sisa Perkara Perdata, Pidana, Tipikor dan Pidana Anak Tahun 20220

Pengadilan Tinggi Makassar Yang Diputus Tahun 2021

<i>PERKARA</i>	<i>SISA 2020</i>	<i>MASUK</i>	<i>PUTUS</i>	<i>SISA</i>	<i>KET</i>
<i>PERDATA</i>	<i>99</i>	<i>383</i>	<i>431</i>	<i>51</i>	
<i>PIDANA</i>	<i>86</i>	<i>912</i>	<i>895</i>	<i>103</i>	
<i>TIPIKOR</i>	<i>7</i>	<i>41</i>	<i>48</i>	<i>0</i>	
<i>PIDANA ANAK</i>	<i>0</i>	<i>32</i>	<i>31</i>	<i>1</i>	
<i>JUMLAH</i>	<i>192</i>	<i>1468</i>	<i>1405</i>	<i>155</i>	

Dari tabel di atas terlihat bahwa sisa perkara tahun 2020 sejumlah 192 perkara terdiri dari 99 perkara perdata, 86 perkara pidana, 7 perkara tipikor serta perkara pidana anak nihil, seluruh sisa perkara tersebut telah diputus pada tahun 2021.

Sedangkan untuk Pengadilan Negeri Se-Sulawesi Selatan dan Barat keadaan Sisa perkara tahun 2020 yang diputus pada Tahun 2021 secara umum dapat digambarkan sebagai berikut:

Tabel II.7. Keadaan Sisa Perkara Tahun 2020 Pengadilan Tingkat Pertama yang di Putus Tahun 2021

No.	PERKARA	SISA PERKARA	PUTUS	SISA	KET
		TAHUN 2020	TAHUN 2021		
1	PN MAKASSAR				
	PIDANA	518	518	0	
	PERDATA	236	236	0	
	TIPIKOR	30	30	0	
	NIAGA	3	3	0	
	PHI	13	13	0	
2	PN SUNGGUMINASA				
	PIDANA	78	78	0	
	PERDATA	44	44	0	
3	PN MAMUJU				
	PIDANA	55	55	0	
	PERDATA	11	11	0	
	TIPIKOR	10	10	0	
	NIAGA	0	0	0	
	PHI	0	0	0	
4	PN WATAMPONE				
	PIDANA	33	33	0	
	PERDATA	27	27	0	
5	PN MAROS				
	PIDANA	9	9	0	
	PERDATA	13	13	0	
6	PN MAKALE				
	PIDANA	19	19	0	
	PERDATA	60	59	1	
7	PN PALOPO				
	PIDANA	48	48	0	
	PERDATA	14	14	0	
8	PN SENGKANG				
	PIDANA	13	13	0	
	PERDATA	21	21	0	
9	PN BULUKUMBA				
	PIDANA	0	0	0	
	PERDATA	8	8	0	
10	PN PANGKAJENE				
	PIDANA	17	17	0	
	PERDATA	9	9	0	
11	PN BARRU				
	PIDANA	6	6	0	
	PERDATA	5	5	0	
12	PN PAREPARE				
	PIDANA	14	14	0	
	PERDATA	3	3	0	
13	PN SIDENRENG RAPPANG				
	PIDANA	13	13	0	
	PERDATA	9	9	0	

14	PN PINRANG				
	PIDANA	57	57	0	
	PERDATA	13	13	0	
15	PN TAKALAR				
	PIDANA	5	5	0	
	PERDATA	15	15	0	
16	PN JENEPONTO				
	PIDANA	5	5	0	
	PERDATA	6	6	0	
17	PN BANTAENG				
	PIDANA	1	1	0	
	PERDATA	3	3	0	
18	PN SINJAI				
	PIDANA	18	18	0	
	PERDATA	5	5	0	
19	PN WATANSOPPENG				
	PIDANA	41	41	0	
	PERDATA	1	1	0	
20	PN SELAYAR				
	PIDANA	9	9	0	
	PERDATA	4	4	0	
21	PN MALILI				
	PIDANA	6	6	0	
	PERDATA	11	11	0	
22	PN MASAMBA				
	PIDANA	9	9	0	
	PERDATA	9	9	0	
23	PN ENREKANG				
	PIDANA	19	19	0	
	PERDATA	7	7	0	
24	PN POLEWALI				
	PIDANA	14	14	0	
	PERDATA	14	14	0	
25	PN MAJENE				
	PIDANA	22	22	0	
	PERDATA	5	5	0	
26	PN PASANGKAYU				
	PIDANA	14	14	0	
	PERDATA	1	1	0	
27	PN BELOPA				
	PIDANA	19	19	0	
	PERDATA	14	14	0	

- **Jumlah Perkara Yang Diputus Tepat Waktu**

Dalam Tahun 2021 keadaan perkara banding Pengadilan Tinggi Makassar yang diputus tepat waktu secara umum dapat digambarkan sebagai berikut :

Tabel II.8. Keadaan Perkara Pengadilan Tinggi Makassar yang Diputus Tepat Waktu

<i>PERKARA</i>	<i>JUMLAH PUTUS 2021</i>	<i>PUTUS TEPAT WAKTU 3 BULAN</i>	<i>PUTUS LEWAT BATAS WAKTU 3 BULAN</i>	<i>KET</i>
<i>PERDATA</i>	<i>431</i>	<i>425</i>	<i>6</i>	
<i>PIDANA</i>	<i>895</i>	<i>894</i>	<i>1</i>	
<i>TIPIKOR</i>	<i>48</i>	<i>48</i>	<i>0</i>	
<i>PIDANA ANAK</i>	<i>31</i>	<i>31</i>	<i>0</i>	
<i>JUMLAH</i>	<i>1405</i>	<i>1398</i>	<i>7</i>	

Untuk perkara yang diputus tepat waktu pada tahun 2021 sejumlah 1.398 perkara terdiri dari 431 perkara perdata, 895 perkara pidana, 48 perkara tipikor dan 31 perkara pidana anak dimana perkara tersebut diputus tepat waktu.

- **Jumlah Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding, Kasasi Dan PK**

Dari tabel berikut ini dapat dilihat bahwa perkara pada 27 (dua puluh tujuh) Pengadilan Negeri se- Sulawesi Selatan dan Barat jumlah perkara yang putus di tahun 2021 yang tidak mengajukan Banding, Kasasi maupun PK sebagai berikut:

Tabel II. 9. Rekapitulasi Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding, Kasasi
Pada Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Makassar Tahun 2021

No.	PERKARA	PUTUS TAHUN	TIDAK MENGAJUKAN UPAYA HUKUM			KET
		2021	BANDING	KASASI	PK	
1	PN MAKASSAR					
	PIDANA	2016	1795	127	22	
	PERDATA	424	300	27	67	
	TIPIKOR	86	59	54	20	
	NIAGA	15	15	11	15	
	PHI	59	59	31	59	
2	PN SUNGGUMINASA					
	PIDANA	430	406	413	428	
	PERDATA	86	49	49	49	
3	PN MAMUJU					
	PIDANA	277	217	240	277	
	PERDATA	72	67	66	69	
	TIPIKOR	25	7	5	25	
	NIAGA	0	0	0	0	
	PHI	4	4	2	0	
4	PN WATAMPONE					
	PIDANA	296	278	288	296	
	PERDATA	57	36	39	56	
5	PN MAROS					
	PIDANA	190	170	180	190	
	PERDATA	51	21	9	4	
6	PN MAKALE					
	PIDANA	169	160	3	0	
	PERDATA	254	215	242	254	
7	PN PALOPO					
	PIDANA	255	232	6	12	
	PERDATA	36	25	5	7	
8	PN SENGKANG					
	PIDANA	234	201	22	9	
	PERDATA	119	20	1	18	
9	PN BULUKUMBA					
	PIDANA	241	205	221	241	
	PERDATA	31	22	23	31	
10	PN PANGKAJENE					
	PIDANA	129	97	100	129	
	PERDATA	22	11	20	20	
11	PN BARRU					
	PIDANA	103	92	97	103	
	PERDATA	17	14	14	17	
12	PN PAREPARE					
	PIDANA	250	208	219	244	
	PERDATA	26	24	1	26	
13	PN SIDENRENG RAPPANG					
	PIDANA	259	211	223	0	
	PERDATA	61	47	49	55	
14	PN PINRANG					
	PIDANA	315	228	28	315	

	PERDATA	27	10	6	26	
15	PN TAKALAR					
	PIDANA	196	164	185	198	
	PERDATA	95	37	47	52	
16	PN JENEPONTO					
	PIDANA	136	108	125	0	
	PERDATA	34	22	29	0	
17	PN BANTAENG					
	PIDANA	148	135	128	128	
	PERDATA	27	22	17	16	
18	PN SINJAI					
	PIDANA	102	75	82	0	
	PERDATA	23	18	0	0	
19	PN WATANSOPPENG					
	PIDANA	146	113	144	142	
	PERDATA	11	10	0	0	
20	PN SELAYAR					
	PIDANA	341	319	333	341	
	PERDATA	116	110	110	114	
21	PN MALILI					
	PIDANA	140	147	144	155	
	PERDATA	61	55	56	60	
22	PN MASAMBA					
	PIDANA	130	129	129	129	
	PERDATA	35	37	41	42	
23	PN ENREKANG					
	PIDANA	71	68	67	70	
	PERDATA	16	8	10	16	
24	PN POLEWALI					
	PIDANA	3177	3140	3159	3177	
	PERDATA	137	123	139	136	
25	PN MAJENE					
	PIDANA	79	68	81	89	
	PERDATA	16	14	14	16	
26	PN PASANGKAYU					
	PIDANA	199	153	23	22	
	PERDATA	25	9	9	9	
27	PN BELOPA					
	PIDANA	131	118	126	131	
	PERDATA	96	94	94	96	

- **Jumlah Perdata Yang Berhasil Di Mediasi**

Jumlah perkara perdata selama tahun 2021 yang berhasil dimediasi oleh Pengadilan Negeri Se- Sulawesi Selatan dan Barat dengan rincian sebagaimana terlampir.

Tabel II.10. Jumlah Perkara yang Berhasil Dimediasi

No.	SATUAN KERJA	MEDIASI		KET
		BERHASIL	GAGAL	
1	PN MAKASSAR	12	255	
2	PN SUNGGUMINASA	1	76	
3	PN MAMUJU	0	17	
4	PN WATAMPONE	3	43	
5	PN MAROS	3	41	
6	PN MAKALE	3	59	
7	PN PALOPO	2	5	
8	PN SENGKANG	1	33	
9	PN BULUKUMBA	2	33	
10	PN PANGKAJENE	0	32	
11	PN BARRU	1	10	
12	PN PAREPARE	1	16	
13	PN SIDENRENG RAPPANG	2	25	
14	PN PINRANG	0	25	
15	PN TAKALAR	1	49	
16	PN JENEPONTO	0	25	
17	PN BANTAENG	0	9	
18	PN SINJAI	2	0	
19	PN WATANSOPPENG	0	11	
20	PN SELAYAR	0	9	
21	PN MALILI	3	17	
22	PN MASAMBA	0	6	
23	PN ENREKANG	1	15	1 perkara belum mediasi
24	PN POLEWALI	1	75	
25	PN MAJENE	0	12	1 Perkara proses mediasi
26	PN PASANGKAYU	0	10	
27	PN BELOPA	2	12	

- **Jumlah Perkara Anak Yang Berhasil Melalui Diversi**

Jumlah perkara anak selama tahun 2021 yang berhasil melalui Diversi di Pengadilan Negeri Se- Sulawesi Selatan dan Barat dengan rincian sebagai berikut:

Tabel II.11. Jumlah Perkara Anak yang Berhasil Melalui Diversi

No.	SATUAN KERJA	DIVERSI		KET
		BERHASIL	GAGAL	
1	PN MAKASSAR	4	66	
2	PN SUNGGUMINASA	12	5	
3	PN MAMUJU	0	8	
4	PN WATAMPONE	1	9	
5	PN MAROS	3	1	
6	PN MAKALE	0	0	
7	PN PALOPO	0	3	
8	PN SENGKANG	2	3	
9	PN BULUKUMBA	9	4	
10	PN PANGKAJENE	0	1	
11	PN BARRU	0	0	
12	PN PAREPARE	0	1	
13	PN SIDENRENG RAPPANG	1	1	
14	PN PINRANG	2	1	
15	PN TAKALAR	9	7	
16	PN JENEPONTO	0	3	
17	PN BANTAENG	1	0	
18	PN SINJAI	0	0	
19	PN WATANSOPPENG	1	0	
20	PN SELAYAR	0	2	
21	PN MALILI	5	2	
22	PN MASAMBA	0	1	
23	PN ENREKANG	0	1	
24	PN POLEWALI	0	3	
25	PN MAJENE	5	0	
26	PN PASANGKAYU	1	9	
27	PN BELOPA	3	1	

- **Jumlah Perkara Ecourt**

Jumlah perkara ecourt selama tahun 2021 di Pengadilan Negeri Se- Sulawesi Selatan dan Barat dengan rincian sebagai berikut:

Tabel II.12. Jumlah Perkara e-court Tahun 2021

NO	SATUAN KERJA	DAFTAR ONLINE	BAYAR	SKUM	GUGATAN	PERMOHONAN	BANTAHAN	GUGATAN SEDERHANA
1	PN MAKASSAR	720	720	720	402	226	23	48
2	PN SUNGGUMINASA	269	269	269	89	174	-	6
3	PN MAMUJU	82	82	82	30	40	4	8
4	PN WATAMPONE	83	83	83	46	26	0	11
5	PN MAROS	150	150	150	57	89	2	2
6	PN MAKALE	330	330	330	253	72	1	4
7	PN PALOPO	60	60	60	29	26	2	3
8	PN SENGKANG	118	118	118	48	58	3	9
9	PN BULUKUMBA	154	154	154	33	116	0	5
10	PN PANGKAJENE	46	46	46	22	19	0	5
11	PN BARRU	34	34	34	19	0	2	12
12	PN PAREPARE	114	114	114	35	78	0	1

13	PN SIDENRENG RAPPANG	66	66	66	40	22	4	0
14	PN PINRANG	52	52	52	23	15	5	9
15	PN TAKALAR	45	45	45	38	5	0	2
16	PN JENEPONTO	35	35	35	28	4	1	2
17	PN BANTAENG	18	9	9	9	16	1	2
18	PN SINJAI	19	19	19	19	79	1	0
19	PN WATANSOPPENG	34	34	34	11	21	0	2
20	PN SELAYAR	100	100	100	10	88	0	2
21	PN MALILI	85	85	85	58	23	0	2
22	PN MASAMBA	45	45	0	33	11	0	1
23	PN ENREKANG	43	43	43	17	25	0	1
24	PN POLEWALI	154	154	154	75	69	1	9
25	PN MAJENE	30	30	30	12	18	0	0
26	PN PASANGKAYU	25	25	25	11	15	0	0
27	PN BELOPA	81	81	81	26	54	1	0

- Data Perkara e-court dan e-litigasi

Data perkara ecourt dan e-litigasi selama tahun 2021 di Pengadilan Negeri Se- Sulawesi Selatan dan Barat dengan rincian sebagai berikut:

Tabel II.13. Data Perkara e-court dan e-litigasi Tahun 2021

NO	SATUAN KERJA	e-Litigasi	Banding ecourt
1	PN Makassar	119	19
2	PN Sungguminasa	35	0
3	PN Takalar	10	1
4	PN Jeneponto	8	0
5	PN Bantaeng	2	2
6	PN Maros	61	3
7	PN Pangkajene	6	4
8	PN Barru	0	0
9	PN Parepare	13	2
10	PN Sidrap	45	11
11	PN Pinrang	9	3
12	PN Enrekang	7	1
13	PN Watansoppeng	11	0
14	PN Bulukumba	33	4
15	PN Selayar	3	1
16	PN Sinjai	8	1
17	PN Watampone	22	9
18	PN Sengkang	19	0
19	PN Palopo	31	2
20	PN Makale	2	2
21	PN Malili	10	1
22	PN Masamba	3	0
23	PN Belopa	2	0
24	PN Mamuju	9	2
25	PN Polewali	19	0
26	PN Majene	5	0
27	PN Pasangkayu	0	0

C. Akreditasi Penjaminan Mutu (Sertifikasi ISO Pengadilan)

- POSBAKUM

Layanan POSBAKUM yang diberikan tetap berpegang teguh kepada Peraturan Mahkamah Agung RI No. 1 tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum bagi Masyarakat yang tidak mampu di Pengadilan serta Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum nomor : 52/DJU/SK/HK.006/5/ Tahun 2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2014.

Dengan memanfaatkan fasilitas posbakum, masyarakat kurang mampu dapat melakukan konsultasi hukum, menerima advis hukum ataupun memperoleh bantuan mendapatkan draft hukum serta memperoleh informasi mengenai Organisasi Bantuan Hukum yang dapat memberikan layanan hukum secara gratis, datang ke Posbakum Pengadilan Negeri Setempat. Semoga layanan posbakum ini dapat bermanfaat bagi seluruh masyarakat pencari keadilan, terutama bagi masyarakat kurang mampu.

1. Masyarakat dapat menggunakan layanan bantuan hukum yang tersedia pada setiap kantor pengadilan.
2. Pengadilan menyediakan Pos Bantuan Hukum (Posbakum) yang mudah diakses oleh pihak-pihak yang tidak mampu.
3. Pengadilan menyediakan Advokat Piket (bekerjasama dengan lembaga penyedia bantuan hukum) yang bertugas pada Posbakum dan memberikan layanan hukum sebagai berikut:
 - bantuan pengisian formulir permohonan bantuan hukum;
 - bantuan pembuatan dokumen hukum;
 - advis, konsultasi hukum dan bantuan hukum lainnya baik dalam perkara pidana maupun perkara perdata;
 - rujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri untuk pembebasan pembayaran biaya perkara sesuai syarat yang berlaku;
 - rujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri untuk mendapat bantuan jasa advokat sesuai syarat yang berlaku.
4. Pengadilan memberikan layanan pembebasan biaya perkara (prodeo) kepada pihak-pihak tidak mampu dengan mengajukan permohonan kepada Ketua Pengadilan atau kepada Ketua Majelis Hakim.
5. Penggugat berhak mendapatkan semua jenis pelayanan secara cuma-cuma yang berkaitan dengan pemeriksaan perkara prodeo. Komponen biaya prodeo meliputi antara lain: biaya pemanggilan, biaya pemberitahuan isi putusan, biaya saksi/saksi ahli, biaya materai, biaya alat tulis kantor, biaya penggandaan/fotokopi, biaya pemberkasan dan biaya pengiriman berkas.

Adapun Satuan Kerja di Wilayah Pengadilan Tinggi Makassar untuk Tahun 2021 yang mendapat alokasi dan Realisasi Anggaran Posbakum adalah sebagai berikut:

Tabel II.14. Realisasi Anggaran POSBAKUM

NO	NAMA SATKER	PAGU ANGGARAN		PERSEN REALISASI
		PAGU	REALISASI	
		(Rp)	(Rp)	
1	PT MAKASSAR	-	-	0
2	PN MAKASSAR	72,000,000	71,992,800	99.99%
3	PN SUNGGUMINASA	31,200,000	31,200,000	100%
4	PN TAKALAR	31,200,000	31,200,000	100 %
5	PN JENEPONTO	31,200,000	31,200,000	100%
6	PN BANTAENG	31,200,000	31,200,000	100%
7	PN MAROS	24,000,000	24,000,000	100%
8	PN PANGKAJENE	24,000,000	24,000,000	100%
9	PN BARRU	31,200,000	31,200,000	100%
10	PN PAREPARE	31,200,000	31,200,000	100%
11	PN SIDRAP	24,000,000	24,000,000	100%
12	PN PINRANG	31,200,000	31,200,000	100%
13	PN POLEWALI	23,100,000	23,100,000	100%
14	PN ENREKANG	31,200,000	31,200,000	100%
15	PN MAMUJU	31,200,000	31,200,000	100%
16	PN MAJENE	31,200,000	31,200,000	100%
17	PN WATANSOPPENG	31,200,000	31,200,000	100%
18	PN PASANGKAYU	31,200,000	31,200,000	100%
19	PN BULUKUMBA	31,200,000	31,200,000	100%
20	PN SELAYAR	31,200,000	31,200,000	100%
21	PN SINJAI	31,200,000	31,200,000	100%
22	PN WATAMPONE	31,200,000	31,200,000	100%

23	PN SENGKANG	31,200,000	31,200,000	100%
24	PN PALOPO	31,200,000	31,200,000	100%
25	PN MAKALE	31,200,000	31,200,000	100%
26	PN MALILI	28,800,000	28,800,000	100%
27	PN MASAMBA	31,200,000	31,200,000	100%
28	PN BELOPA	24,000,000	24,000,000	100%
	Total	789,600,000	789,592,800	99.99%

- **Sidang Keliling/Pelayanan Terpadu**

Sidang Keliling (circuit court) merupakan persidangan (layanan sidang) di luar gedung pengadilan untuk mempermudah setiap warga negara yang tidak mampu atau sulit menjangkau lokasi kantor Pengadilan karena hambatan biaya atau hambatan fisik atau hambatan geografis.

Sidang Keliling merupakan salah satu bentuk dari Pemberian Layanan Hukum bagi Masyarakat Tidak Mampu atau sulit menjangkau Pengadilan karena hambatan tertentu. Sidang Keliling juga merupakan salah satu program unggulan dari Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum dan peradilan yang berada di bawahnya. Sidang Keliling merepresentasikan access to justice for all.

Prosedur Sidang Keliling mengacu pada Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan. Prosedur dimaksud diatur dalam Pasal 14 - Pasal 21.

1. Prosedur Layanan Sidang Keliling

- a. Pengadilan dapat menyelenggarakan sidang keliling (sidang di luar gedung Pengadilan) berdasarkan pada karakteristik jumlah perkara dan keterjangkauan wilayah;
- b. Lokasi penyelenggaraan sidang keliling dapat ditetapkan melalui koordinasi antara Pengadilan Negeri dengan Pemerintah Daerah atau instansi lain;
- c. Pengadilan Negeri, Pengadilan Agama, dan Pengadilan Tata Usaha Negara dapat menyelenggarakan sidang keliling secara bersama-sama sesuai dengan kebutuhan;
- d. Dalam menyelenggarakan sidang keliling secara terpadu, Pengadilan Negeri berkoordinasi dengan Instansi lain (Pemerintah Daerah/Kementerian/ Lembaga Lain) yang berwenang untuk keperluan penerbitan dokumen-dokumen sebagai akibat dari putusan pengadilan pada sidang keliling tersebut;

- e. Sidang keliling dapat dilaksanakan secara terpadu dengan layanan Posbakum Pengadilan dan Posbakum Pengadilan melakukan pendataan kebutuhan dan koordinasi penyelenggaraan sidang keliling dimaksud
2. Ruang Lingkup Sidang Keliling
- Pengadilan Negeri dapat menyelenggarakan sidang keliling khususnya untuk perkara-perkara yang pembuktiannya mudah atau bersifat sederhana.
3. Pengamanan Sidang Keliling
- a. Penyelenggaraan sidang keliling di daerah yang memiliki risiko keamanan tinggi dapat didampingi oleh unit pengamanan (Polri, TNI. atau unit pengamanan lainnya);
 - b. Unit pengamanan dapat diselenggarakan dengan melakukan kerja sama dengan instansi lain atau unit keamanan setempat.
4. Lokasi sidang keliling
- a. Sidang keliling dapat dilaksanakan dalam bentuk sidang di tempat sidang tetap atau sidang keliling pada kantor pemerintah setempat;
 - b. Dalam hal tersedia fasilitas tempat sidang tetap atau tempat sidang keliling permanen yang dimiliki Pengadilan Negeri, sidang keliling juga dapat diselenggarakan di fasilitas tersebut;
 - c. Ruangan dan lokasi sidang keliling harus memperhatikan akses untuk penyandang disabilitas, perempuan, anak-anak, dan lanjut usia.
5. Petugas sidang keliling
- Petugas sidang keliling terdiri dari:
- Hakim; dan
 - Panitera Pengganti
- Pelaksanaan sidang keliling juga dapat diikuti oleh Hakim Mediator / Mediator Independen, Jurusita, Satuan Pengamanan, Pejabat, Staf Pengadilan, dan Unsur Pos Bantuan Hukum (Posbakum) sesuai kebutuhan.
6. Pembiayaan dan Penganggaran sidang keliling
- a. Biaya penyelenggaraan sidang keliling dibebankan kepada Anggaran Satuan Pengadilan atau DIPA Pengadilan Negeri dan terdiri dari:
 - Biaya tempat persidangan (jika diperlukan);
 - Biaya perlengkapan sidang (jika diperlukan);
 - Biaya perjalanan dinas Hakim, Panitera, Jurusita, dan petugas lainnya.
 - b. Dalam hal sidang keliling mengikutsertakan petugas Posbakum Pengadilan Negeri, maka biaya perjalanan dinas mencakup juga untuk petugas Posbakum Pengadilan.

- c. Dalam hal ada petugas atau pihak lain selain petugas Posbakum Pengadilan yang ingin ikut dalam sidang keliling memberikan penyuluhan hukum, maka biaya perjalanan ditanggung sendiri oleh orang atau pihak lain tersebut
7. Mekanisme penggunaan anggaran sidang keliling
- Untuk kepentingan perencanaan, setiap Pengadilan Negeri menentukan anggaran sidang keliling berdasarkan perkiraan satuan biaya dan jumlah perkara dalam sidang keliling;
 - Untuk kepentingan pelaksanaan, setiap Pengadilan Negeri dapat menggunakan anggaran sidang keliling berdasarkan biaya aktual selama tidak kurang dari target jumlah sidang keliling dan tidak melewati jumlah keseluruhan dari anggaran sidang keliling yang tersedia pada Anggaran Satuan Pengadilan atau DIPA Pengadilan Negeri;
 - Bendahara Pengeluaran menyimpan seluruh bukti-bukti pengeluaran sebagai pertanggungjawaban keuangan dan mencatat setiap pengeluaran dalam buku yang disediakan untuk itu.

Untuk wilayah pengadilan Tinggi Makassar Satuan Kerja yang mendapatkan anggaran untuk biaya Sidang Keliling/Pelayanan terpadu ada 3 (tiga) Pengadilan Negeri yaitu :

Tabel II.15. Alokasi dan Realisasi Anggaran Sidang Keliling Tahun 2021

NO	NAMA SATKER	PAGU ANGGARAN		PERSEN REALISASI
		PAGU	REALISASI	
		(Rp)	(Rp)	
1	PN POLEWALI	16,500,000	16,500,000	100%
2	PN SELAYAR	95,000,000	95,000,000	100%
3	PN SINJAI	15,000,000	15,000,000	100%

- **Perkara Prodeo (Pembebasan Biaya Perkara)**

Pelayanan Pembebasan Biaya Perkara Perdata (Prodeo)

- Pengadilan Negeri setempat memberikan pelayanan permohonan pembebasan biaya perkara (*prodeo*) kepada pihak-pihak yang tidak mampu secara ekonomi yang dibuktikan dengan :
 - ☐ Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) yang dikeluarkan oleh Kepala Desa/Lurah/Kepala wilayah setempat yang menyatakan bahwa benar yang bersangkutan tidak mampu membayar biaya perkara; **atau**

- ☐ Surat Keterangan Tunjangan Sosial lainnya seperti Kartu Keluarga Miskin (KKM), Kartu Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas), Kartu Beras Miskin (Raskin), Kartu Program Keluarga Harapan (PKH), Kartu Bantuan Langsung Tunai (BLT), Kartu Perlindungan Sosial (KPS) atau dokumen lainnya yang berkaitan dengan daftar penduduk miskin dalam basis data terpadu pemerintah atau yang dikeluarkan oleh instansi lain yang berwenang untuk memberikan keterangan tidak mampu; **atau**
 - ☐ Surat Pernyataan tidak mampu yang dibuat dan ditandatangani Pemohon dan diketahui oleh Ketua Pengadilan Negeri setempat.
- b. Prosedur permohonan pembebasan biaya perkara :
- ☐ Permohonan diajukan secara tertulis oleh Penggugat/Pemohon kepada Ketua Pengadilan Negeri melalui Panitera dengan melampirkan dokumen pendukung yang diperlukan sebelum perkaranya didaftar dan diregister di Kepaniteraan Muda Perdata.
 - ☐ Untuk permohonan pembebasan biaya perkara perdata yang diajukan oleh Tergugat/Termohon dapat diajukan sebelum yang bersangkutan mengajukan jawaban atas gugatan Penggugat/Pemohon.
 - ☐ Jika berkas permohonan pembebasan biaya perkara dianggap telah lengkap dan memenuhi persyaratan, Ketua Pengadilan Negeri setelah memperhatikan pertimbangan Panitera, segera menerbitkan Penetapan Layanan Pembebasan Biaya Perkara pada tanggal yang sama dengan diajukan surat permohonannya.
 - ☐ Dalam hal permohonan pembebasan biaya perkara yang diajukan Penggugat/Pemohon ditolak, maka Ketua Pengadilan Negeri menerbitkan Penetapan penolakannya sehingga proses perkara baru dapat dilaksanakan setelah Penggugat/Pemohon membayar panjar biaya perkara;
 - ☐ Penetapan Layanan Pembebasan Biaya Perkara yang telah diterbitkan Ketua Pengadilan Negeri tersebut berlaku pula untuk perkara yang sama apabila Pemohon mengajukan upaya hukum banding, kasasi dan Peninjauan Kembali.
 - ☐ Apabila permohonan pembebasan biaya perkara tersebut baru diajukan untuk pertama kalinya oleh Pemohon pada tingkat banding, kasasi atau Peninjauan Kembali, maka :
 1. Permohonan pembebasan biaya perkara pada tingkat banding harus diajukan oleh Pemohon kepada Ketua Pengadilan Negeri setempat melalui Panitera dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari setelah putusan pengadilan tingkat pertama diucapkan atau diberitahukan kepadanya;

2. Permohonan pembebasan biaya perkara pada tingkat kasasi harus diajukan oleh Pemohon kepada Ketua Pengadilan Negeri setempat melalui Panitera dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari setelah putusan pengadilan tingkat banding diberitahukan kepadanya;
3. Permohonan pembebasan biaya perkara pada tingkat Peninjauan Kembali harus diajukan oleh Pemohon kepada Ketua Pengadilan Negeri setempat melalui Panitera dalam tenggang waktu sebagaimana yang ditentukan undang-undang terkait pengajuan Peninjauan Kembali.

Untuk wilayah pengadilan Tinggi Makassar Satuan Kerja yang mendapatkan anggaran untuk Prodeo ada 2 (dua) Pengadilan Negeri yaitu:

Tabel II.16. Alokasi dan Realisasi Anggaran Prodeo Tahun 2021

NO	NAMA SATKER	PAGU ANGGARAN		PERSEN REALISASI
		PAGU	REALISASI	
		(Rp)	(Rp)	
1	PN MAKASSAR	3,150,000	2,420,000	76.83%
2	PN WATANSOPPENG	1,580,000	980,000	62.02%

BAB III

SUMBER DAYA MANUSIA

Pengadilan Tinggi Makassar, sebagai lembaga Pengadilan Tingkat Banding, berdasarkan Peraturan Perundangan yang ada, diberi beban untuk melakukan pembinaan dan pengelolaan Sumber Daya Manusia bagi aparat Peradilan Umum yang ada di Sulawesi Selatan dan Barat, baik yang menyangkut tenaga Teknis Yudisial maupun tenaga Non Teknis Yudisial.

Secara keseluruhan, jumlah personil yang menjadi binaan dan pengawasan Pengadilan Tinggi Sulawesi Selatan dan Barat adalah berjumlah **1286** (seribu dua ratus delapan puluh enam) orang, dengan rincian sebagaimana tersebut pada TABEL III.1 dan TABEL III.2 dan rekapitulasinya adalah sebagai berikut :

Tabel III.1. Rekap Personil Wilayah Pengadilan Tinggi Makassar Tahun 2021

NO.	URAIAN JABATAN	JUMLAH		KETERANGAN
		TERISI	KOSONG	
1	Pimpinan Pengadilan (Ka / Wk)	40	18	
2	Hakim Tinggi / Hakim / Cakim	244	10	
3	Struktural Kepaniteraan	104	17	
4	Panitera Pengganti	195	30	
5	Kejurusitaan (JS / JSP)	97	53	
6	Struktural Sekretariat	103	20	
7	Fungsional tertentu	13	41	
8	Staf	148	97	
9	Tenaga Honorer	342	-	
JUMLAH		1.286	286	

Dari Tabel III.1 tersebut , maka dapatlah diketahui perbandingan jumlah tenaga Hakim dengan jumlah tenaga Fungsional Kepaniteraan dan Kejurusitaan, sebagaimana tersebut pada Tabel 3. Dan dari Tabel 3 ini, maka dengan berpedoman kepada Peraturan yang ada (Nomor : 140/KMA/SK/VIII/2013), yang

menyebutkan bahwa Rasio Formasi perbandingan antara Majelis Hakim (artinya 3 orang Hakim) dengan Panitera Pengganti (Pejabat Fungsional Kepaniteraan) yaitu :

- 
1. Untuk Pengadilan Tingkat Banding Type A dan Pengadilan Negeri Kelas IB = $10 : 6 = 5 : 3$ (artinya 1 Majelis Hakim / 3 org Hakim, dibantu oleh 5 orang Panitera Pengganti).
 2. Untuk Pengadilan Negeri Kelas IA Khusus = $14 : 6 = 7 : 3$ (artinya 1 Majelis Hakim / 3 org Hakim, dibantu oleh 7 orang Panitera Pengganti).
 3. Untuk Pengadilan Negeri Kelas IA = $12 : 6 = 6 : 3$ (artinya 1 Majelis Hakim / 3 org Hakim, dibantu oleh 6 orang Panitera Pengganti).
 4. Untuk Pengadilan Negeri Kelas II = $9 : 6 = 5 : 3$ (artinya 1 Majelis Hakim / 3 org Hakim, dibantu oleh 5 orang Panitera Pengganti).

Dari sini akan terlihat Pengadilan-Pengadilan yang jumlah perbandingannya tidak sesuai, dalam artian : bisa Pejabat Fungsional Kepaniteraan terlalu banyak atau terlalu sedikit dari posisi sesuai. Jika pejabat Fungsional Kepaniteraan ini terlalu banyak, maka akibatnya, banyak Panitera Pengganti yang menganggur, sebaliknya apabila terlalu sedikit dari posisi sesuai, maka banyak Panitera Pengganti yang menanggung beban kerja yang terlalu berat, apalagi bila jumlah perkaranya relatif banyak. Untuk jumlah personil dilihat dalam tabel jumlah personil.

Tabel III.2. Jumlah Personil Pengadilan Dalam Lingkungan Peradilan Umum Se Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Makassar Di Sulawesi Selatan dan Barat Per : Bulan Desember 2021

NO	PENGADILAN	TYPE PT/ KELAS PN	PIMPINAN		HAKIM				STRUKTURAL KEPANITERAAN			PP	KEJURUSITAAN		STRUKTURAL SEKRETARIAT			FUNGSIONAL TERTENTU	STAF	JUMLAH	Honor Dipa
			KETUA PT/ PN	WAKA PT/ PN	HAKIM TINGGI	HAKIM YUSTISI	HAKIM	CAKIM	PANITERA	WAPAN	PANMUD		PANITERA PENGANGGANTI	JURUSITA	JURUSITA PENGANGGANTI	SEKRETARIS	KEPALA BAGIAN	KEPALA SUB BAGIAN			
1	PT MAKASSAR	Tipe A	1	0	32	3	0	0	1	0	4	37	0	0	1	1	4	3	18	105	15
2	PN MAKASSAR	Kelas I A Khusus	1	1	0	0	34	0	1	0	4	45	6	12	1	1	3	2	14	125	19
3	PN SUNGGUMINASA	Kelas I A	1	1	0	0	11	0	1	0	3	20	4	7	1	0	3	0	10	62	11
4	PN MAMUJU	Kelas I A	1	1	0	0	10	0	1	0	5	4	2	0	1	0	3	0	4	32	12
5	PN WATAMPONE	Kelas I A	1	0	0	0	10	0	1	0	3	8	2	4	1	0	3	4	0	41	10
6	PN MAROS	Kelas I B	1	1	0	0	9	0	1	0	3	8	3	2	1	0	3	0	11	43	11
7	PN MAKALE	Kelas I B	1	1	0	0	4	0	1	0	3	7	3	3	1	0	3	2	4	33	7
8	PN PALOPO	Kelas I B	1	1	0	0	5	0	1	0	3	3	2	1	1	0	2	0	6	11	37
9	PN SENGKANG	Kelas I B	1	1	0	0	6	0	1	0	3	6	1	3	1	0	3	0	6	32	14
10	PN BULUKUMBA	Kelas I B	1	0	0	0	5	0	1	0	3	5	2	1	1	0	3	0	7	29	10
11	PN PANGKAJENE	Kelas II	1	1	0		9	0	1	0	3	6	1	1	1	0	3	0	2	29	14
12	PN BARRU	Kelas II	1	0	0	0	6	0	1	0	3	2	1	0	1	0	3	0	3	21	10
13	PN PAREPARE	Kelas II	1	1	0	0	10	0	1	0	3	3	2	2	1	0	3	0	6	33	15
14	PN SIDENRENG RAPPANG	Kelas II	1	0	0	0	7	0	1	0	3	4	0	2	1	0	3	0	3	25	11
15	PN PINRANG	Kelas II	1	1	0	0	7	0	1	0	2	4	1	1	1	0	2	0	6	27	13
16	PN TAKALAR	Kelas II	1	1	0	0	7	0	1	0	2	5	2	2	1	0	3	0	3	28	11
17	PN JENEPONTO	Kelas II	0	1	0	0	7	0	1	0	1	5	3	1	1	0	1	0	5	26	11
18	PN BANTAENG	Kelas II	1	0	0	0	8	0	1	0	3	2	2	0	1	0	2	0	5	25	10
19	PN SINJAI	Kelas II	1	0	0	0	7	0	1	0	3	4	2	0	1	0	3	0	6	28	11
20	PN WATANSOPPENG	Kelas II	0	1	0	0	4	0	1	0	3	2	0	2	1	0	3	0	3	20	14
21	PN SELAYAR	Kelas II	1	0	0	0	7	0	1	0	0	3	1	1	1	0	2	0	6	23	10
22	PN MALILI	Kelas II	1	0	0	0	4	0	1	0	1	2	1	0	1	0	0	1	2	14	9
23	PN MASAMBA	Kelas II	0	1	0	0	5	0	1	0	2	0	1	1	1	0	1	1	2	16	7
24	PN ENREKANG	Kelas II	0	1	0	0	6	0	1	0	3	2	2	1	1	0	3	0	3	22	14
25	PN POLEWALI	Kelas II	1	0	0	0	5	0	1	0	2	3	1	2	1	0	3	0	2	21	11
26	PN MAJENE	Kelas II	1	0	0	0	5	0	1	0	3	1	1	1	1	0	3	0	2	19	10
27	PN PASANGKAYU	Kelas II	0	1	0	0	7	0	1	0	2	2	0	0	1	0	2	0	3	19	10
28	PN BELOPA	Kelas II	1	1	-	-	4	-	1	-	3	2	1	-	1	-	3	-	6	23	8

Tabel III.3.

Jumlah Jabatan Yang Kosong Pada Pengadilan Dalam Lingkungan Peradilan Umum
Se Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Makassar Di Sulawesi Selatan dan Barat
Per : Bulan Desember 2021

NO	SATUAN KERJA	TYPE PT/ KELAS PN	PIMPINAN		HAKIM				STRUKTURAL KEPANITERAAN			PP	KEJURUSITAAN		STRUKTURAL SEKRETARIAT			FUNGSIONAL TERTENTU	STAF	JUMLAH
			KETUA PT/ PN	WAKA PT/PN	HAKIM TINGGI	HAKIM MUSTISI	HAKIM	CAKIM	PANITERA	WAPAN	PANMUD	PANITERA PENGANTI	JURUSITA	JURUSITA PENGANTI	SEKRETARIS	KEPALA BAGIAN	KEPALA SUB BAGIAN			
1	PT MAKASSAR	Tipe A	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	5	7
2	PN MAKASSAR	Kelas I A Khusus	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	2
3	PN SUNGGUMINASA	Kelas I A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	13	0	0	0	3	6	24
4	PN MAMUJU	Kelas I A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	6
5	PN WATAMPONE	Kelas I A	0	1	0	0	0	0	0	0	0	2	2	0	0	0	0	0	6	11
6	PN MAROS	Kelas I B	0	0	-	-	0	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	PN MAKALE	Kelas I B	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	0	0	0	0	0	3
8	PN PALOPO	Kelas I B	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1
9	PN SENGKANG	Kelas I B	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	PN BULUKUMBA	Kelas I B	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	PN PANGKAJENE	Kelas II	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	3
12	PN BARRU	Kelas II	0	1	0	0	0	0	0	0	0	4	2	0	0	0	0	0	12	19
13	PN PAREPARE	Kelas II	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	PN SIDENRENG RAPPANG	Kelas II	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	7
15	PN PINRANG	Kelas II	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	2	1	-	3	-	0	2
16	PN TAKALAR	Kelas II	1	1	0	0	7	0	1	0	2	5	2	2	1	0	3	0	3	28
17	PN JENEPONTO	Kelas II	1	0	-	-	0	0	0	-	2	0	0	0	0	-	2	3	10	18
18	PN BANTAENG	Kelas II	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	4	6
19	PN SINJAI	Kelas II	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	6	9
20	PN WATANSOPPENG	Kelas II	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	2	6	11
21	PN SELAYAR	Kelas II	0	1	0	0	0	0	0	0	3	3	0	0	0	0	1	0	0	8
22	PN MALILI	Kelas II	0	1	0	0	0	0	0	0	2	0	0	1	0	0	3	0	4	11
23	PN MASAMBA	Kelas II	1	0	0	0	0	0	0	0	2	4	2	2	0	0	2	2	4	19
24	PN ENREKANG	Kelas II	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
25	PN POLEWALI	Kelas II	0	1	0	0	3	0	0	0	1	3	3	3	0	0	0	0	6	20
26	PN MAJENE	Kelas II	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
27	PN PASANGKAYU	Kelas II	1								1	6	3	3			1	28		43
28	PN BELOPA	Kelas II	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	4	0	0	0	3	18	28

Dari Tabel III.4, juga dapat diketahui berapa beban perkara rata-rata yang harus ditangani oleh Majelis Hakim (asumsinya, 3 org Hakim = 1 majelis Hakim) di tiap-tiap Pengadilan.

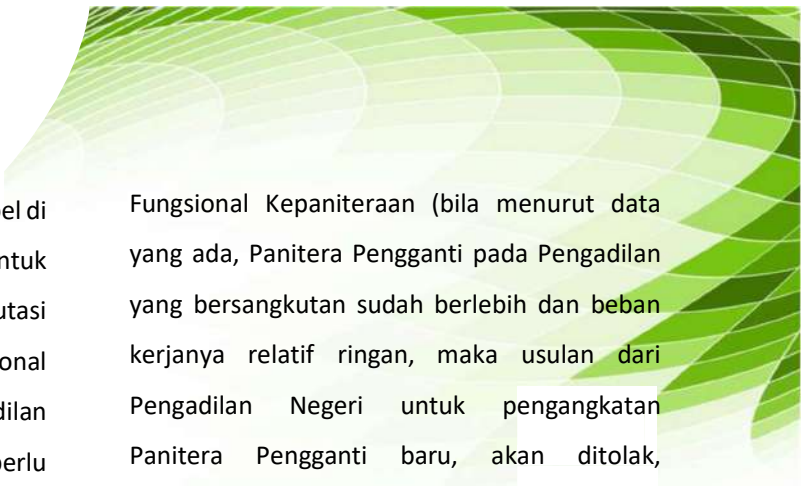
Tabel III.4.
Perbandingan Majelis Hakim Dan Fungsional Kepaniteraan
Serta Beban Kerja / Perkara Yang Harus Ditangani

NO	SATUAN KERJA	JUMLAH		PERBANDINGAN	SESUAI ATURAN	JUMLAH PERKARA TH. 2021				JUMLAH	BEBAN
		HAKIM	KEPANITERAAN		(Belum/Sesuai)	PIDANA	PERDATA	LAIN-LAIN	JUMLAH	Majelis HaKim	Kerja Tiap bln per Majelis Hakim
1	PT MAKASSAR	32	42	1 : 2	Belum	906	383	53	1342	11	122
2	PN MAKASSAR	34	68	1 : 2	Belum	2540	974	147	3661	5	732
3	PN SUNGGUMINASA	13	24	1:2	Belum	5458	278	0	5736	5	1147
4	PN MAMUJU	12	12	1:1	Belum	306	82	0	388	4	38
5	PN WATAMPONE	11	18	1 : 2	Belum	1073	83	0	1156	4	24
6	PN MAROS	11	17	1 : 2	Belum	1737	152	0	1889	4	472
7	PN MAKALE	6	14	1:2	Belum	1738	349	0	2087	3	58
8	PN PALOPO	7	9	1 : 2	Belum	424	70	0	494	4	11
9	PN SENGGANG	8	11	1 : 2	Belum	3,095	118	0	3,213	4	803
10	PN BULUKUMBA	6	8	1 : 2	Belum	1429	167	0	1596	3	532
11	PN PANGKAJENE	11	10	1 : 2	Belum	130	31	290	451	4	68
12	PN BARRU	7	6	1:1	Belum	109	91	0	200	3	67
13	PN PAREPARE	12	7	2:1	Belum	237	35	0	272	6	4
14	PN SIDENRENG RAPPANG	7	9	1 : 2	Belum	283	66	0	349	4	87
15	PN PINRANG	9	9	1:1	Belum	304	71	0	375	4	94
16	PN TAKALAR	9	12	1:3	Belum	202	96	0	298	4	99
17	PN JENEPONTO	8	7	1:2	Belum	1637	40	0	1677	3	559
18	PN BANTAENG	9	8	2:1	Belum	1468	27	1	1496	3	499
19	PN SINJAI	8	10	1:2	Belum	95	22	0	117	4	30

20	PN WATANSOPPENG	5	5	1:1	Belum	133	63	0	196	2	98
21	PN SELAYAR	8	7	1:1	Belum	341	120	0	461	2	231
22	PN MALILI	5	5	1:1	Belum	155	92	0	247	1	21
23	PN MASAMBA	6	3	2:1	Belum	776	67	0	843	2	422
24	PN ENREKANG	7	9	2:3	Belum	70	43	0	113	2	57
25	PN POLEWALI	6	9	2 : 3	Belum	328	154	0	482	2	241
26	PN MAJENE	6	7	1 : 2	Belum	72	31	10	113	3	37
27	PN PASANGKAYU	8	5	2:1	Belum	210	26	0	236	4	59
28	PN BELOPA	6	5	1:1	Belum	116	89	0	205	4	51

Tabel III.5.
Beban Kerja Berdasarkan Perkara Pidana + Perdata Dalam Se Bulan Per Tiap Majelis Hakim

NO	SATUAN KERJA	JUMLAH		PERKARA TAHUN 2021			BEBAN KERJA
		HAKIM	MAJELIS	PIDANA	PERDATA	JUMLAH	
1	PT MAKASSAR	32	11	906	383	1289	117
2	PN MAKASSAR	34	5	2540	1121	3661	732
3	PN SUNGGUMINASA	13	5	5458	278	5736	1,147
4	PN MAMUJU	12	4	306	82	388	97
5	PN WATAMPONE	11	4	1073	83	1156	289
6	PN MAROS	11	4	1737	152	1889	157
7	PN MAKALE	6	3	1738	349	2087	58
8	PN PALOPO	7	4	424	70	494	11
9	PN SENGKANG	8	4	3,059	118	3,177	803
10	PN BULUKUMBA	6	8	1429	167	1596	532
11	PN PANGKAJENE	11	4	130	31	161	68
12	PN BARRU	7	3	109	91	200	67
13	PN PAREPARE	12	6	237	35	272	45
14	PN SIDENRENG RAPPANG	7	4	283	66	349	87
15	PN PINRANG	9	4	304	71	375	94
16	PN TAKALAR	9	4	202	96	298	75
17	PN JENEPONTO	8	3	1637	40	1677	559
18	PN BANTAENG	9	3	144	27	171	57
19	PN SINJAI	8	4	95	22	117	39
20	PN WATANSOPPENG	5	2	133	63	196	98
21	PN SELAYAR	8	3	341	120	461	154
22	PN MALILI	5	1	155	92	247	21
23	PN MASAMBA	6	2	776	67	843	35
24	PN ENREKANG	7	2	70	43	113	57
25	PN POLEWALI	6	2	328	154	482	241
26	PN MAJENE	6	3	72	31	103	34
27	PN PASANGKAYU	8	4	210	26	236	59
28	PN BELOPA	6	4	116	89	205	51



Tabel-tabel sebagaimana tersebut pada Tabel di atas, dapat digunakan sebagai acuan untuk perencanaan pengangkatan dan atau mutasi jabatan, baik untuk Hakim maupun Fungsional Kepaniteraan. Pada Pengadilan Pengadilan yang beban kerjanya berat, maka perlu ditambah tenaga Hakimnya dan demikian pula dengan pejabat Fungsional Kepaniteraan. Penambahan ini dapat dilakukan dengan jalan memindahkan / mutasi tenaga Teknis dari Pengadilan yang beban kerjanya relatif ringan ke Pengadilan yang beban kerjanya relatif berat. Atau dapat juga dengan jalan, mengangkat tenaga Teknis Yudisial baru (utamanya untuk Fungsional Kepaniteraan) dari tenaga Staf yang ada.

Tabel-tabel tersebut juga dapat dipakai sebagai acuan untuk meneruskan atau menolak usulan-usulan pengangkatan tenaga

Fungsional Kepaniteraan (bila menurut data yang ada, Panitera Pengganti pada Pengadilan yang bersangkutan sudah berlebih dan beban kerjanya relatif ringan, maka usulan dari Pengadilan Negeri untuk pengangkatan Panitera Pengganti baru, akan ditolak, demikian pula sebaliknya, bila berdasarkan data yang ada jumlah Panitera Pengganti masih kurang dan beban perkaranya relatif berat, maka usulan tersebut akan diterima dan diteruskan ke Mahkamah Agung untuk diproses lebih lanjut / dimintakan persetujuan untuk pengangkatannya. Atas pertimbangan ini, maka dilakukan mutasi tenaga Teknis dalam satu tahun (2021) seperti tersebut di bawah ini:

Tabel III.6. Mutasi Selama Tahun 2021

NO	SATUAN KERJA	MUTASI PIMPINAN			MUTASI HAKIM/HAKIM TINGGI			MUTASI KEPANITERAAN				MUTASI KEJURU SITAAN				MUTASI KESEKRETARIATAN			
		MASUK	KELUAR	PENSIUN	MASUK	KELUAR	PENSIUN	MASUK	KELUAR	PENSIUN	BARU DILANTIK	MASUK	KELUAR	PENSIUN	BARU DILANTIK	MASUK	KELUAR	PENSIUN	BARU DILANTIK
1	PT MAKASSAR	1	0	1	17	2	0	6	0	5	6	0	0	0	0	0	1	0	2
2	PN MAKASSAR	1	1	0	11	6	0	6	6	1	1	0	3	0	0	0	0	0	0
3	PN SUNGGUMINASA	2	2	0	4	5	0	6	5	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0
4	PN MAMUJU	2	1	0	1	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	PN WATAMPONE	1	2	0	8	5	0	3	3	0	4	0	0	0	0	0	0	0	0
6	PN MAROS	2	1	0	3	3	0	1	3	1	1	0	0	0	0	1	1	0	1
7	PN MAKALE	2	1	0	4	4	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0
8	PN PALOPO	1	0	0	2	2	0	0	1	1	0	0	0	0	1	4	0	0	0
9	PN SENGKANG	2	2	0	4	2	0	1	3	0	1	0	0	0	0	1	0	1	0
10	PN BULUKUMBA	1	1	0	3	5	0	1	2	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	PN PANGKAJENE	1	1	0	2	1	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	PN BARRU	0	1	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	PN PAREPARE	1	1	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0
14	PN SIDENRENG RAPPANG	0	1	0	0	2	0	2	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0
15	PN PINRANG	2	1	0	1	2	0	1	1	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0
16	PN TAKALAR	0	0	0	0	3	0	1	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0
17	PN JENEPONTO	1	2	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0
18	PN BANTAENG	0	1	0	0	2	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
19	PN SINJAI	0	1	0	0	1	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	2
20	PN WATANSOPPENG	1	2	0	0	1	0	2	3	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1
21	PN SELAYAR	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	PN MALILI	1	1	0	0	4	0	1	1	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0
23	PN MASAMBA	1	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	PN ENREKANG	1	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	PN POLEWALI	1	1	0	0	1	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	PN MAJENE	1	1	0	0	1	0	3	0	1	3	1	0	0	1	0	0	0	0
27	PN PASANGKAYU	1	1	0	0	1	0	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0
28	PN BELOPA	2	2	0	0	2	0	1	1	-	1	0	0	0	0	1	1	0	0

Untuk mengatasi permasalahan beban kerja yang relatif besar, di samping dapat dilakukan dengan cara menambah personil tenaga Teknis pada Pengadilan yang bersangkutan, juga dapat dilakukan dengan memberi program pengembangan pegawai berupa pendidikan, pelatihan dan peningkatan keterampilan. Hanya saja program pengembangan pegawai ini belum dapat dilakukan oleh Pengadilan Tinggi Sulawesi Selatan dan Barat selaku pembina dan pengelola SDM Aparatur Pengadilan di lingkungan Peradilan Umum se Sulawesi Selatan dan Barat.

Berikut ini data-data Mutasi, Promosi, Pensiun dan Kenaikan Pangkat seluruh tenaga Teknis Peradilan se Sulawesi Selatan dan Barat pada tahun 2021 :

Kenaikan Pangkat Periode April 2021

Tabel III.7. Kenaikan Pangkat Periode April 2021

NO	PENGADILAN	PIMPINAN	HAKIM TINGGI / HAKIM	KEPANITERAAN	KEJURUSITAAN	SEKRETARIS	KABAG/ KASUBAG	STAF
1	PT MAKASSAR	0	0	0	0	0	1	3
2	PN MAKASSAR	2	7	6	2	0	0	2
3	PN SUNGGUMINASA	0	3	4	1	0	0	6
4	PN MAMUJU	0	1	0	1	0	0	0
5	PN WATAMPONE	0	3	0	0	0	0	0
6	PN MAROS	0	1	5	0	0	1	3
7	PN MAKALE	0	3	1	0	1	0	0
8	PN PALOPO	0	2	2	0	0	2	0
9	PN SENGKANG	1	4	1	0	1	0	0
10	PN BULUKUMBA	1	4	1	1	0	1	0
11	PN PANGKAJENE	0	0	0	0	1	1	0
12	PN BARRU	0	0	0	0	0	2	0
13	PN PAREPARE	1	0	1	3	0	0	3
14	PN SIDENRENG RAPPANG	0	2	3	0	1	0	1
15	PN PINRANG	0	0	0	0	0	0	0
16	PN TAKALAR	0	0	0	0	0	0	0
17	PN JENEPONTO	0	1	3	2	1	0	0
18	PN BANTAENG	0	0	1	0	0	0	1
19	PN SINJAI	0	0	1	0	0	0	0
20	PN WATANSOPPENG	1	0	0	0	0	1	0
21	PN SELAYAR	0	0	0	1	0	1	1
22	PN MALILI	1	0	0	0	1	1	0
23	PN MASAMBA	0	0	0	0	0	0	0
24	PN ENREKANG	0	0	0	0	0	0	0
25	PN POLEWALI	0	1	1	0	0	0	0
26	PN MAJENE	0	4	0	1	1	1	0
27	PN PASANGKAYU	0	0	1	0	0	0	0
28	PN BELOPA	0	0	1	0	1	0	0

- **Kenaikan Pangkat Periode Oktober 2021**

Tabel III.8. Kenaikan Pangkat Periode Oktober 2021

NO	SATUAN KERJA	PIMPINAN	HAKIM TINGGI/ HAKIM	KEPANITERAAN	KEJURUSITAAN	SEKRETARIS	KABAG/ KASUBAG	STAF
1	PT MAKASSAR	0	0	1	0	0	0	0
2	PN MAKASSAR	0	2	3	1	1	1	0
3	PN SUNGGUMINASA	0	1	1	1	1	0	0
4	PN MAMUJU	0	0	0	0	1	0	0
5	PN WATAMPONE	0	0	1	0	0	1	0
6	PN MAROS	0	0	0	0	0	0	0
7	PN MAKALE	0	0	0	0	1	0	0
8	PN PALOPO	0	0	1	0	0	0	0
9	PN SENGKANG	0	0	2	0	0	0	0
10	PN BULUKUMBA	0	0	0	0	0	0	0
11	PN PANGKAJENE	0	0	0	0	0	0	0
12	PN BARRU	0	0	0	0	0	0	0
13	PN PAREPARE	0	4	0	0	0	0	0
14	PN SIDENRENG RAPPANG	0	1	0	0	0	2	0
15	PN PINRANG	0	1	0	0	0	0	0
16	PN TAKALAR	0	2	0	1	0	0	0
17	PN JENEPONTO	0	0	0	1	0	0	0
18	PN BANTAENG	0	4	0	0	0	0	0
19	PN SINJAI	0	1	0	0	0	0	1
20	PN WATANSOPPENG	0	0	0	1	0	0	0
21	PN SELAYAR	0	0	0	0	0	0	1
22	PN MALILI	0	0	0	0	0	0	0
23	PN MASAMBA	0	0	0	0	0	0	0
24	PN ENREKANG	0	0	0	0	0	0	0
25	PN POLEWALI	0	2	0	0	0	0	0
26	PN MAJENE	0	1	0	0	0	0	0
27	PN PASANGKAYU	0	0	1	0	0	0	0
28	PN BELOPA	1	-	-	-	-	1	-

- **MUTASI**

Mutasi Masuk

Tabel III.9. Mutasi Masuk Tahun 2021

NO	SATUAN KERJA	NAMA / NIP PANGKAT	JABATAN	JABATAN SEBELUMNYA	KET
1	PT MAKASSAR	H. SUTIO JUMAGI AKHIRNO, S.H., M.Hum. NIP. 196112011981031001 Pembina Utama Madya (IV/d)	HAKIM TINGGI	KPN MEDAN	
		HARI WIDODO, S.H., M.H. NIP. 195809171987021001 Pembina Utama (IV/e)	HAKIM TINGGI	HAKIM TINGGI PT KENDARI	
		FERDINANDUS.B., S.H., M.H. NIP. 196002261986121001 Pembina Utama (IV/e)	HAKIM TINGGI	HAKIM TINGGI PT KENDARI	
		I GEDE SUARSANA, S.H. NIP. 195908041986121001 Pembina Utama (IV/e)	HAKIM TINGGI	HAKIM TINGGI PT KENDARI	
		Dr. PARULIAN LUMBANTORUAN, S.H., M.H. NIP. 196306161988031002 Pembina Utama (IV/e)	HAKIM TINGGI	HAKIM TINGGI PT MANADO	
		MUSTHOFA, S.H. NIP. 195810021986121001 Pembina Utama (IV/e)	HAKIM TINGGI	HAKIM TINGGI PT GORONTALO	

		USAHA GINTING, S.H., M.H. NIP. 195909041986121001 Pembina Utama (IV/e)	HAKIM TINGGI	HAKIM TINGGI PT AMBON	
		JHON HALASAN BUTAR BUTAR, S.H., M.Si., M.H. NIP. 196011211986121001 Pembina Utama (IV/e)	HAKIM TINGGI	HAKIM TINGGI PT PONTIANAK	
		TAHSIN, S.H., M.H. NIP. 196004191986031002 Pembina Utama (IV/e)	HAKIM TINGGI	HAKIM TINGGI PT PALU	
		ANDI MAULANA, S.H., M.H. NIP. 198008042008051001 Pembina Tingkat I (III/c)	HAKIM YUSTISI PT. MAKASSAR	HAKIM PN MERAUKE	
		PUJI HARIAN, S.H. M.Hum. NIP. 196501151992121001 Pembina Utama Madya (IV/d)	HAKIM TINGGI	KPN JAKARTA UTARA	
		BHASKARA PRABA BHARATA, S.H. NIP. 195806021985121001 Pembina Utama (IV/e)	HAKIM TINGGI	HAKIM TINGGI PT SEMARANG	
		LAMBERTUS LIMBONG, S.H. NIP. 195610011986121001 Pembina Utama (IV/e)	HAKIM TINGGI	HAKIM TINGGI PT MEDAN	
		TITUS TANDI, S.H., M.H. NIP. 196202021987031008 Pembina Utama (IV/e)	HAKIM TINGGI	HAKIM TINGGI PT PALU	
		ANDI ISNA RENISHWARI CINRAPOLE, S.H., M.H. NIP. 196204061985012001 Pembina Utama (IV/e)	WAKIL KETUA	WAKIL PT. BANJARMASIN	
		MUHAMMAD DAMIS, S.H., M.H. NIP. 196310251992121001 Pembina Utama Madya (IV/d)	HAKIM TINGGI	KPN JAKARTA PUSAT	
		BUDHY HERTANTIYO, S.H., M.H. NIP. 196302061986121001 Pembina Utama (IV/e)	HAKIM TINGGI	HAKIM TINGGI PT AMBON	
		YUNUS SESA, S.H., M.H. NIP. 195810021985121001 Pembina Utama (IV/e)	HAKIM TINGGI	HAKIM TINGGI PT MALUKU UTARA	
		MAKKASAU, S.H., M.H. NIP. 195712311984011007 Pembina (IV/e)	HAKIM TINGGI	HAKIM TINGGI PT. BANDUNG	
		Hj. ST. NORMAH, S.H. NIP. 196303201985032004 Penata Tingkat I (III/d)	PANITERA PENGANTI	PANITERA PN BARRU	
		H. MUHAMMAD ANSAR PADU, S.H., M.H. NIP. 196211021983111001 Pembina (IV/a)	PANITERA PENGANTI	PANITERA PN WATANSOPPENG	
		TASWIN, S.H., M.H. NIP. 196210091985031006 Pembina (IV/a)	PANITERA PENGANTI	PANITERA PN KOLAKA	
		SURHATTA, S.H. NIP. 196312311982031019 Penata Tingkat I (III/d)	PANITERA PENGANTI	PANMUD PHI PN MAKASSAR	
		ANDI HAJERAWATI, S.H. NIP. 196412311987032026 Penata Tingkat I (III/d)	PANITERA PENGANTI	PANMUD PIDANA PN MAKASSAR	
		MARWATY, S.H. NIP. 196308141986022001 Penata Tingkat I (III/d)	PANITERA PENGANTI	PANMUD HUKUM PN SUNGUMINASA	
		Hj. HAMISA, S.H., M.H. NIP. 196311201991032004 Pembina (IV/a)	PANITERA PENGANTI	PANMUD NIAGA PN MAKASSAR	
		DERMAWAN TAHIR, S.H., M.H. NIP. 197304291994031005 Pembina (IV/a)	PANITERA PENGANTI	PANMUD HUKUM PN MAKASSAR	
		ABD. LATIF, S.H. NIP. 196509201990031002 Penata Tingkat I (III/d)	PANITERA PENGANTI	PANMUD PIDANA PN SUNGUMINASA	
		MUHAMMAD AZWAR, S.E. NIP. 197101272006041002 Pembina (IV/a)	KEPALA BAGIAN UMUM DAN KEUANGAN	SEKETARIS PN MAROS	

		SIGID TRIYONO, S.H., M.H. NIP. 19650412 199212 1 001 PEMBINA UTAMA MADYA (IV/d)	KETUA	WAKIL PN BEKASI	
		R. FADJARISMAN, S.H., M.H. NIP. 19671228 199212 1 001 PEMBINA UTAMA MUDA (IV/c)	HAKIM	HAKIM PN SURABAYA	
		Hj. HALIDJA WALLY, S.H., M.H. NIP. 19600825 199403 1 001 PEMBINA UTAMA MUDA (IV/c)	HAKIM	HAKIM PN MANADO	
		TIMOTIUS DJEMEY, S.H. NIP. 19600825 199403 1 001 PEMBINA UTAMA MUDA (IV/c)	HAKIM	KETUA PN MAKALE	
		HERIANTO, S.H., M.H. NIP. 19661205 199603 1 002 PEMBINA UTAMA MUDA (IV/c)	HAKIM	KETUA PN MAMUJU	
		ANGELIKY HANDAJANI DAY, S.H., M.H. NIP. 19691004 199903 2 001 PEMBINA UTAMA MUDA (IV/c)	HAKIM	HAKIM PN DENPASAR	
		Ir. ABDUL RAHMAN KARIM, S.H. NIP. 19711018 199903 1 001 PEMBINA UTAMA MUDA (IV/c)	HAKIM	HAKIM PN SAMARINDA	
		ESAU YARISETOU, S.H. NIP. 19630713 199610 1 001 PEMBINA UTAMA MUDA (IV/c)	HAKIM	HAKIM PN AMBON	
		FARID H. SOPAMENA, S.H., M.H. NIP. 19711018 199903 1 001 PEMBINA TK. I (IV/b)	HAKIM	KETUA PN PANGKAJENE	
		ACHMAD RASJID, S.H. NIP. 19740915 200003 1 001 PEMBINA TK. I (IV/b)	HAKIM	KETUA PN LABUHA	
		SAMSIDAR NAWAWI, S.H., M.H. NIP. 19770526 200012 2 002 PEMBINA TK. I (IV/b)	HAKIM	KETUA PN PARE PARE	
		JOHNICOL RICHARD R.SINE, S.H. NIP. 19711018 199903 1 001 PEMBINA TK. I (IV/b)	HAKIM	KETUA PN MAUMERE	
		SISWATY, S.H. NIP. 19840124 200912 2 002 PENATA (III/c)	PANITERA MUDA PERDATA	PANITERA MUDA PERDATA PN SUNGGUMINASA	
		ISWANDI ANDI MARZUKI, S.H. NIP. 19810904 200904 1 005 PENATA TK.I (III/d)	PANITERA MUDA NIAGA	PANITERA MUDA HUKUM PN MAROS	
		HASNAWATI PATTA, S.E., Ak., S.H. NIP. 19830804 200604 2 001 PENATA TK. I (III/d)	PANITERA PENGGANTI	PANITERA PENGGANTI PN DEPOK	
		MUZDALIFAH, S.H., M.H. NIP. 19760425 200805 2 001 PENATA (III/c)	PANITERA PENGGANTI	PANITERA PENGGANTI PN DEPOK	
		ANDI NIRWAN AY., S.H. NIP. 198704052009041003 PENATA (III/c)	PANITERA PENGGANTI	PANITERA PENGGANTI PN MAROS	
		ROSANNY NOVIANITY NIKA, S.H. NIP. 19850930 201101 2 015 PENATA MUDA TK. I (III/b)	PANITERA PENGGANTI	PANITERA PENGGANTI PN MAROS	
		BENEDIKTA TANDILINO, S.H. NIP. 19860605 201503 2 001 PENATA MUDA TK. I (III/b)	ANALIS PERKARA	ANALIS PERKARA PN PASURUAN	
3	PN SUNGGUMINASA	AGUNG SULISTIYONO, S.H., S.Sos., M.Hum., NIP. 19670218 199603 1 001, PANGKAT IV/c	KETUA PENGADILAN NEGERI SUNGGUMINASA	WAKIL KETUA PENGADILAN NEGERI SAMARINDA	
		SAFRI, S.H., M.H., NIP 19690608 199702 1 001, PANGKAT IV/C	WAKIL KETUA PENGADILAN NEGERI SUNGGUMINASA	HAKIM PENGADILAN NEGERI SURABAYA	
		RADEN NURHAYATI, S.H., M.H., NIP 19780807 200212 2 003, PANGKAT IV/b	HAKIM PENGADILAN NEGERI SUNGGUMINASA	HAKIM PENGADILAN NEGERI PALOPO	
		H. SYAHBUDDIN, S.H., NIP. 197706 19200212 1 002, PANGKAT IV/a	HAKIM PENGADILAN NEGERI SUNGGUMINASA	KETUA PENGADILAN NEGERI TOLI-TOLI	

		BAMBANG SUPRIYONO, S.H., NIP. 19790813 200212 1 007, PANGKAT IV/a	HAKIM PENGADILAN NEGERI SUNGGUMINASA	HAKIM PENGADILAN NEGERI MOJOKERTO	
		ENNY WAHYUNINGTYAS P, S.H., M.H., NIP. 19770929 200312 2 001, PANGKAT IV/a	HAKIM PENGADILAN NEGERI SUNGGUMINASA	HAKIM PENGADILAN NEGERI MOJOKERTO	
		NURIYA AWAD, S.H., NIP. 19750330 200003 2 002, PANGKAT III/d	PANITERA MUDA PIDANA PENGADILAN NEGERI SUNGGUMINASA	PANITERA PENGGANTI PENGADILAN NEGERI MAKASSAR	
		SABANIA H, S.H., M.H., NIP. 19850511 200904 2 007, PANGKAT III/d	PANITERA MUDA HUKUM PENGADILAN NEGERI SUNGGUMINASA	PANITERA PENGGANTI PENGADILAN NEGERI MAKASSAR	
		NAWIR, S.H., NIP. 19720204 199303 1 002, PANGKAT III/c	PANITERA MUDA PERDATA PENGADILAN NEGERI SUNGGUMINASA	PANITERA MUDA HUKUM PENGADILAN NEGERI BULUKUMBA	
		MUHAMMAD RIDWAN, S.H., NIP. 19800305 200805 1 001, PANGKAT III/d	PANITERA PENGGANTI PENGADILAN NEGERI SUNGGUMINASA	PANITERA PENGGANTI PENGADILAN NEGERI PANGKAJENE	
		ANDI BUSTANIL ARIFIN, S.H., M.H., NIP. 19820505 200502 1 001, PANGKAT III/c	PANITERA PENGGANTI PENGADILAN NEGERI SUNGGUMINASA	PANITERA PENGGANTI PENGADILAN NEGERI MAKASSAR	
		ANITA FARHAN, S.H., NIP. 19821209 200604 2 001, PANGKAT III/c	PANITERA PENGGANTI PENGADILAN NEGERI SUNGGUMINASA	PANITERA PENGGANTI PENGADILAN NEGERI MAKALE	
4	PN MAMUJU	-	-	-	
5	PN WATAMPONE	Moehammad Pandji Santoso, S.H., M.H. NIP. 197002181996031003 Pembina Utama Muda (IV/c)	Ketua	Wakil Ketua PN Tasikmalaya	
		NOVIE ERMAWATI, SH. NIP. 198105182003122001 Pembina (IV/a)	Hakim	Hakim PN. Purwokerto	
		MUSWANDAR, SH. MH. NIP. 197707172002121005 PEMBINA (IV/a)	Hakim	Hakim PN. Banyuwangi	
		Ahmad Syarif, S.H., M.H. NIP. 197601112003031002 Pembina Tk.I(IV/b)	Hakim	Hakim PT. Ambon	
		SEGA HENDRICUS, S.H. NIP. 196311101992031006 PEMBINA (IV/a)	Panitera	Panitera PN. Atambua	
		BUSTAN JAYA, S.H. NIP. 196204031983031003 PENATA TK.I (III/d)	Panmud Hukum	Panmud Hukum PN. Sengkang	
		M. AKRAM, S.H., M.H. NIP. 198902012014031001 PENATA (III/c)	Panitera Pengganti	Panitera Pengganti PN. Sengkang	
		Irmawati Abidin, S.H., M.H. NIP. 197610132001122003 PEMBINA (IV/a)	Hakim	Hakim PN. Kendari	
		Fitria Ade Maya, S.H. NIP. 197901172002122003 PEMBINA (IV/a)	Hakim	Hakim PN. Gresik	
		Ernawati Anwar, S.H., M.H. NIP. 197601042001122001 PEMBINA (IV/a)	Hakim	Hakim PN. Palu	
		Rubianti, S.H., M.H. NIP. 197901172002122002 PEMBINA (IV/a)	Hakim	Hakim PN. Maros	
		Yulianti Muhidin, S.H. NIP. 197506162006042002 PENATA TK.I (III/d)	Hakim	Hakim PN. Sungguminasa	
6	PN MAROS	Andi Nurmawati, SH. MH. / NIP.197408071999032002/ Pembina Tk. I (IV/b)	Ketua Pengadilan negeri Maros	Wakil Ketua Pengadilan Negeri Sengkang	
		Khairul, SH. MH. / NIP. 197911132002121003/ Pembina Tk. I (IV/b)	Wakil Ketua Pengadilan Negeri Maros	Ketua Pengadilan Negeri Malili	

		Abdul Hakim, SH. MH. / NIP. 197905202008051001/ Penata Tk. I (III/d)	Hakim	Hakim Pengadilan Negeri Pangkep	
		Wiryan Hadikusuma, SH. MH. / NIP. 198303092009041004/ Penata Tk. I (III/d)	Hakim	Hakim Pengadilan Tinggi Pekanbaru	
		Farida Pakaya, SH. MH./ NIP. 197307022006042002/ Penata Tk. I (III,d)	Hakim	Hakim Pengadilan Negeri Banjarnegara	
		Muhammad Ilyas B., SH./ NIP. 197505132001121003/ Penata Tk. I (III/d)	Panmud Hukum	Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Makassar	
		Shidiq Arif Siwiantoko, A.Md. Kom./ NIP. 199709062019031001/ Pengatur (II/c)	Pengelola Sistem dan Jaringan	Pengelola Sistem dan Jaringan Pengadilan Negeri Sengkang	
7	PN MAKALE	Helka Rerung, S.H/ NIP. 198202102009041004/ Penata Tk. I (III/d)	Hakim	Hakim	
		Raja Bonar Wansi Siregar, S.H., M.H./ NIP.198609012009041003/ Penata Tk. I (III/d)	Hakim	Hakim	
		Achmad Yani Tamher, S.H./NIP. 19840924 200704 1 001/Penata Tk. I / (III/d)	Hakim	Hakim	
		Richard Edwin Basoeki, S.H., M.H./ NIP. 197512272001121004/ Pembina Tingkat I (IV/b)	Wakil Ketua PN Makale	Ketua pn waingapu	
		MEIR ELISABETH BATARA RANDA, S.H., M.H./ Nip.198604042009122002/Penata Tingkat I (III/d)	Hakim	Hakim	
		MELIANA BANNE LAYUK, S.H./NIP.198205152009042015/Penata Muda Tingkat I (III/b)	Bendahara	Kasub Umum Keuangan	
8	PN PALOPO	Ahmad Ismail, S.H.,M.H / NIP. 1974	Hakim	Hakim	
		H. Rachmat Ardimal T, S.h.,M.H/ NIP. 198410132009041003 Penata Tk.I (III/d)	Hakim	Hakim	
		Muhammad Ali Akbar, S.H/ NIP. 198209112009041008 / Penata Tk.I (III/d)	Hakim	Hakim	
		Fadli Bakri, S.E / NIP. 198308192008011004 Penata Tk.I (III/d)	Staf Pelaksana	Analisis Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan	
9	PN SENGKANG	Dzulkaranain, S.H.,M.H. /196403241986031002/Hakim madya utama /IV/C	Ketua Pengadilan Negeri Sengkang	Wakil ketua Pengadilan Negeri Gorontalo	
		Hasrawati Yunus,S.H.,M.H/197412311993032001/ Pembina TK.1 (IV/b)	wakil ketua	Hakim	
		Andi Nur Haswah,S.H. / 198112162008052001/ Penata TK.1 III/d	Hakim	Hakim	
		Aisyah Adama,S.H,M.H./198506302009042010 /Penata TK.1 III/d	Hakim	Hakim	
		Jumadil,S.H/198209032005021001/Pen ata III/C	Panitera Muda Hukum	Panitera Penganti	
		Hj.ASMI,S.sos/198409232014062001/P enata Muda III/a	Analisis SDM Aparatur pada Subbag Kepegawaian	Bendahara Pemda	
10	PN BULUKUMBA	Andi Muh.Amin AR, SH/198502282009041008/Penata Tk.I /IIId	Hakim	Hakim PN Sinjai	
		Septiawati, SH./197909092009042003/Penata Tk. I/III.d	Panitera Muda Hukum	Panitera Penganti PN Sungguminasa	
		Fitriana, SH. MH. /198311202007042001/ PenataTk.I /III.d	Hakim	Hakim PN Watansoppeng	

		Ria Handayani, SH.MH./ 198303012009122001/Penata /III.c	Hakim	Hakim PN Takalar	
		Adil Kasim, SH.MH/197511122001121002/Pembina Tk. I / IV.b	WKPN Bulukumba	KPN Pinrang	
11	PN PANGKAJENE	-	-	-	
12	PN BARRU	RONNY WIDODO, S.H.,M.H/ 197705062002121005/ Pembina (IV/a)	Ketua	Wakil PN Biak	
		ABBAS LAHAMID, S.H/ 196811111991031003/Penata Tk. I (III/d)	Panitera	Panmud Perdata PN Watampone	
13	PN PAREPARE	NURHUDA,S.H.,M.H./NIP.19810412200 3122010/Pembina (IV/a)	Wakil Ketua PN parepare	Hakim PN Purwakarta	
		Dr.Hj.ST.NAISJIAH,S.H.,M.H./NIP.19680 6271992032002/Pembina (IV/a)	Panitera PN Parepare	Panmud Perdata PN Makassar	
14	PN SIDENRENG RAPPANG	-	-	-	
15	PN PINRANG	TEGUH ARIFIANO,S.H.,M.H/1978060620011210 02/Pembina (IV/a)	Ketua		
		JUMADI APRI AHMAD,S.H.,M.H/19800418200312100 3/Pembina (IV/a)	Wakil Ketua	Hakim PN Sumber	
		Hasma H.,S.E.,S.H/196805151992032002/Pena ta Tk.I (III/d)	Panitera	Panitera PN Pare-Pare	
		Hilda Tri Ayudia,S.H/199412172017122002/Pena ta Muda (III/a)	Hakim	Hakim PN Liwa	
16	PN TAKALAR	Satria,S.H 19727202221994032007 Penata (III/c)	Panitera Pengganti PN Takalar	Jurusita Pengganti PN Makassar	
17	PN JENEPONTO	PATANUDDIN, S.H., M.H. 197912292003121001 Pembina (IV/a)	Wakil Ketua	Hakim PN Bangil	
		MARINI, S.H. 198412112009122003 Penata Tk. I (III/d)	Analisis Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan	Analisis Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan PN Bangil	
		DARMAWI NUR, SH., MH 198612262014121001 pENATA mUDA (III/a)	Analisis Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan	Staf Pemda Kabupaten Jeneponto	
18	PN BANTAENG	Akhmad Basir, S.H. 197601312001121003 Penata (III/c)	Panitera Muda Pidana PN Bantaeng	Panitera Pengganti PN BULukumba	
		Yuslana 198602032014082002 Pengatur Muda Tk.I (II/b)	Pengadministrasi Hukum PN Bantaeng	Pengadministrasi Kependidikan Pemkab Bantaeng	Mutasi dari Instansi Luar
19	PN SINJAI	NURFADHILAH, S.H. / 198802102011012013/ Penata (III/c)	Panitera Pengganti	Panitera Pengganti	
20	PN WATANSOPPENG	Benedictus Rinanta, S.H. / NIP. 197807172003121001/(IV/a)	Wakil Ketua	Hakim PN Klaten	
		Muslimin, S.H., M.H. / NIP. 196612311990031024/ (III/d)	Panitera	Panitera PN Belopa	
		Eka Herfiani, S.H. / NIP. 198208112009042006 / (III/c)	Panitera Muda Pidana	Panitera Pengganti PN Sengkang	
21	PN SELAYAR	I PUTU AGUS ADI ANTARA, S.H.,M.H./ NIP. 19770904 200112 1 001/ PEMBINA, IV/a	Ketua	Wakil Ketua PN Pinrang	
		AS'AD SURYO HATMOJO, S.H./ 19921027 201712 1 006/ PENATA MUDA, III/a	Hakim	Cakim PN Sinjai	
		ST. MUFLIAH RAHMAH, S.H./ 19950616 201712 2 001/ PENATA MUDA, III/a	Hakim	Cakim PN Takalar	

		ABIDIN, S.H./ 19660507 198803 1 002/ PENATA Tk.I, III/d	Panitera	Panitera Muda Hukum PN Bulukumba	
22	PN MALILI	ALFIAN, S.H./197505212000121001	Ketua	Ketua PN Dobo	
		Pembina Tk.I (IVb)			
		H. AMIR MAHMUD, S.H./197106161994031004	Panitera	Panitera PN Polewali	
		Penata Tk.I (III/d)			
		DONNY BATOTANETE, S.T.,M.M./198112292009011008	Pranata Komputer Ahli Muda	IAKN Toraja	Pindah melimpah
		Penata (III/c)			
23	PN MASAMBA	MUHAMMAD SYAWALUDIN, SH. / 1979092003121001/ Pembina (IV/a)	WAKIL KETUA	HAKIM PN SUNGUMINASA	
24	PN ENREKANG	ARI PRABOWO, S.H., M.H./197702012002121003/Pembina IV.a	Wakil Ketua PN Enrekang	Hakim PN Kupang	
		ABDUL KADIR, S.H., M.H./197004091993031005/Pembina IV.a	Panitera PN Enrekang	Panitera PN Mamuju	
		DURIANAH DUDY PIRY/198010292010012018/Pengatur II.c	Administrasi Hukum PN Enrekang	Administrasi Hukum PN Belopa	
25	PN POLEWALI	ARMAN, S.H./197205301993031001/Penata Tk.I/IIId	Panitera PN. Polewali	Panitera PN. Malili	
26	PN MAJENE	-	-	-	
27	PN PASANGKAYU	FAQIH AZHURY MAHMUD, SH., MH./199103142014031002/Penata Muda Tk.I/III.b	Panitera Pengganti PN Pasangkayu	Staf Pelaksana PN Majene	
		ANUGRAH FAJAR NURAINI, SH/199209202017122001/Penata Muda/III.a	Hakim PN Pasangkayu	Calon Hakim PN Ngawi	
		FIRMAN ARES BERNANDO, SH/198809062017121002/Penata Muda/III.a	Hakim PN Pasangkayu	Calon Hakim PN Belopa	
		ADHE APRIYANTO, SH/199004252017121005/Penata Muda/III.a	Hakim PN Pasangkayu	Calon Hakim PN Belopa	
		HARYOGI PERMANA, SH/199211292017121002/Penata Muda/III.a	Hakim PN Pasangkayu	Calon Hakim PN Barru	
		MUKMIN M, SH/197509082012121003/Penata Muda Tk.I/III.b	Kasubbag PTIP PN Pasangkayu	Bendahara PN Mamuju	
28	PN BELOPA	PURWANTO S. ABDULLAH, S.H.,M.H.	Ketua Pengadilan Negeri Belopa	Ketua Pengadilan Negeri Dataran Hunimoo	
		DR. SILVIANY S, S.H.,M.H.,M.Kn.	Wakil Ketua PN Belopa	Hakim PN Purwodadi	
		SIARIFUDIN RASJID, S.H.	Panitera PN Belopa	Panitera PN Bobong	
		JIHAN HASMIN, S.E.	Penyusun Laporan Keuangan PN Belopa	Penyusun Laporan Keuangan PN Dataran Hunimoo	
		Rusyaid Abdi, S.H.	CPNS	-	
		RANDI AFRIAN, A.Md.Kom.	CPNS	-	
		MARTEN LIMBINGALLO, A.Md.	CPNS	-	

Mutasi Keluar

Yang dimaksud mutasi keluar adalah pindahan dari keluar Sulawesi Selatan dan Barat atau keluar PN dalam wilayah Sulawesi Selatan dan Barat akan tetapi dengan kedudukan yang sama di PN yang lama maupun yang baru.

Tabel III.10. Mutasi Keluar Tahun 2021

NO	SATUAN KERJA	NAMA / NIP	JABATAN	JABATAN SEBELUMNYA	KET
		PANGKAT			
1	PT MAKASSAR	MAKKASAU, S.H., M.H. NIP. 195712311984011007 Pembina (IV/e)	HAKIM TINGGI PT. BANDUNG	HAKIM TINGGI PT. MAKASSAR	
		EFENDI PASARIBU, S.H., M.H. NIP. 195803041985031003 Pembina (IV/e)	HAKIM TINGGI PT. BANTEN	HAKIM TINGGI PT. MAKASSAR	
		HERDIYANTO, S.Kom. NIP. 198605202009041006 Penata Tingkat I (III/d)	SEKRETARIS PN MAROS	KASUBAG UMUM DAN KEUANGAN	
2	PN MAKASSAR	TITO SUHUD, S.H., M.H. NIP.19640721 199212 1 001/PEMBINA UTAMA MADYA	KETUA PN JAKARTA TIMUR	KETUA PN MAKASSAR	
		DANIEL PRATU, S.H./NIP.196103281983031003/PEMBINA UTAMA MADYA	HAKIM TINGGI PT AMBON	HAKIM PN MAKASSAR	
		RIYANTO ALOYSIUS, S.H., M.H./NIP.19620515 199212 1 001/PEMBINA UTAMA MADYA	HAKIM PN BANDUNG	HAKIM PN MAKASSAR	
		RIKA MONA P., S.H., M.H./NIP. 19671026 199212 2 001/PEMBINA UTAMA MADYA	HAKIM PN JAKARTA SELATAN	HAKIM PN MAKASSAR	
		BASUKI WIYONO, S.H., M.H./NIP. 19660418 199603 1 001/PEMBINA UTAMA MUDA	HAKIM PN BEKASI	HAKIM PN MAKASSAR	
		Dr. ZULKIFLI, S.H., M.H./NIP. 19650824 198503 1 002/PEMBINA UTAMA MUDA	HAKIM PN JAKARTA PUSAT	HAKIM PN MAKASSAR	
		ACHMAD RASJID, S.H./NIP. 19740915 200003 1 001/PEMBINA TK. I (IV/b)	WAKIL PN TARAKAN	HAKIM PN MAKASSAR	
		Dr. ST. NAISJIAH, S.H., M.H./NIP. 19680627 199203 2 002/PEMBINA TK. I (IV/b)	PANITERA PN PARE PARE	PANITERA MUDA PERDATA PN MAKASSAR	
		ANDI HAJERAWATI, S.H. / NIP. 19641231 198703 2 026/PENATA TK. I (III/d)	PANITERA PENGGANTI PT MAKASSAR	PANITERA MUDA PIDANA PN MAKASSAR	
		SURHATTA, S.H./NIP. 19631231 198203 1 019/ PENATA TK. I (III/d)	PANITERA PENGGANTI PT MAKASSAR	PANITERA MUDA PHI PN MAKASSAR	
		MUHAMMAD ILYAS, S.H./NIP. 19750513 200112 1 003/PENATA TK. I (III/d)	PANITERA MUDA HUKUM PN MAROS	PANITERA PENGGANTI PN MAKASSAR	
		MUHAMMAD ILYAS, S.H./NIP. 19750513 200112 1 003/PENATA TK. I (III/d)	PANITERA MUDA HUKUM PN MAROS	PANITERA PENGGANTI PN MAKASSAR	
		MUHAMMAD ILYAS, S.H./NIP. 19750513 200112 1 003/PENATA TK. I (III/d)	PANITERA MUDA HUKUM PN MAROS	PANITERA PENGGANTI PN MAKASSAR	
		HEBBIN SILALAH, S.H., M.H./NIP 19610923 198303 1 005/PANGKAT IV/d	HAKIM TINGGI PENGADILAN TINGGI PONTIANAK	KETUA PENGADILAN NEGERI SUNGGUMINASA	
		RIDWAN, S.H., M.H./NIP 19690706 199603 1 002/PANGKAT IV/c	WAKIL KETUA PENGADILAN BALE BANDUNG	WAKIL KETUA PENGADILAN NEGERI SUNGGUMINASA	
3	PN SUNGGUMINASA	SIGIT TRIATMOJO, S.H./NIP 19791016 200502 1 002/PANGKAT IV/a	HAKIM PENGADILAN NEGERI JEMBER	HAKIM PENGADILAN NEGERI SUNGGUMINASA	
		HENU SISTHA ADITYA, S.H., M.H./NIP 19790524 200502 1 001/PANGKAT IV/a	WAKIL KETUA PENGADILAN NEGERI KUTAI BARAT	HAKIM PENGADILAN NEGERI SUNGGUMINASA	
		MUHAMMAD SYAWALUDDIN, S.H., NIP. 19790911 200312 1 001, PANGKAT IV/a	WAKIL KETUA PENGADILAN NEGERI MASAMBA	HAKIM PENGADILAN	

				NEGERI SUNGGUMINASA	
		AMIRUDDIN MAHMUD, S.H., M.H., NIP. 19830910 200704 1 001, PANGKAT III/d	HAKIM PENGADILAN NEGERI DEPOK	HAKIM PENGADILAN NEGERI SUNGGUMINASA	
		YULIANTI MUHIDIN, S.H., NIP. 19750616 200604 2 002, PANGKAT III/d	HAKIM PENGADILAN WATAMPONE	HAKIM PENGADILAN NEGERI SUNGGUMINASA	
		MARWATY, S.H., NIP. 19630814 198602 2 001, PANGKAT III/d	PANITERA PENGANTI PENGADILAN TINGGI MAKASSAR	PANITERA MUDA HUKUM	
		SISWATY, S.H., 19840124 200912 2 002, PANGKAT III/c	PANITERA MUDA PERDATA PENGADILAN NEGERI MAKASSAR	PANITERA MUDA PERDATA PENGADILAN NEGERI SUNGGUMINASA	
		ABD. LATIF, S.H., NIP. 19650920 199003 1 002, PANGKAT III/D	PANITERA PENGANTI PENGADILAN TINGGI MAKASSAR	PANITERA MUDA PIDANA PENGADILAN NEGERI SUNGGUMINASA	
		SEPTIAWATI, S.H., NIP. 19790909 200904 2 003, PANGKAT III/d	PANITERA MUDA HUKUM PENGADILAN NEGERI BULUKUMBA	PANITERA PENGANTI PENGADILAN NEGERI SUNGGUMINASA	
		ANDI ZAINUDDIN, S.H., NIP. 19820504 201101 1 014, PANGKAT III/c	PANITERA MUDA PERDATA PENGADILAN NEGERI KUTAI BARAT	PANITERA PENGANTI PENGADILAN NEGERI SUNGGUMINASA	
		BAMBANG ANDI SAPUTRO, S.Kom., NIP. 19890816 201503 1 002, PANGKAT III/b	ANALIS AKUNTABILITAS KINERJA PENGADILAN NEGERI WONOSARI	PENGELOLA SISTEM DAN JARINGAN PENGADILAN NEGERI SUNGGUMINASA	
		M. JUMADIL, NIP. 19710909 201212 1 003, PANGKAT II/c	PENGADMINISTRASI REGISTRASI PERKARA (PERDATA) PENGADILAN NEGERI MAKASSAR	PENGADMINISTRASI REGISTRASI PERKARA (PERDATA) PENGADILAN NEGERI SUNGGUMINASA	
4	PN MAMUJU	HERIANTO, S. H NIP. 196612051996031002 GOL. IV/d	KETUA	HAKIM	
5	PN WATAMPONE	Surachmat,S.H., M.H. NIP. 196303291987031005 PEMBINA UTAMA MADYA (IV/d)	Wakil PN. Bandung	Ketua PN. Watampone	
		Hasmawati,S.H. NIP. 196401141984032001 PEMBINA (IV/a)	Panitera Pengganti PT. Makassar	Wakil Panitera PN. Watampone	
		I Dewa G. Budhy D.A., S.H., M.H. NIP. 197305201999031002 PEMBINA TK. I (IV/b)	Wakil PN. Bangkinang	Hakim PN.Watampone	
		B.U. Resa Syukur,S.H., M.H. NIP. 198106182003121001 PEMBINA (IV/a)	Hakim Mataram	Hakim PN.Watampone	
		Khaerunnisa, S.H. NIP. 197809292005022002 PENATA TK.I (III/d)	Hakim PN.Cibinong	Hakim PN.Watampone	
		Nurkautsar Hasan,S.H., M.H. NIP. 197904042005021002 PENATA TK.I (III/d)	Hakim PN. Jember	Hakim PN.Watampone	
		Abbas Lahamid, S.H. NIP. 196811111991031003 PENATA TK.I (III/d)	Panitera PN Barru	Panitera Muda Perdata	
		Jumadil,S.H., M.H. NIP. 198209032005021001 PENATA (III/c)	Panmud Hukum PN Sengkang	Panitera Pengganti PN.Watampone	
6	PN MAROS	R. Bernadette Samosir, SH., MH./ NIP. 196801181994032006/Pembina Utama Muda (IV/c)	Hakim PN Jakarta Pusat	Wakil Ketua PN Maros	
		Rubianti,SH., MH./NIP. 197901172002122002/ Pembina (IV/a)	Hakim PN Watampone	Hakim PN Maros	
		Fifiyanti, SH, MH. / NIP. 197710312002122007 / Pembina (IV/a)	Hakim PN Gresik	Hakim PN Maros	
		Mustamin, SH., MH./ NIP. 198308172009041010/ Penata Tk. I (III/d)	Hakim Yustisial Biro Hukum Dan	Hakim PN Maros	

			Hubungan Masyarakat Badan Urusan Administras		
		Iswandi Andi Marzuki, SH. / NIP. 198109042009041005/ Penata Tk. I (III/d)	Panitera Muda Niaga PN Makassar	Panitera Muda Hukum PN Maros	
		Andi Nirwan AY., SH. / NIP. 198704052009041003/ Penata (III/c)	Panitera Penganti PN Makassar	Panitera Pengganti PN Maros	
		Rosanny Novianty Nika, SH. / NIP. 198509302011012015/ Penata Muda Tk. I (III/b)	Panitera Penganti PN Makassar	Panitera Pengganti PN Maros	
7	PN MAKALE	Timotius Djemey. S.H./ NIP. 196008251994031001/ Pembina Utama Muda (IV/c)	Hakim PN Makassar	Ketua Pn makale	
		Surya Laksemana, S.H./ NIP. 197701312001121002/ Pembina (IV/a)	Hakim PN balik papan	Hakim	
		Annender Carnova, S.H., M.Hum/ NIP.198104132006041004/Penata Tingkat I (III/d)	Hakim PN balik papan	Hakim	
		Chairil Anwar, S.H., M.Hum./ NIP.196808301996031002 / Pembina Utama Muda (IV/c)	Wakil Ketua PN Palu	Ketua	
		Anita Farhan, S.H./ NIP.198212092006042001 / penata tk i(III/d)	Panitera Pengganti Pn Sungguminasa	panitera pengganti	
		Ahmad Yani Tamher, S.H./19840924 200704 1 001 /penata tk i(III/d)	Hakim Pt ambon	Hakim	
8	PN PALOPO	Erwino M Amahorseja, S.H / NIP. 197306212005021001 Penata Tk.I (III/d)	Hakim	Hakim	
		Raden Nurhayati, S.H.,M.H / NIP. 197808072002122003 Pembina (IV/a)	Hakim	Hakim	
		Vreddy Ichsany, S.H / NIP. 198607262019031003 Penata Muda (III/a)	Analisis Perkara Peradilan	Analisis Perkara Peradilan	
9	PN SENGKANG	Fery Haryanta,S.H./196504211996031003/Pembina Utama Muda(IV/C)	KETUA	KETUA	
		Andi Nurmawati,S.H./197408071999032002/Pembina TK.1 (IV.b)	KETUA	WAKIL	
		Bustan jaya.S.H/196204031983031003/Penata TK.1 (III/d)	Panitera muda hukum	Panitera muda hukum	
		Eka Herfiani.S.H./198208112009042006/Penata Muda TK.1(III/b)	Panitera muda pidana	panitera penganti	
		Andi Irriana d. Sulolipu,S.H./198908212014032006/Penatan Muda TK.1(III.b)	Panitera Penganti	Analisis Perkara Peradilan	
		M.Akram,S.H,M.H./198902102014031001/Penata Muda TK.1 (III/b)	Panitera Penganti	Panitera Penganti	
		Shidq Arif Slwantoko, A.Md.,kom/Pengatur (III/c)	Staf PN Maros	Staf PN Sengkang	
10	PN BULUKUMBA	Uwaisqarni, SH./198003262007041001/Penata Tk. I/III.d	Hakim PN Tenggarong	Hakim PN Bulukumba	
		Iwan Harry Winarto, SH.MH /197012171992031002/Pembina Tk. I /IV.b	Hakim PN Sragen	Hakim PN Bulukumba	
		Nursinah, SH. MH./197305022006042001/Penata Tk. I /III.d	HAKIM PN Kenadari	Hakim PN Bulukumba	
		Akhmad Basir, SH./197601312001121003/Penata III.c	Panmud Pidana PN Bantaeng	PP PN Bulukumba	
		Nawir, SH./197202041993031002/Penata III.c	Panmud Perdata PN Sungguminasa	Panmud Hukum PN Bulukumba	
		Sera Achmad, SH. MH. / 197910252005022001/ Pembina IV.a	Hakim PN Kendari	Hakim PN Bulukumba	
		Khoiruman Pandu K. Harahap, SH.MH./197508161999031003/Pembina Tk. I /IV.b	WKPN Sukoharjo	KPN Bulukumba	
11	PN PANGKAJENE	FARID HIDAYAT SOPAMENA, SH., MH / NIP. 19760214 200112 1 004 / Pembina TK.I /IV.b	Ketua PN Pangkajene	Hakim PN Makassar	
12	PN BARRU	CAHYONO RIZA ADRIANTO, SH.MH / Nip.197411052001121004/ Pembina Tk. I (IV/b)	Ketua PN Barru	Wakil Ketua PN Manokwari	
		HJ. ST. NORMAH, SH / Nip. 1963032011985032004 (III/d)	Panitera	PP Pengadilan Tinggi Makassar	
		HENGKI KURNIAWAN, SH. MH / Nip. 198012222002121002/ Pembina (IV/a)	Wakil Ketua PN Barru	Wakil Ketua PN Pacitan	
13	PN PAREPARE	SAMSIDAR NAWAWI, S.H.,M.H./NIP. 197705262000122002/Pembina (IV/a)	Hakim PN Makassar	Ketua PN Parepare	
		HASMA H., S.E.,S.H./NIP. 196805151992032002/Penata Tk.I (III/d)	Panitera PN Pinrang	Panitera PN Parepare	

14	PN SIDENRENG RAPPANG	-	-	-	
15	PN PINRANG	ADIL KASIM, S.H., M.H./197511122001121002/Pembina (IV/a)	Wakil Ketua Pengadilan Negeri Bulukumba kelas IB	Ketua	
		ANDI NUR HASWAH, S.H./198112162008052001	Hakim Pengadilan Negeri Sengkang Kelas IB	Hakim	
		ANDI AQSHA, S.H./198201302007041001/Penata Tk.I (III/d)	Hakim Pengadilan Negeri Tuban Kelas IB	Hakim	
		ANDI MUHAMMAD REFILL, S.H./196901141989031001/Penata Tk.I (III/d)	Panitera Pengadilan Negeri Kolaka Kelas IB	Panitera	
		LEILA MASDANI HARAPAH, S.KOM/198805072015032001/Penata Muda Tk.I (III/b)	Staf Pengadilan Tinggi Medan	Staf PTIP	
16	PN TAKALAR	Hj. Aisyah Adama, S.H., M.H. 198506302009042010 Penata (III/c)	Hakim PN Takalar	Hakim PN Sengkang	
		Nurrachman Fuadi, S.H., M.H. 198512172009121004 Penata (III/c)	Hakim PN Takalar	Hakim PN Wonosari	
		Ria Handayani, S.H., M.H. 198303012009122001 Penata (III/c)	Hakim PN Takalar	Hakim PN Bulukumba	
17	PN JENEPONTO	ARIEF KARYADI, S.H., M.Hum. 19760829 200003 1 001 Pembina Tk. I (IV/b)	Hakim PN Malang	KETUA	
		RIZAL TAUFANI, S.H., M.H. 19770407 200312 1 001 Pembina (IV/a)	Ketua PN Koba	Wakil Ketua	
18	PN BANTAENG	Imran Marannu Iriansyah, S.H. 198404212009041004 Penata Tk.I (III/d)	Hakim PN Tarakan	Hakim PN Bantaeng	
		Waode Sangia, S.H. 198007232008052001 Penata Tk.I (III/d)	Hakim PN Bau-bau	Hakim PN Bantaeng	
		Ujang Irfan Hadiana, S.H. 197805292002121005 Pembina (IV/a)	Hakim PN Bale Bandung	Ketua PN Bantaeng	
19	PN SINJAI	Andi Muh Amin AR, S.H./198502282009041008 Penata Tk.I (III/d)	Hakim	Hakim	
		AGUNG NUGROHO SURYO SULISTIO, S.H., M.Hum / 197602072001121003	Hakim	Ketua	
20	PN WATANSOPPENG	RAKHMAD DWINANTO, S.H., M.H. / 197704292002121003 / (IV/a)	Wakil Ketua	Ketua PN Nunukan	
		AHMAD ISMAIL, S.H., M.H. / 197412162000121001 / (IV/b)	Ketua	Wakil Ketua PN Palopo	
		H. MUHAMMAD ANSAR PADU, S.H., M.H. / 196211021983111001 / (IV/a)	Panitera	Panitera Pengganti PT Makassar	
		SULAEMAN, S.H. / 197112311992031017 / (III/d)	Panitera Muda Pidana	Panitera Muda Hukum	
		NURFADHILAH, S.H. / 198802102011012013 / (III/c)	Panitera Pengganti	Panitera Pengganti PN Sinjai	
		FITRIANA, S.H., M.H. / 198311202007042001 / (III/d)	Hakim	Hakim PN Bulukumba	
21	PN SELAYAR	MOCHAMMAD FATKUR ROCHMAN, SH. MH/197705272002121004/IV. a	Hakim	Ketua PN Selayar	
22	PN MALILI	KHAIRUL, S.H., M.H./197911132002121003 Pembina Tk.I (IV/d)	Wakil PN Maros	Ketua PN Malili	
		Andi Muhammad Ishak, S.H./198407152008051001 Penata Tk.I (III/d)	Hakim PN Lamongan Kelas IB	Hakim PN Malili	
		Mahyudin, S.H./198203152008051001 Penata Tk.I (III/d)	Hakim PN Kediri Kelas IB	Hakim PN Malili	
		Reno Hanggara, S.H./198603212009121005/ Penata (III/c)	Hakim PN Sumbawa Besar	Hakim PN Malili	
		Novalista Ratna Hakim, S.H., M.H./198611272011012024 Penata (III/c)	Hakim PN Pangkep	Hakim PN Malili	

		ARMAN, S.H./197205301993031001	Panitera PN Polewali	Panitera PN Malili	
		Penata Tk.I (III/d)			
		HARIYANTO VALENTINO TAMBUNAN, S.H./198601102012121001	Staf PN Sei Rampah	Kepala Sub Bagian PN Malili	
		Penata (III/c)			
23	PN MASAMBA	OKI BASUKI RACHMAT, SH., MM., MH./197510252001121004/ Pembina(IV/a)	KETUA PN BANGKALAN	KETUA PN MASAMBA	
24	PN ENREKANG	Karsena, S.H., M.H./197204271993031003	Ketua Pengadilan Negeri Enrekang Kelas II	Wakil Ketua Sumbawa Besar Kelas IB	
25	PN POLEWALI	ADNAN SAGITA, S.H., M.Hum/198512202009041005/Penata Tk.I/IIId	Hakim PN. Kediri	Hakim PN. Polewali	
26	PN MAJENE	MEDI RAPI BATARA RANDA, S.H., M.H. 19800522 200312 1 001/ Pembina (IV/a)	Ketua PN. Tanjung Balai Karimung	Ketua PN. Majene	
27	PN PASANGKAYU	MUHAMMAD ALIM ABADI, SH/198611192012121001/Penata Muda Tk.I/III.b	Kasubbag Kepegawaian & Ortala PN Bulukumba	Kasubbag Kepegawaian & Ortala PN Pasangkayu	
		ANDI ABDURRAHMAT, A.Md/198111292009041002/Penata Muda/III.a	Panitera Pengganti PN Polewali	Panitera Pengganti PN Pasangkayu	
		TAUFIQ NUR ARDIAN, SH/199309152017121005/Penata Muda/III.a	Hakim PN Jenepono	Cakim PN Pasangkayu	
		DIAN ARTHA ULY P, SH/198508012011012018/Penata/III.c	Hakim PN Pangkajene	Hakim PN Pasangkayu	
		SYAIFUL RAMLI, SH., MH./198909192014031001/Penata Muda Tk.I/III.b	Panitera Pengganti PN Mamuju	Panitera Pengganti PN Pasangkayu	
28	PN BELOPA	I MADE YULIADA, S.H.,M.H.	HAKIM PN DENPASAR	KETUA PN BELOPA	
		TEGUH ARIFIANO, S.H.,M.H.	KETUA PN PINRANG	WAKIL KETUA PN BELOPA	
		MUHLISIN, S.H.	HAKIM PN NGAWI	HAKIM PN BELOPA	
		FIRMANSYAH, S.H.,M.H.	HAKIM PN KAB. MADIUN	HAKIM PN BELOPA	
		MUSLIMIN, S.H.	PANITERA PN WATANSOPPENG	PANITERA PN BELOPA	
		DURIANA DUDY PIRY	PENGADMINISTRASI HUKUM PN ENREKANG	PENGADMINISTRASI HUKUM PN BELOPA	

- PROMOSI

Promosi Jabatan

Yang dimaksud Promosi Jabatan adalah Mutasi dengan kenaikan jabatan, baik dari luar Sulawesi Selatan dan Barat maupun ke luar Sulawesi Selatan dan Barat atau dari dan ke Pengadilan Negeri di Sulawesi Selatan dan Barat sendiri.

Tabel III.11. Promosi Jabatan Tahun 2021

N O	SATUAN KERJA	NAMA / NIP	JABATAN	PROMOSI MENJADI	KET
		PANGKAT			
1	PT MAKASSAR	Ahmad Firdaus, S.Kom. NIP. 197902112009041002 III/d	Pelaksana Keuangan	Kepala Sub Bagian Kepegawaian dan TI	
2	PN MAKASSAR	ACHMAD RASJID, S.H NIP. 19740915 200003 1 001 GOL. IV/d Dr. Hj. ST. NAISJIAH, S.H., M.H. NIP.19680627 199203 2 002 GOL. IV/b MUHAMMAD ILYAS, S.H. NIP. 19750513 200112 1 003 GOL. III/d NURIYA AWAD, S.H. NIP. 19750330 200303 2 002 GOL. III/d	HAKIM PANITERA MUDA PERDATA PANITERA PENGGANTI PANITERA PENGGANTI	WAKIL KETUA PN TARAKAN PANITERA PN PARE PARE PANITERA MUDA HUKUM PN MAROS PANITERA MUDA PIDANA PN SUNGGUMINASA	
3	PN SUNGGUMINASA	-	-	-	
4	PN MAMUJU	1. Dr. Muhammad Sainal, S. H., M. H NIP. 196404001 199203 1 005 GOL. IV/d, 2. Budiansyah, S. H., M. H NIP. 1966312 199603 1 002 GOL. IV/c	1. KETUA PN MAMUJU 2. WAKIL KETUA	1. WAKIL KETUA PN MAKASSAR 2. KETUA PN MAMUJU	

5	PN WATAMPONE	SURACHMAT, SH.,MH. NIP. 1963032919870310 05 PEMBINA UTAMA MADYA (IV/d)	Ketua	Wakil Ketua PN. Bandung	
		I DEWA G. BUDHY D. A. S.H., M.H. NIP. 19730520199031002 PEMBINA TK. I (IV/b)	Hakim	Wakil Ketua PN. Bangkinang	
		HASMAWATI, S.H. NIP. 196401141984032001 PEMBINA (IV/a)	Wakil Panitera	Panitera Pengganti PT. Makassar	
		ABBAS LAHAMID, SH. NIP. 196811111991031003 PENATA TK.I (III/d)	Panmud Perdata	Panitera PN. Barru	
		JUMADIL, SH. NIP. 198209032005021001 PENATA (III/c)	Panitera Pengganti	Panmud Hukum PN. Sengkang	
6	PN MAROS	Mustamin, SH., MH./ NIP. 198308172009041010/ Penata Tk. I (III/d)	Hakim	Hakim Yustisial Biro Hukum Dan Hubungan Masyarakat Badan Urusan Administiras	
		Iswandi Andi Marzuki, SH. / NIP. 198109042009041005/ Penata Tk. I (III/d)	Panitera Muda Hukum	Panitera Muda Niaga PN Makassar	
		Andi Nirwan AY., SH./ NIP. 198704052009041003/ Penata (III/c)	Panitera Pengganti	Panitera Penganti PN Makassar	
		Rosanny Novianty Nika, SH./ NIP. 198509302011012015/ Penata Muda Tk. I (III/b)	Panitera Pengganti	Panitera Penganti PN Makassar	
7	PN MAKALE	Timotius Djemey. S.H./ NIP. 196008251994031001/ Pembina Utama Muda (IV/c)	Ketua	Hakim PN Makassar	
		Surya Laksemana, S.H./ NIP. 197701312001121002/ Pembina (IV/a)	Hakim	Hakim PN Balik Papan	
		Annender Carnova, S.H., M.Hum/ NIP.198104132006041004/Penata Tingkat I (III/d)	Hakim	Hakim PN Balik Papan	
		Chairil Anwar, S.H., M.Hum./ NIP.196808301996031002 / Pembina Utama Muda (IV/c)	Ketua	Wakil Ketua PN Palu	
		Anita Farhan, S.H./ NIP.198212092006042001 / penata tk i(III/d)	Panitera Pengganti	Panitera Pengganti Pn Sungguminasa	
8	PN PALOPO	Zakarias Sattu, S.H / NIP. 1969112920140812002 Penata Muda (III/a)	Staf Pelaksana	Jurusita Pengganti	
9	PN SENKANG	Andi Nurmawati,S.H./NIP.19740807199932002/Pembina TK 1 (IV.b)	wakil ketua Pengadilan Negeri Sengkang	ketua Pengadilan Negeri maros	
		Eka Herfiani.S.H./198208112009042006/Penata Muda TK.1 (III/b)	panitera penganti	panitera muda pidana	
		Andi Irriana D. sulolipu,S.H./19890821201403	Analisi peradilan	Panitera penganti	
10	PN BULUKUMBA	Adil Kasim, SH.MH. / 197511122001121002/Pembina Tk. I / IV.b	WKPN Bulukumba	KPN Bulukumba	
		Khoiruman Pandu K. Harahap, SH.MH. /197508161999031003/Pembina Tk. I / IV.b	KPN Bulukumba	WKPN Sukoharjo	
		Akhmad Basir, SH./197601312001121003/Penata III.c	Panmud Pidana PN Bantaeng	PP PN Bulukumba	
		Nawir, SH./197202041993031002/Penata III.c	Panmud Perdata PN Sungguminasa	Panmud Hukum PN Bulukumba	
11	PN PANGKAJENE	-	-	-	0
12	PN BARRU	-	-	-	0
13	PN PAREPARE	REZKI RINANDA,S.H./NIP.198504212006042002/Penata Muda Tk.I (III/b)	Jurusita Pengganti PN Parepare	Jurusita PN Parepare	
14	PN SIDENRENG RAPPANG				Nihil
15	PN PINRANG	ADIL KASIM,S.H.,M.H/197511122001121002/Pembina (IV/a)	Ketua Pengadilan Negeri Pinrang Kelas II	Wakil Ketua Pengadilan Negeri Bulukumba kelas IB	
		ANDI NUR HASWAH,S.H/198112162008052001	Hakim Pengadilan Negeri Pinrang Kelas II	Hakim Pengadilan Negeri Sengkang Kelas IB	
		ANDI AQSHA,S.H/198201302007041001/Penata Tk.I (III/d)	Hakim Pengadilan Negeri Pinrang Kelas II	Hakim Pengadilan Negeri Tuban Kelas IB	
		ANDI MUHAMMAD REFILL,S.H/196901141989031001/Penata Tk.I (III/d)	Panitera Pengadilan Negeri Pinrang Kelas II	Panitera Pengadilan Negeri Kolaka Kelas IB	
		LEILA MASDANI HARAPAH,S.KOM/198805072015032001/Penata Muda Tk.I (III/b)	Staf PTIP Pengadilan Negeri Pinrang Kelas II	Staf Pengadilan Tinggi Medan	
16	PN TAKALAR	0	0	0	

17	PN JENEPONTO	ARIEF KARYADI, S.H., M.Hum. 19760829 200003 1 001 Pembina Tk. I (IV/b)	Ketua PN Jeneponto	Hakim PN Malang	
		RIZAL TAUFANI, S.H., M.H. 19770407 200312 1 001 Pembina (IV/a)	Wakil Ketua PN Jeneponto	Ketua PN Koba	
		PATANUDDIN, S.H., M.H. 197912292003121001 Pembina (IV/a)	Hakim PN Bangil	Wakil Ketua PN Jeneponto	
18	PN BANTAENG	Akhmad Basir, S.H. 197601312001121003 Penata (III/c)	Panitera Pengganti PN BULukumba Kls I	Panitera Muda Pidana PN Bantaeng Kls. II	0
		Yusliana 198602032014082002 Pengatur Muda Tk.I (II/b)	Pengadministrasi Kependidikan Pembkab Bantaeng	Pengadinistrasi Hukum PN Bantaeng	Mutasi dari Instans i Luar
19	PN SINJAI	1. SIGIT SUSANTO, SH, MH/ 19810513 200312 1 001, 2. ERWIN SISWANTO, SH/ 19900310 201403 1004 , 3. MUH ALI ASBI, SH/ 198003022006041011	1. WAKIL KETUA PENGADILAN, 2. KASUBBAG UMUM DAN KEUANGAN, 3. ANALIS PERKARA PERADILAN	1. KETUA PENGADILAN NEGERI, 2. KASUBBAG KEPEGAWAIAN ORTALA, 3. KASUBBAG UMUM DAN KEUANGAN	
20	PN WATANSOPPENG	RISMAN ADI YUSUF / 198811102009121006 / (II/c)	Pengadministrasi Hukum	Jurusita Pengganti	
		SUBHAN ZAINAL MUTTAQIN, S.H., M.H. / 198403302009041004 / (III/d)	Jurusita	Kepala Sub Bagian Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana	
21	PN SELAYAR	-	-	-	
22	PN MALILI	KHAIRUL, S.H.,M.H./197911132002121003	Ketua PN Malili Kelas II	Wakil Ketua PN Maros Kelas IB	
		Andi Muhammad Ishak, S.H./198407152008051001	Hakim PN Malili Kelas II	Hakim PN Lamongan Kelas IB	
		Mahyudin, S.H./198203152008051001	Hakim PN Malili Kelas II	Hakim PN Kediri Kelas IB	
		Reno Hanggara, S.H./198603212009121005	Hakim PN Malili Kelas II	Hakim PN Sumbawa Besar Kelas IIB	
23	PN MASAMBA	OKI BASUKI RACHMAT, SH., MM., MH./ 197510252001121004/ Pembina (IV/a)	KETUA PN MASAMBA	KETUA PN BANGKALAN	
24	PN ENREKANG	Karsena, S.H., M.H./197204271993031003	Ketua Pengadilan Negeri Enrekang Kelas II	Wakil Ketua Sumbawa Besar Kelas IB	
25	PN POLEWALI	HAMZAH, S.H./197006161993031003/Penata IIIc	PLH. Panmud Hukum PN.Polewali	Panmud Hukum PN.Polewali	
		SRI KARTIKA SARI, S.ST/198602082008042003/Penata IIIc	Analisis Perencanaan Evaluasi dan Pelaporan PN. Polewali	Jurusita Pengganti PN. Polewali	
26	PN MAJENE	ANDI MUHAMMAD SYAHRUL K., M.H., M.H./19790705 200704 1 001	PP. PN. Majene	Panmud Hukum PN.Majene	
		HASNAH HASAN/ 19680321 198303 2 002	Panmud Hukum PN. Majene	Panmud Perdata PN. Majene	
		WAHYUNI MASRIN, S.E./ 19860427 201408 2 001	Staf Pelaksana PN. Majene	JSP PN. Majene	
27	PN PASANGKAYU	Muhammad Ali Akbar, SH/198209112009041008/Penata/III.c	Hakim PN Pasangkayu	Hakim PN Palopo	
		I Ketut Darpawan, S.H./198005242003121001/Pembina/IV.a	Hakim PN Palu	Wakil Ketua PN Pasangkayu	
		Nisfah, S.H./197308061993032003/Penata Tk.I/III.d	Panitera Muda Hukum PN Palu	Panitera Muda Hukum PN Pasangkayu	
		I G.N.A. Aryanta Era Winawan, S.H., M.H./197711142002121005/Pembina/IV.a	Ketua PN Pasangkayu	Hakim PN Denpasar	
28	PN BELOPA	JIHAN HASMIN, S.E.	PENYUSUN LAPORAN KEUANGAN PN BELOPA	PANITERA PENGGANTI PN BELOPA	

- **Demosi Jabatan**

Yang dimaksud Demosi Jabatan adalah Mutasi dengan penurunan jabatan, baik dari luar Sulawesi Selatan dan Barat maupun ke luar Sulawesi Selatan dan Barat atau dari dan ke Pengadilan Negeri di Sulawesi Selatan dan Barat sendiri.

----*Nihil*----

- **PENSIUN**

Pemberhentian Dengan Hormat dengan Hak Pensiun

Tabel III.12. Pensiun Tahun 2021

NO	SATUAN KERJA	NAMA / NIP	JABATAN	TMT	KET
		PANGKAT			
1	PT MAKASSAR	Poltak Pardede, S.H. NIP. 195402081985121001 Pembina Utama (IV/e)	HAKIM TINGGI	8 Februari 2021	
		A. Muhajering, S.H. NIP. 195902021986031008 Penata Tingkat I (III/d)	PANITERA PENGGANTI	2 Februari 2021	
		Firman, S.H., M.H. NIP. 195908281987031005 Pembina (IV/a)	PANITERA PENGGANTI	28 Agustus 2021	
		Nasaruddin Tappo, S.H., M.H. NIP. 195409031974071001 Pembina Utama (IV/e)	WAKIL KETUA	3 September 2021	
		Christina Tawera NIP. 196309061994032001 Penata Muda Tingkat I (III/b)	PELAKSANA KEPEGAWAIAN	9 Juni 2021	
		Masjidin, S.H., M.H. NIP. 195911201982031005 Pembina (IV/a)	PANITERA PENGGANTI	20 November 2021	
		Dakris, S.H. NIP. 195912311980121006 Penata Muda Tingkat I (III/b)	PELAKSANA KEPEGAWAIAN	9 Juni 2021	
2	PN MAKASSAR	Dra. PASIHA, M.H./NIP. 196103211986032011/PEMBINA	PANITERA PENGGANTI	21 Maret 2021	
		RAHMI, S.H./NIP. 196303281983032017/PENATA TK.I	JURUSITA PENGGANTI	28 Maret 2021	
		ROSMALA DEWI, S.H./NIP. 196110251983122001/PENATA TK.I	PANITERA PENGGANTI	25 Oktober 2021	
3	PN SUNGGUMINASA	-	-	-	
4	PN MAMUJU	H. YOYO HULUNG SANCOYO, S. H., M. H	HAKIM ADHOC PHI	1 April 2021	
5	PN WATAMPONE	-	-	-	
6	PN MAROS	Zainal Abidin/ NIP. 196110191985031002/Penata (III/c)	Panitera Pengganti	1 Januari 2021	
7	PN MAKALE	-	-	-	
8	PN PALOPO	HAMSINAH DAHLAN/NIP. 196103061992032001 Penata (III/c)	Panitera Pengganti	4 Januari 2021	
9	PN SENGKANG	Nurbaya/196212311987032002 penata(III/c)	kasubag Kepegawaian	1 April 2021	
10	PN BULUKUMBA	MALIKUL ADIL /196105191986031002/Penata III.c	Panitera Pengganti	1 Juni 2021	
11	PN PANGKAJENE	-	-	-	
12	PN BARRU	-	-	-	
13	PN PAREPARE	-	-	-	
14	PN SIDENRENG RAPPANG	-	-	-	
15	PN PINRANG	AGUS BUNGA/ 196107161983112001/Penata Muda Tk.I (III/b)	Panitera Muda Perdata	2 July 2021	

16	PN TAKALAR	-	-	-	
17	PN JENEPONTO	-	-	-	
18	PN BANTAENG	-	-	-	
19	PN SINJAI	-	-	-	
20	PN WATANSOPPENG	-	-	-	
21	PN SELAYAR	SALWIYAH/ 19611001 198311 2 001/ PENATA, III/c	PANITERA MUDA HUKUM	1 November 2021	
22	PN MALILI	-	-	-	
23	PN MASAMBA	HANAWATI, SH./ 196012311992032010/ Penata Tk.I (III/d)	Panitera Pengganti	1 Januari 2021	
24	PN ENREKANG	-	-	-	
25	PN POLEWALI	-	-	-	
26	PN MAJENE	Hj. SALMA PALOGAI, S.Pd.i/19601231 198311 2 002/Penata Tk.I (III/d)	Panitera Muda Perdata	1 Januari 2021	
27	PN PASANGKAYU	Andi Yusran, S.H./196405231985021001/Penata Tk.I/III/d	Panitera Muda Perdata	1 November 2021	
28	PN BELOPA	-	-	-	

- ***Pemberhentian dengan hormat tanpa hak pensiun / Pemberhentian Sementara dari Jabatan Organik***

NIHIL

- ***Pemberhentian tidak dengan hormat***

Nihil

- **Meninggal dunia**

Tabel III.13. Meninggal Dunia Tahun 2021

NO	SATUAN KERJA	NAMA / NIP	JABATAN	TANGGAL KEMATIAN	PENYEBAB KEMATIAN
		PANGKAT			
1	PT MAKASSAR	Muhammad Idris, S.H./ 196309151984031001/IV/a	PANITERA PENGGANTI	14 Juni 2021	SAKIT
2	PN MAKASSAR	IRBAR, S.H. NIP.196305091984031002 PENATA TK. I	PANITERA PENGGANTI	5 Juli 2021	SAKIT
3	PN SUNGGUMINASA	-	-	-	-
4	PN MAMUJU	ABBAS HASAN /NIP. 196512311983031003 PANGKAT III/c	JURU SITA	22 September 2021	STROKE
5	PN WATAMPONE	LA ODE MULAWARMAN, SH. MH. / NIP. 196412311995031013 /Pangkat Pembina Tk.I (IV/b)	Panitera	19 Maret 2021	Serangan Jantung
6	PN MAROS	-	-	-	-
7	PN MAKALE	-	-	-	-
8	PN PALOPO	-	-	-	-
9	PN SENGKANG	-	-	-	-
10	PN BULUKUMBA	-	-	-	-
11	PN PANGKAJENE	-	-	-	-
12	PN BARRU	AMIRA LAHAYA/ Nip.198902212017122001	Hakim	24-September - 2020	Covid
13	PN PAREPARE	-	-	-	-
14	PN SIDENRENG RAPPANG	-	-	-	-
15	PN PINRANG	-	-	-	-
16	PN TAKALAR	-	-	-	-
17	PN JENEPONTO	SILAMUDDIN, S.Hi/ 196302141987031003 Penata Tk. I (III/d)	Panitera Muda Perdata	28 July 2021	Penyakit
18	PN BANTAENG	-	-	-	-
19	PN SINJAI	AMRAN MUHAMMAD / 196307071984121001 Penata Tk.I (III/d)	Kasubag Kepegawaian Organisasi dan Tata Laksana	4 March 2021	Penyakit
20	PN WATANSOPPENG	-	-	-	-
21	PN SELAYAR	-	-	-	-
22	PN MALILI	-	-	-	-
23	PN MASAMBA	-	-	-	-
24	PN ENREKANG	-	-	-	-
25	PN POLEWALI	YULIANI, A.Md/ 198107272009042005/ Pengatur TK.I/IId	Jurusita	12 July 2021	Covid-19
26	PN MAJENE	-	-	-	-
27	PN PASANGKAYU	-	-	-	-
28	PN BELOPA	-	-	-	-

- **DIKLAT**

Berikut ini data tenaga teknis yang pernah mengikuti Diklat sebagaimana dalam Tabel III.14 di bawah ini

Tabel III.14.
Tenaga Tehnis Yang Pernah Mengikuti Diklat Peningkatan Profesionalisme Dan Pendidikan Formal Hukum (S1, S2 Dan S3)

NO	SATUAN KERJA	HAKIM			KEPANITERAAN / PP			KEJURUSITAAN		
		JUMLAH	DIKLAT PROF	DIKLAT FORMAL	JUMLAH	DIKLAT PROF	DIKLAT FORMAL	JUMLAH	DIKLAT PROF	DIKLAT FORMAL
1	PT MAKASSAR	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	PN MAKASSAR	12	12	0	6	6	0	0	0	0
3	PN SUNGGUMINASA	11	11	0	9	9	0	1	1	0
4	PN MAMUJU	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	PN WATAMPONE	7	7	0	5	5	0	3	3	0
6	PN MAROS	8	7	1	3	3	0	0	0	0
7	PN MAKALE	3	3	0	5	5	0	0	0	0
8	PN PALOPO	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	PN SENGKANG	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	PN BULUKUMBA	6	4	2	3	2	1	0	0	0
11	PN PANGKAJENE	4	2	2	4	2	2	0	0	0
12	PN BARRU	9	3	6	1	0	1	0	0	0
13	PN PAREPARE	21	10	11	9	8	1	1	1	0
14	PN SIDENRENG RAPPANG	0	0	0	2	0	2	1	0	1
15	PN PINRANG	3	3	0	0	0	0	0	0	0
16	PN TAKALAR	5	0	5	2	0	2	0	0	0
17	PN JENEPONTO	7	0	7	0	0	0	0	0	0
18	PN BANTAENG	7	0	7	3	0	3	0	0	0
19	PN SINJAI	3	0	3	1	0	1	0	0	0
20	PN WATANSOPPENG	2	0	2	0	0	0	0	0	0
21	PN SELAYAR	1	0	1	0	0	0	0	0	0
22	PN MALILI	5	2	3	2	2	0	1	1	0
23	PN MASAMBA	3	0	3	0	0	0	1	1	0
24	PN ENREKANG	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	PN POLEWALI	19	12	7	0	0	0	0	0	0
26	PN MAJENE	3	3	0	1	1	0	0	0	0
27	PN PASANGKAYU	2	0	2	2	0	2	0	0	0
28	PN BELOPA	2	2	-	3	2	1	0	0	0

Dari Tabel III.7 di atas, maka terlihatlah bahwa jumlah tenaga Teknis sebagian besar telah mengikuti pendidikan formal (S1, S2 dan S3) dan yang telah mengikuti Diklat peningkatan profesionalisme selama kurun waktu 2021, yaitu dengan rincian prosentase sebagai berikut :

Tabel III.15. Prosentase Tenaga Teknis yang telah mengikuti Diklat Peningkatan Profesionalisme

NO	JABATAN	JUMLAH	DIKLAT FORMAL		DIKLAT PROFESIONALISME	
			JUMLAH	PROSENTASE	JUMLAH	PROSENTASE
1	Hakim Tinggi / Hakim	143	81	56%	62	43%
2	Fungsional Kepaniteraan	61	45	73%	16	26%
3	Fungsional Kejurusitaan	8	7	87%	9	12%

Pengangkatan CAKIM / CPNS Baru Tahun 2021

Selama 2021 tidak terdapat penambahan calon hakim Peradilan Umum di Sulawesi Selatan dan Barat, sedangkan penambahan CPNS wilayah Sulawesi Selatan dan Barat sejumlah 53 (lima puluh tiga) orang.

Dari data tentang PNS yang pensiun, berhenti dan meninggal dunia (baik Teknis maupun Non Teknis) diketahuilah bahwa jumlah aparatur Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum se Sulawesi Selatan dan Barat telah **keluar/berhenti/meninggal sebanyak 8 orang, Pensiun sebanyak 20 orang, Jabatan yang kosong ada 291 orang**, sedangkan **yang masuk sebagai CPNS adalah sebanyak 53 orang**.

Dengan demikian, perbandingan antara Hakim/PNS yang berhenti ditambah jabatan yang kosong dengan Hakim/Cakim/CPNS baru adalah : $(291+20+8) : 319$. Jadi, di lingkungan peradilan umum se Sulawesi Selatan dan Barat ada kekurangan pegawai sebanyak 266 pegawai (53 orang – 319 orang).

BAB IV

PENGELOLAAN KEUANGAN, SARANA PRASARANA DAN TEKNOLOGI INFORMASI

A. Pengelolaan Keuangan

Tahun 2021 merupakan tahun keenam implementasi akuntansi pemerintahan berbasis akrual berdasarkan Pasal 7 Permenkeu RI Nomor: 117/PMK.05/2015 tanggal 21 September 2015 tentang Pedoman Penyusunan dan Penyampaian Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga disebutkan bahwa ketentuan dalam Peraturan Menteri ini digunakan untuk menyusun Laporan Keuangan Berbasis Akrual secara penuh mulai tahun 2015.

Akuntansi berbasis akrual ini tidak hanya dapat menghasilkan nilai beban yang telah dibayarkan oleh pemerintah, namun seluruh beban yang diperlukan sehingga biaya pelayanan publik dapat dihitung secara wajar. Dengan demikian pengelolaan uang negara dapat dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis dan transparan dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatuhan untuk mendukung keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan negara sesuai dengan amanat UUD 1945.

Untuk Anggaran Tahun 2021 Pengadilan Tinggi Makassar selaku Satuan Kerja mempunyai 2 (Dua) Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) yang terdiri dari :

1. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Badan Urusan Administrasi (01) Nomor : SP DIPA-005.01.2.099418/2021 tanggal 23 November 2020 dengan PAGU Anggaran sebesar Rp.30.344.224.000,- (*Tiga puluh milyar tiga ratus empat puluh empat juta dua ratus dua puluh empat ribu rupiah*).
2. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Badan Peradilan Umum (03) Nomor : SP DIPA-005.03.2.099419/2021 tanggal 23 November 2020 dengan PAGU Anggaran sebesar Rp.421.815.000,- (*Empat ratus dua puluh satu juta delapan ratus lima belas ribu rupiah*).

Adapun capaian pengelolaan anggaran Pengadilan Tinggi Makassar dan Peradilan Umum yang berada dibawahnya pada Tahun 2021 untuk **DIPA 01** adalah sebagai berikut:

Tabel IV.1. LRA DIPA 01 PT Makassar dan PN Se-Sulawesi Selatan dan Barat Tahun 2021

NO	KODE SATKER	NAMA SATKER	PAGU ANGGARAN			REALISASI ANGGARAN			PERSEN
			B. PEGAWAI	B. BARANG	B. MODAL	B. PEGAWAI	B. BARANG	B. MODAL	REALISASI
			(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	
1	099418	PT MAKASSAR	23,842,545,000	6,464,179,000	37,500,000	23,737,700,315	6,103,464,860	37,500,000	98,47%
2	099422	PN MAKASSAR	20,645,222,000	3,317,656,000	65,000,000	19,662,132,872	3,338,306,244	65,000,000	98.71%
3	099439	PN SUNGGUMINASA	8,986,506,000	1,288,547,000	23,390,300,000	8,926,807,623	1,229,453,916	23,210,789,561	99.11%
4	099464	PN TAKALAR	3,898,202,000	1,451,341,000	37,500,000	3,577,370,041	1,210,298,851	37,488,000	96,36%
5	099485	PN JENEPONTO	3,233,499,000	1,337,168,000	37,500,000	3,230,469,987	1,311,873,551	37,500,000	99.39%
6	099560	PN BANTAENG	3,295,134,000	1,148,515,000	37,500,000	3,293,820,153	1,123,063,288	37,500,000	99.40%
7	099471	PN MAROS	5,764,481,000	1,724,066,000	37,500,000	5,693,966,897	1,642,539,894	37,500,000	97.98%
8	099443	PN PANGKAJENE	3,874,638,000	1,674,954,000	37,500,000	3,779,772,572	1,661,834,629	37,500,000	98.07%
9	099450	PN BARRU	2,947,635,000	1,182,724,000	37,500,000	2,906,298,604	1,137,724,086	37,500,000	97.93%
10	099492	PN PAREPARE	4,335,066,000	1,587,561,000	37,500,000	4,317,436,996	1,585,571,450	37,500,000	99.67%
11	099511	PN SIDRAP	3,528,189,000	1,342,618,000	237,500,000	3,517,040,576	1,330,227,936	237,221,500	99.53%
12	099528	PN PINRANG	3,498,542,000	1,253,046,000	37,500,000	3,490,832,462	1,244,271,016	37,500,000	99,66%
13	099642	PN POLEWALI	2,704,593,000	1,396,973,000	37,500,000	2,697,999,894	1,388,669,796	37,500,000	99,65%
14	099507	PN ENREKANG	3,125,925,000	1,323,568,000	37,500,000	2,747,303,426	1,288,388,456	37,500,000	90.78%
15	099638	PN MAMUJU	5,377,146,000	1,788,498,000	537,500,000	5,333,227,949	1,787,535,283	532,532,000	99.35%
16	099621	PN MAJENE	2,486,780,000	1,048,519,000	1,525,000,000	2,380,958,082	1,002,199,788	1,500,542,700	98.40%
17	099549	PN WATANSOPPENG	2,695,367,000	1,463,649,000	37,500,000	2,512,936,606	1,454,233,766	37,497,900	95.43%
18	681422	PN PASANGKAYU	2,726,079,000	4,149,385,000	37,500,000	2,686,118,730	3,987,531,087	37,500,000	96,13%

19	099581	PN BULUKUMBA	3,881,469,000	1,446,073,000	37,500,000	3,873,739,499	1,445,759,005	37,500,000	99,85%
20	099595	PN SELAYAR	2,878,365,000	1,233,567,000	99,389,000	2,852,704,759	1,227,648,913	99,312,500	99.20%
21	099574	PN SINJAI	3,770,946,000	1,345,738,000	37,500,000	3,470,187,947	1,339,969,199	37,500,000	94.05%
22	099532	PN WATAMPONE	5,207,235,000	1,520,032,000	265,000,000	5,042,711,082	1,402,838,338	263,942,900	95.96%
23	099553	PN SENGKANG	3,825,445,000	1,386,991,000	37,500,000	3,849,301,888	1,331,571,776	37,500,000	99.95%
24	099600	PN PALOPO	3,338,508,000	1,303,290,000	237,500,000	3,247,675,764	1,268,344,775	237,085,100	97.31%
25	099617	PN MAKALE	3,767,592,000	1,222,403,000	37,500,000	3,767,358,069	1,214,137,869	37,500,000	99.83%
26	673013	PN MALILI	2,320,180,000	1,315,954,000	179,500,000	2,279,453,632	1,298,619,986	178,980,000	98.46%
27	672927	PN MASAMBA	2,311,050,000	1,257,967,000	37,500,000	2,290,667,532	1,235,298,719	37,500,000	98.81%
28	401928	PN BELOPA	2,662,730,000	1,034,510,000	19,037,624,000	2,636,075,816	1,033,912,736	19,034,636,313	99,87%

Adapun capaian pengelolaan anggaran Pengadilan Tinggi Makassar dan Peradilan Umum yang berada dibawahnya pada Tahun 2021 untuk **DIPA 03** adalah sebagai berikut:

Tabel IV.2. LRA DIPA 03 PT Makassar dan PN Se-Sulawesi Selatan dan Barat Tahun 2021

NO	KODE	NAMA SATKER	PAGU ANGGARAN B.BARANG (Rp)	REALISASI ANGGARAN B.BARANG (Rp)	PERSEN REALISASI %
1	099419	PT MAKASSAR	421,815,000	383,617,900	90.94%
2	099423	PN MAKASSAR	463,611,000	447,117,380	94.41%
3	099440	PN SUNGGUMINASA	109,780,000	102,743,350	93.59%
4	099465	PN TAKALAR	106,212,000	103,926,500	97,85 %
5	099486	PN JENEPONTO	85,920,000	85,472,800	99.48%
6	099561	PN BANTAENG	87,630,000	82,299,100	93.92%
7	099472	PN MAROS	135,720,000	127,864,800	94.21%
8	099444	PN PANGKAJENE	68,600,000	60,700,000	88.48%
9	099451	PN BARRU	57,040,000	54,001,200	94.67%
10	099493	PN PAREPARE	98,915,000	97,472,250	98.54%
11	099512	PN SIDRAP	76,136,000	75,629,400	99.33%
12	099529	PN PINRANG	98,916,000	98,580,590	99.66%
13	099643	PN POLEWALI	75,320,000	72,489,400	96.24%
14	099508	PN ENREKANG	96,180,000	89,775,000	93.34%
15	099639	PN MAMUJU	117,198,000	116,812,762	99.67%
16	099623	PN MAJENE	59,928,000	57,015,000	95.22%
17	099550	PN WATANSOPPENG	77,012,000	71,897,000	93.36%
18	681423	PN PASANGKAYU	57,135,000	56,755,700	99.34%
19	099582	PN BULUKUMBA	95,154,000	95,137,560	99.98%
20	099596	PN SELAYAR	170,888,000	170,146,200	99.57%
21	099575	PN SINJAI	110,154,000	106,726,800	96.89%
22	099533	PN WATAMPONE	117,384,000	113,795,000	96.94%
23	099554	PN SENGKANG	121,488,000	119,782,800	98.60%
24	099601	PN PALOPO	140,640,000	134,819,980	95.86%
25	099618	PN MAKALE	54,855,000	53,989,486	98.42%
26	673014	PN MALILI	80,936,000	79,353,900	98.05%
27	672928	PN MASAMBA	82,800,000	81,352,000	98.25%
28	402034	PN BELOPA	78,720,000	75,352,500	95.72%

B. Pengelolaan Sarana dan Prasarana

Aset BMN pada Pengadilan Tinggi Makassar dan Pengadilan Negeri se- Sulawesi Selatan dan Barat merupakan Barang Milik Negara yang dipergunakan dalam rangka menunjang pelayanan kepada masyarakat. Wujud dari BMN tersebut diantaranya tanah dan bangunan gedung kantor, tanah dan bangunan rumah negara, kendaraan dinas, peralatan kantor dan inventarisasi lainnya baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud yang berada pada 27 Satker.

Pengelolaan sarana dan prasarana gedung dan sarana prasarana fasilitas gedung berupa barang milik negara yang ada pada Peradilan Umum di Sulawesi Selatan dan Barat pada masing- masing Satker Pengadilan Negeri dilaksanakan oleh Sub Bagian Umum dan Keuangan sesuai dengan petunjuk Mahkamah Agung R.I. dan ketentuan peraturan perundangan – undangan yang berlaku.

Pengelolaan dan pengadaan Barang Milik Negara di lingkungan peradilan umum se-Sulawesi Selatan dan Barat wilayah Pengadilan Tinggi Makassar berupa sarana dan prasarana gedung maupun sarana dan prasarana penunjang Tugas dan Fungsi Peradilan untuk keadaan Tahun 2021 dapat kami laporkan sebagai berikut:

Tabel IV.3. Sarana/Prasarana Pengadilan Tinggi Makassar dan Pengadilan Negeri Se-Sulawesi Selatan dan Barat Tahun 2021

NO	SATKER	RUANG HAKIM	RUANG KEPANITERAAN	RUANG KESEKRETARIATAN
1	PENGADILAN TINGGI MAKASSAR	26	7	6
2	PENGADILAN NEGERI MAKASSAR	8	12	5
3	PENGADILAN NEGERI SUNGGUMINASA	4	7	4
4	PENGADILAN NEGERI PANGKAJENE	4	2	2
5	PENGADILAN NEGERI BARRU	1	5	4
6	PENGADILAN NEGERI TAKALAR	3	5	3
7	PENGADILAN NEGERI MAROS	3	8	8
8	PENGADILAN NEGERI JENEPONTO	1	6	4
9	PENGADILAN NEGERI PAREPARE	3	7	7
10	PENGADILAN NEGERI ENREKANG	4	5	5
11	PENGADILAN NEGERI SIDRAP	2	7	4
12	PENGADILAN NEGERI PINRANG	4	5	4
13	PENGADILAN NEGERI WATAMPONE	6	7	6
14	PENGADILAN NEGERI WATANSOPPENG	3	3	3
15	PENGADILAN NEGERI SENGKANG	4	5	4
16	PENGADILAN NEGERI BANTAENG	3	4	4
17	PENGADILAN NEGERI SINJAI	3	5	4
18	PENGADILAN NEGERI BULUKUMBA	1	6	4
19	PENGADILAN NEGERI SELAYAR	3	3	3
20	PENGADILAN NEGERI PALOPO	3	5	4
21	PENGADILAN NEGERI MAKALE	3	6	4
22	PENGADILAN NEGERI BELOPA	4	7	4
23	PENGADILAN NEGERI MALILI	4	4	3
24	PENGADILAN NEGERI POLEWALI	4	4	4
25	PENGADILAN NEGERI MAJENE	3	5	6
26	PENGADILAN NEGERI MAMUJU	5	7	4
27	PENGADILAN NEGERI PASANGKAYU	4	4	4
28	PENGADILAN NEGERI MASAMBA	1	4	4

Data Rumah Dinas Pengadilan Tinggi Makassar dan Pengadilan Negeri Se-Sulawesi Selatan dan Barat Tahun 2021 sebagai berikut:

Tabel IV.4. Rumah Dinas Pengadilan Tinggi Makassar dan Pengadilan Negeri Se-Sulawesi Selatan dan Barat Tahun 2021

NO	SATUAN KERJA	ALAMAT	LUAS (M2)
1	PENGADILAN TINGGI MAKASSAR	BOTOLEMPANGAN	580
		JL.BUNGAYA	470
		ANDI TONRO	300
		PENGAYOMAN F9/2	225
		RACING CENTER IV/1	200
		RACING CENTER IV/2	200
		RACING CENTER IV/3	200
		RACING CENTER IV/4	200
		PENGAYOMAN F9/3	225
		TODDOPULI RAYA NO.38	120
		TODDOPULI RAYA NO.40	120
		TODDOPULI RAYA NO: 44	120
		TODDOPULI RAYA NO:42	120
2	PENGADILAN NEGERI MAKASSAR	Jl. Urip Sumohardjo	167
		Jl. P. Kemerdekaan Km.9 BTN. HAmzy N.1/1	77
		Jl. P.Kemerdekaan Km. 9 BTN. Hamzy N1/10	100
		Jl. Veteran No. 398	70
		Jl. Manuruki II No. 55	90
		Jl. Manuruki II No. 53	73
		Jl. Manuruki II No. 53 A	89
		Jl. Manuruki II No. 53 B	73
		Jl. Rutan 5 B	100
		Jl. Rutan No. 5 A	100
		Jl. Rutan No. 5 C	100
		Jl. Rutan 5 D	100
		Jl. Rutan 5 E	100
		Jl. Pengayoman F9/3	107
		Jl. Pelita Raya Tengah I Blok A3/6C	76
		Jl. Pelita Raya Tengah I Blok A3/6D	76
		Jl. Pelita Raya Tengah I Blok A3/6F	76
		Jl. Pengayoman F11/5	74
		Jl. Pengayoman F 11/6	74
		Jl. Gatot Subroto Lr. I No. 3A, Mks	156
3	PENGADILAN NEGERI SUNGGUMINASA	ANDI TONRO	70
		ANDI TONRO	70
		ANDI TONRO	70
		HOS COKROAMINOTO	325
		ABD. RASYID DG. LURANG	81
		ABD. RASYID DG. LURANG	81
		KENANGA	70
		MESJID RAYA	70
		MESJID RAYA	70
		DR. WAHIDIN SUDIROHUSODO	80
		DR. WAHIDIN SUDIROHUSODO	80
		DR. WAHIDIN SUDIROHUSODO	80
4	PENGADILAN NEGERI PANGKAJENE	Jl. Sultan Hasanuddin No. 38	130
		Jl. Flamboyan No. 41	70
		Jl. Flamboyan No. 43	70
		Jl. Flamboyan No. 39	70
		Jl. Andi Mauraga No. 74	70
		Jl. Andi Mauraga No. 76	70
		Jl. Andi Mauraga No. 78	70
		Jl. Andi Mauraga No. 80	70
5	PENGADILAN NEGERI BARRU	Jl. COKROAMINOTO NO. 37	88
		JL. A. M. AKBAR NO. 33	91
		JL. H. LANAKKA NO. 4	43
		JL. MASJID RAYA NO. 32	83
		JL. MASJID RAYA NO. 34	80
		JL. MASJID RAYA NO. 36	80

		JL. MASJID RAYA NO. 38	83
		JL. MASJID RAYA NO. 44	80
		JL. MASJID RAYA NO. 46	80
6	PENGADILAN NEGERI TAKALAR	Sultan Hasanuddin No. 172	77
		Sultan Hasanuddin No. 176	77
		Sultan Hasanuddin No. 170	77
		Sultan Hasanuddin No.2	80
		Sultan Hasanuddin No.3	80
		Sultan Hasanuddin No.5	84
		Kartini No. 2/138	165
		Kartini no. 140	80
		Sultan hasanuddin No. 174	77
		Fitrah	700
7	PENGADILAN NEGERI MAROS	Jl. Abbas Dg. Sialu	179
		Jl. Beringin	116
		Jl. Ratulangi	81
		Jl. Ratulangi	78
		Jl. Ratulangi	78
		Jl. Ratulangi	78
		Jl. Taqwa	73
		Jl. Taqwa	72
		Jl. Lanto Dg. Pasewang	343
		Jl.Beringin	70
8	PENGADILAN NEGERI JENEPONTO	LANTO DAENG PASEWANG	81
		LANTO DAENG PASEWANG	130
		PAHLAWAN	72
		PAHLAWAN	72
		PAHLAWAN	72
		PAHLAWAN	72
		PAHLAWAN	74
		KAMBOJA	77
9	PENGADILAN NEGERI PAREPARE	JL. ABUBAKAR LAMBOGO	177
		JL. VETERAN 31	268
		PERSADA INDAH NO. 7	72
		BERINGIN NO. 13	75
		JL. BERINGIN NO. 15	75
		JL. JEND. SUDIRMAN NO. 53	91
		JL. JEND. SUDIRMAN NO. 41 A	80
		JL. PERSADA INDAH NO. 05	72
		JL. JEND. SUDIRMAN NO. 41	135
		JL. PERSADA INDAH NO. 03	72
		VETERAN NO. 30 A	87
10	PENGADILAN NEGERI ENREKANG	Jl. SILIWANGI	70
		Jl. SILIWANGI	70
		JL. JENDERAL SUDIRMAN	70
		JL. JENDERAL SUDIRMAN	70
		JL. JENDERAL SUDIRMAN	70
		JL. JENDERAL SUDIRMAN	70
		JL. PATTIMURA	70
		JL. JENDERAL SUDIRMAN	70
		JL. LASINRANG NO. 2	70
11	PENGADILAN NEGERI SIDRAP	Jl.Abd.Gani Rasul	70
		Jl.Andi Makkasau	126
		Lanto Dg Pasewang Lr	83
		Jl.Andi Makkasau	70
		Lt.Dg Pasewang Lr	86
		Lanto Dg Pasewang	109
		Abd Gani Rasul	82
		Lanto Dg Pasewang	70
		Lanto Dg Pasewang	70
12	PENGADILAN NEGERI PINRANG	GATOT SUBROTO NO. 18	72
		GATOT SUBROTO NO. 20	72
		GATOT SUBROTO NO. 22	72
		GATOT SUBROTO NO. 24	72
		GATOT SUBROTO NO. 12	72
		GATOT SUBROTO NO. 10	75
		MT. HARYONO NO. 2	83
		JEND. SUKAWATI NO. 38A	100
		JENDERAL SUKAWATI NO. 38B	73

		GATOT SUBROTO NO. 14	72
13	PENGADILAN NEGERI WATAMPONE	JL. HOS COKROAMINOTO	70
		JL. HOS COKROAMINOTO	70
		JL. HOS COKROAMINOTO	70
		JL. HOS COKROAMINOTO	70
		JL. M.H TAMRIN	83
		JL. HOS COKROAMINOTO	83
		Jl. Lanto Dg. Pasewang	95
		Jl. Yos Sudarso	83
		Jl. Lanto Dg. Pasewang	207
14	PENGADILAN NEGERI WATANSOPPENG	JL. ABDUL MUIS	82
		A. WANA	72
		SAMUDERA	106
		BALUBU	95
		MERDEKA	95
		MALAKA	70
		MALAKA	70
		MERDEKA	70
		MERDEKA	70
15	PENGADILAN NEGERI SENGKANG	VETERAN NO. 46 SENGKANG	95
		JL. BAU BAHARUDDIN	70
		JL. BAU MAHMUD	70
		PENGADILAN	70
		PENGADILAN	70
		PENGADILAN	70
		PENGADILAN	70
		A MACCA NO.89	80
		A.MACCA AMIRULLAH	80
16	PENGADILAN NEGERI BANTAENG	Jln. Sungai Bialo No. B22	72
		Jln. Sungai Bialo No. B5/22	72
		JLN. SUNGAI BIALO NO. B2	72
		JLN. SUNGAI BIALO NO. B 24	72
		JLN. SUNGAI BIALO NO. 18	72
		JLN. SUNGAI BIALO B 20	72
		JLN. TERATAI LORONG NO. 17	72
		JLN. KENANGA	72
		JLN. KENANGA	74
17	PENGADILAN NEGERI SINJAI	Mading Mathan 7	70
		Abu Bakar AT. no. 8	70
		Mading Mathan No. 9	70
		Tassililu, Sinjai Barat	70
		Jend. Sukowati	90
		Mading mathan No. 5	70
		Abu Bakar AT No. 6	70
		KI HAJAR DEWANTARA	80
		PERSATUAN RAYA	226
		PERSATUAN RAYA	80
		PERSATUAN RAYA	50
18	PENGADILAN NEGERI BULUKUMBA	JALAN KENARI NO.11	72
		Matahari No.3	108
		JALAN. MATAHARI NO.5	84
		JALAN .S. MAJIDI NO.26	83
		JALAN MATAHARI NO.1	72
		JALAN .Anggrek NO. 21	233
		JALAN . MELATI NO.9	72
		JALAN ANGGREK NO.19	308
		JALAN CENDANA No. 2 A	72
		JALAN . CENDANA . NO 2B	72
		JALAN .CENDANA NO.2	72
19	PENGADILAN NEGERI SELAYAR	Siswomiharjo No.47 Benteng	113
		Siswomiharjo No.23A	73
		Siswomiharjo No.23A	73
		Siswomiharjo No.25	73
		Siswomiharjo No.27	73
		Siswomiharjo No.29	73
		Siswomiharjo No.45	72
		Siswomiharjo No.47	72
		DR. MUhtar No.2	104
20	PENGADILAN NEGERI PALOPO	Andi Djemma No. 139	120

		Tandipau No. 53	120
		K.H. Ahmad Razak	112
		K.H. Ahmad Razak	112
		K.H. Ahmad Razak	112
		K.H. Ahmad Razak	112
		Tandipau No. 2	110
		Tandipau No. 6	90
21	PENGADILAN NEGERI MAKALE	Jln.Pongtiku no.112 Makale	70
		Jln.Pongtiku no.112 Makale	70
		Jln.Pongtiku no.112 Makale	70
		Jln.Pongtiku no.112 Makale	70
		Jln.Pongtiku no.112 Makale	70
		Jln.Pongtiku no.112 Makale	70
		Jln.Pongtiku Makale	70
		Jln.Manggasa Makale	70
22	PENGADILAN NEGERI BELOPA	NIHIL	NIHIL
23	PENGADILAN NEGERI MASAMBA	NIHIL	NIHIL
24	PENGADILAN NEGERI MALILI	NIHIL	NIHIL
25	PENGADILAN NEGERI MAJENE	Jend. Sudirman No. 98	122
		Jend. Sudirman No. 142	74
		Jend. Sudirman No. 162	82
		Jend. Sudirman No. 164	82
		Khairil Anwar	82
		Surullah	74
		W.R. Monginsidi	79
		Melati	80
		Wahab Azasi	84
26	PENGADILAN NEGERI MAMUJU	ANDI PELANG No.12	125
		AP.PETTARANI NO.26	70
		URIP SUMOHARJO NO.15	73
		URIP SUMOHARJO NO.17	73
		KS TUBUN NO.23	73
		KS.TUBUN NO.25	73
		KS.TUBUN NO.38	75
		KS.TUBUN NO.40	75
		AKHMAD KIRAN NO.23	75
		AKHMAD KIRAN NO.25	75
27	PENGADILAN NEGERI POLEWALI	Ratulangi/poros mamasa no.32	70
		Ratulangi/poros mamasa No.34	70
		Ratulangi/poros mamasa no.36	70
		Ratulangi/poros Mamasa No.38	70
		Cendrawasih No. 48	70
		Cendrawasih no.50	70
		Cendrawasih no.52	70
		Cendrawasih No.3	70
		Mr,Muh. Yamin No.15	70
28	PENGADILAN NEGERI PASANGKAYU	Moh Hatta	764

Data Kendaraan Dinas Pengadilan Tinggi Makassar dan Pengadilan Negeri Se- Sulawesi Selatan dan Barat Tahun 2021 sebagai berikut:

Tabel IV.5 Data Kendaraan Dinas Pengadilan Tinggi Makassar dan Pengadilan Negeri Se-Sulawesi Selatan dan Barat Tahun 2021

- Roda 4

NO	SATKER	TIPE	KONDISI	PENANGGUNGJAWAB	KET
1	PENGADILAN TINGGI MAKASSAR	TOYOTA ALPHARD	Baik	KETUA	
		TOYOTA CAMRY	Baik	KETUA	
		TOYOTA FORTUNER	Baik	WAKIL KETUA	
		TOYOTA CAMRY	Baik	WAKIL KETUA	
		TOYOTA INNOVA	Baik	KASUB TURT	
		TOYOTA INNOVA	Baik	KASUB TURT	
		TOYOTA INNOVA	Baik	KASUB TURT	
		TOYOTA HIACE	Baik	KASUB TURT	
		TOYOTA ALTIS	Baik	PANITERA	
		TOYOTA VIOS	Baik	SEKRETARIS	
2	PENGADILAN NEGERI MAKASSAR	TOYOTA ALTIS	Baik	Ketua	
		TOYOTA INNOVA	Baik	Wakil Ketua	
		TOYOTA INNOVA	Baik	Panitera	
		TOYOTA VIOS	Baik	Sekretaris	
		TOYOTA KF80	Baik	Kabag Umum	
		TOYOTA KF83	Baik	Kasubag	
		TOYOTA KF70	Rusak Ringan	Kasubag	
3	PENGADILAN NEGERI SUNGGUMINASA	TOYOTA KF70	Rusak Berat	Sekretaris	
		TOYOTA INNOVA E	Baik	Wakil Ketua	
		TOYOTA AVANZA VELOZ	Baik	Panitera	
4	PENGADILAN NEGERI PANGKAJENE	TOYOTA INNOVA	Baik	Sekretaris	
		TOYOTA AVANZA	Baik	Panitera	
5	PENGADILAN NEGERI BARRU	TOYOTA KIJANG LX	Baik	Wakil Ketua	
		TOYOTA INNOVA E	Baik	Ketua	
		TOYOTA AVANZA VELOZ	Baik	Panitera	
6	PENGADILAN NEGERI TAKALAR	TOYOTA INNOVA E	Baik	Wakil Ketua	
		TOYOTA NEW AVANZA	Baik	Panitera	
7	PENGADILAN NEGERI MAROS	TOYOTA AVANZA	Baik	Panitera	
		TOYOTA INOVA	Baik	Wakil Ketua	
		TOYOTA KIJANG	Rusak Ringan	Sekretaris	
		TOYOTA RUSH	Baik	Ketua	PINJAM PAKAI
8	PENGADILAN NEGERI JENEPONTO	TOYOTA KIJANG LONG DELUXE	Rusak Ringan	Sekretaris	
		TOYOTA INNOVA	Baik	Wakil Ketua	
		TOYOTA AVANZA	Baik	Panitera	
		TOYOTA INNOVA	Baik	Ketua	PINJAM PAKAI
9	PENGADILAN NEGERI PAREPARE	TOYOTA INNOVA	Baik	Ketua	
		TOYOTA NEW AVANZA	Baik	Panitera	
		TOYOTA KV83	Baik	Sekretaris	
10	PENGADILAN NEGERI ENREKANG	TOYOTA KIJANG SUPER	Baik	Sekretaris	
		TOYOTA NEW AVANZA	Baik	Sekretaris	
		TOYOTA INNOVA	Baik	Sekretaris	
11	PENGADILAN NEGERI SIDRAP	MITSUBISHI PAJERO	Baik	Ketua	Pinjam Pakai
		TOYOTA INNOVA	Baik	Wakil Ketua	
		TOYOTA NEW AVANZA	Baik	Panitera	
12	PENGADILAN NEGERI PINRANG	TOYOTA INNOVA	Baik	Ketua	
		TOYOTA NEW AVANZA	Baik	Panitera	
13	PENGADILAN NEGERI WATAMPONE	FORTUNER	Baik	Ketua	Pinjam Pakai
		TOYOTA KIJANG	Rusak Ringan	Sekretaris	
		TOYOTA INNOVA	Baik	Wakil Ketua	

		TOYOTA AVANZA	Baik	Panitera	
14	PENGADILAN NEGERI WATANSOPPENG	TOYOTA INNOVA	Baik	Sekretaris	
		TOYOTA HILUX	Baik	Wakil Ketua	Pinjam Pakai
		TOYOTA KIJANG SUPER	Baik	Kasub Bagian Umum dan Keuangan	
		TOYOTA KIJANG STANDAR	Baik	Panitera	Pinjam Pakai
		TOYOTA NEW AVANZA	Baik	Sekretaris	
15	PENGADILAN NEGERI SENGKANG	TOYOTA KIJANG SUPER	Baik	KPB	
		TOYOTA INNOVA	Baik	KPB	
		TOYOTA NEW AVANZA	Baik	Panitera	
		TOYOTA FORTUNER	Baik	Ketua	Pinjam Pakai
		TOYOTA INNOVA	Baik	Sekretaris	Pinjam Pakai
16	PENGADILAN NEGERI BANTAENG	TOYOTA KIJANG SUPER	Rusak Ringan	Sekretaris	
		TOYOTA AVANZA	Rusak Ringan	Panitera	
		TOYOTA INNOVA	Rusak Ringan	Wakil Ketua	
17	PENGADILAN NEGERI SINJAI	TOYOTA INNOVA STD	Baik	Ketua	PINJAM PAKAI
		TOYOTA NEW AVANZA	Baik	Panitera	OPERASIONAL
		TOYOTA KIJANG	Baik	Sekretaris	OPERASIONAL
18	PENGADILAN NEGERI BULUKUMBA	TOYOTA INNOVA G	Rusak Ringan	Ketua	
		TOYOTA KIJANG	Rusak Ringan	Wakil Ketua	
		TOYOTA AVANZA	Rusak Berat	Panitera	
19	PENGADILAN NEGERI SELAYAR	TOYOTA KIJANG KF70	Rusak Ringan	PP	
		TOYOTA INNOVA E	Baik	Sekretaris	
		TOYOTA AVANZA	Baik	Panitera	
		TOYOTA INNOVA E	Baik	Kasubbag	PINJAM PAKAI
		MITSUBISHI EXPANDER	Baik	Ketua	
20	PENGADILAN NEGERI PALOPO	TOYOTA KIJANG SUPER	Baik	Sekretaris	
		TOYOTA INNOVA E	Baik	Ketua	
		TOYOTA AVANZA	Baik	Panitera	
21	PENGADILAN NEGERI MAKALE	TOYOTA FORTUNER	Baik	Ketua	PINJAM PAKAI
		TOYOTA INNOVA/E	Baik	Wakil Ketua	PINJAM PAKAI
		TOYOTA INNOVA/E	Baik	Sekretaris	
		TOYOTA AVANZA VELOZ	Baik	Panitera	
		TOYOTA AVANZA E-DRES	Baik	Kasub Bagian Umum dan Keuangan	
22	PENGADILAN NEGERI BELOPA	INNOVA	Baik	Ketua	PINJAM PAKAI
		TOYORA RUSH	Baik	Wakil Ketua	
		EXPANDER	Baik	Sekretaris	SEWA DARI MA
23	PENGADILAN NEGERI MALILI	TOYOTA INNOVA/E	Baik	Sekretaris	
		TOYOTA AVANZA/VELOZ	Baik	Panitera	
		TOYOTA INNOVA/G	Baik	Ketua	PINJAM PAKAI
24	PENGADILAN NEGERI POLEWALI	TOYOTA INNOVA/E	Baik	Sekretaris	
		TOYOTA AVANZA VELOZ	Baik	Panitera	
25	PENGADILAN NEGERI MAJENE	TOYOTA INNOVA/E	Baik	Ketua	
		TOYOTA KIJANG	Baik	Wakil Ketua	
		TOYOTA AVANZA G1.3	Baik	Panitera	
26	PENGADILAN NEGERI MAMUJU	TOYOTA INNOVA/E	Baik	Wakil Ketua	
		TOYOTA VELOZ	Baik	Panitera	
		TOYOTA INNOVA/E	Baik	Sekretaris	
27	PENGADILAN NEGERI PASANGKAYU	TOYOTA INNOVA/G	Baik	Ketua	DC 5 E
		TOYOTA AVANZA/G	Baik	Panitera	DC 444 E
28	PENGADILAN NEGERI MASAMBA	TOYOTA INNOVA/G	Baik	Ketua	
		TOYOTA AVANZA	Baik	Panitera	

- RODA 2

NO	SATKER	TIPE	KONDISI	PENANGGUNGJAWAB	KET
1	PENGADILAN TINGGI MAKASSAR	HONDA MEGAPRO	BAIK	STAF	OPERASIONAL
		HONDA MEGAPRO	BAIK	STAF	OPERASIONAL
		HONDA MEGAPRO	BAIK	STAF	OPERASIONAL
		HONDA SUPRA	BAIK	KASUB KEPEG	OPERASIONAL
		HONDA SUPRA	BAIK	STAF	OPERASIONAL
2	PENGADILAN NEGERI MAKASSAR	SUZUKI THUNDER 125	RUSAK RINGAN	SEKRETARIS	OPERASIONAL
		SUZUKI NEW SHOGUN	BAIK	JURUSITA	
		SUZUKI THUNDER	BAIK	STAF	
		HONDA MEGAPRO	BAIK	STAF	
		SUZUKI SHOGUN	BAIK	STAF	
		HONDA MEGAPRO	RUSAK RINGAN	STAF	
3	PENGADILAN NEGERI SUNGGUMINASA	HONDA CG110	RUSAK BERAT	SEKRETARIS	
		HONDA GLPRO	RUSAK BERAT	SEKRETARIS	
		HONDA MCB	RUSAK BERAT	SEKRETARIS	
		YAMAHA JUPITER MX	RUSAK RINGAN	KASUBBAG	
		YAMAHA 256	RUSAK RINGAN	KASUBBAG	
		YAMAHA 256	RUSAK RINGAN	PANMUD	
		YAMAHA 256	RUSAK RINGAN	KASUBBAG	
		HONDA NF125	RUSAK RINGAN	STAF	
4	PENGADILAN NEGERI PANGKAJENE	SUZUKI THUNDER	BAIK	STAF	
		SUZUKI THUNDER	BAIK	KASUBBAG	
		HONDA SUPRA X125	BAIK	KASUBBAG	
5	PENGADILAN NEGERI BARRU	HONDA MEGAPRO	BAIK	PANMUD	
		HONDA MEGAPRO	BAIK	PANMUD	
		HONDA MEGAPRO	BAIK	KASUBBAG	
		HONDA ASTREA	BAIK	PANMUD	
		HONDA MEGAPRO	BAIK	STAF	
6	PENGADILAN NEGERI TAKALAR	SUZUKI FL125	BAIK	SEKRETARIS	
		SUZUKI MF125	BAIK	KASUBBAG	
		YAMAHA JUPITER Z	BAIK	KASUBBAG	
		SUZUKI MF125	BAIK	KASUBBAG	
		YAMAHA JUPITER Z	BAIK	PANITERA	
		YAMAHA JUPITER Z	BAIK	PANITERA	
		HONDA GLPRO	BAIK	PANITERA	
		HONDA WIN100	RUSAK RINGAN	KPB	
7	PENGADILAN NEGERI MAROS	HONDA GL PRO	BAIK	KASUBBAG	
		YAMAHA MX	BAIK	KASUBBAG	
		HONDA SUPRA	BAIK	KASUBBAG	
8	PENGADILAN NEGERI JENEPONTO	HONDA CG110	RUSAK BERAT	KPB	
		HONDA GLPRO	RUSAK BERAT	KPB	
		SUZUKI THUNDER	RUSAK BERAT	KPB	
		SUZUKI THUNDER	RUSAK RINGAN	SEKRETARIS	OPERASIONAL
		YAMAHA JUPITER MX	BAIK	BENDAHARA	
		SUZUKI AXELO	BAIK	JURUSITA	
		YAMAHA MX CW	BAIK	JURUSITA	
9	PENGADILAN NEGERI PAREPARE	HONDA MEGA PRO	RUSAK BERAT	KPB	
		HONDA MEGA PRO	BAIK	PANMUD PIDANA	

		HONDA NV125	BAIK	KASUBBAG KEPEGAWAIAN	
		HONDA NV125	BAIK	SEKRETARIS	
		YAMAHA JUPITER CW	BAIK	PANMUD HUKUM	
10	PENGADILAN NEGERI ENREKANG	SUZUKI SHOGUN	BAIK	MUNIR	
		HONDA GL160	BAIK	EMIL SALIM	
		HONDA NF125	BAIK	RUSWIJAYA	
11	PENGADILAN NEGERI SIDRAP	HONDA CG110	RUSAK BERAT		sudah dilelang
		SUZUKI A1	RUSAK BERAT		sudah dilelang
		HONDA NF125	RUSAK RINGAN	KEPALA SUB BAGIAN	
		HONDA NF125	RUSAK RINGAN	PANMUD PIDANA	
		HONDA NC11B	BAIK	SEKRETARIS	
12	PENGADILAN NEGERI PINRANG	HONDA SUPRA	BAIK	STAF	
		SUZUKI SHOGUN	BAIK	STAF	
		SUZUKI THUNDER	BAIK	STAF	
		SUZUKI A100	RUSAK BERAT	KPB	
		SUZUKI AXELO	BAIK	KASUBBAG	
		SUZUKI AXELO	BAIK	KASUBBAG	
		SUZUKI AXELO	BAIK	SEKRETARIS	
13	PENGADILAN NEGERI WATAMPONE	HONDA SUPRA FIT	RUSAK RINGAN	STAF	
		HONDA SUPRA FIT	RUSAK RINGAN	JURUSITA PENGGANTI	
		HONDA MEGAPRO	RUSAK RINGAN	JURUSITA	
		YAMAHA MIO SOUL	RUSAK RINGAN	KASUBBAG	
		HONDA SUPRA 125	BAIK	BENDAHARA PENGELUARAN	
		HONDA SUPRA 125	BAIK	KASUBBAG	
		HONDA SPACY	BAIK	STAF	
14	PENGADILAN NEGERI WATANSOPPENG	SUZUKI UW125	BAIK	STAF	
		HONDA NF11C1	BAIK	JURUSITA PENGGANTI	
		SUZUKI EN125	BAIK	STAF	
		HONDA GLPRO	BAIK	JURUSITA PENGGANTI	
		HONDA CG110	RUSAK BERAT	KPB	
15	PENGADILAN NEGERI SENGKANG	HONDA CG110	RUSAK BERAT	KPB	
		HONDA GL-PRO	BAIK	STAF	
		HONDA MEGAPRO	BAIK	KASUBBAG	
		HONDA GL160	BAIK	PANMUD	
		HONDA CS124	BAIK	PANMUD	
		HONDA NF11C1	BAIK	PANMUD	
		SUZUKI GT125	RUSAK BERAT	KPB	
16	PENGADILAN NEGERI BANTAENG	HONDA CG110	RUSAK BERAT	KPB	
		SUZUKI SHOGUN	RUSAK BERAT	PANMUD	
		SUZUKI THUNDER	RUSAK RINGAN	STAF	
		SUZUKI SHOGUN	RUSAK RINGAN	KASUBBAG	
		HONDA SUPRA	RUSAK RINGAN	STAF	
17	PENGADILAN NEGERI SINJAI	HONDA KHARISMA	BAIK	PANMUD	OPERASIONAL
		SUZUKI SHOGUN	BAIK	KASUBBAG	OPERASIONAL
		SUZUKI AXELO	BAIK	PANMUD	OPERASIONAL
		SUZUKI SHOGUN	BAIK	STAF	OPERASIONAL

18	PENGADILAN NEGERI BULUKUMBA	YAMAHA JUPITER MX	RUSAK RINGAN	STAF	
		SUZUKI SHOGUN	RUSAK RINGAN	STAF	
		SUZUKI AXELO	RUSAK RINGAN	KASUBBAG	
		SUZUKI NEW ADDRESS	RUSAK RINGAN	KASUBBAG	
19	PENGADILAN NEGERI SELAYAR	HONDA A100	BAIK	KASUBBAG	
		HONDA CG110	RUSAK BERAT	KPB	
		HONDA WIN	RUSAK RINGAN	STAF	
		SUZUKI SHOGUN	BAIK	STAF	
		HONDA SUPRA	BAIK	STAF	
		HONDA SUPRA	BAIK	KASUBBAG	
20	PENGADILAN NEGERI PALOPO	HONDA CG110	RUSAK BERAT	KPB	
		HONDA NF125	BAIK	KASUBBAG	
		HONDA NF125	BAIK	KASUBBAG	
		HONDA SUPRA	BAIK	KASUBBAG	
		HONDA SPACY	BAIK	KETUA	
		HONDA NEW BLADE CW	BAIK	PANMUD	
		HONDA MEGAPRO	BAIK	PANMUD	
21	PENGADILAN NEGERI MAKALE	HONDA CG110	RUSAK BERAT	KPB	
		HONDA GLMAX	RUSAK RINGAN	STAF	
		HONDA MEGAPRO	RUSAK RINGAN	STAF	
		SUZUKI SHOGUN	BAIK	STAF	
		SUZUKI SHOGUN	BAIK	KASUBBAG	
		SUZUKI SHOGUN	BAIK	KASUBBAG	
22	PENGADILAN NEGERI BELOPA	YAMAHA CW F1	BAIK	PANITERA	
		YAMAHA AEROX	BAIK	KASUBBAG	
23	PENGADILAN NEGERI MALILI	JUPITER CW135	BAIK	SEKRETARIS	
		JUPITER CW135	BAIK	WAPAN	
		HONDA BEAT	BAIK	KEPALA BAGIAN	
24	PENGADILAN NEGERI POLEWALI	HONDA GLPRO	BAIK	KASUBBAG	
		SUZUKI THUNDER	RUSAK BERAT	KASUBBAG	
		SUZUKI GT125	BAIK	KPB	
		SUZUKI SHOGUN	BAIK	SEKRETARIS	
		HONDA NEW BEAT	BAIK	KASUBBAG	
25	PENGADILAN NEGERI MAJENE	HONDA NF125	BAIK	SEKRETARIS	
		HONDA NF125	BAIK	PANMUD	
		HONDA SUPRA X125	BAIK	PANMUD	
		HONDA NEW SUPRA 125	BAIK	PANMUD	
		HONDA MEGAPRO	BAIK	KASUBBAG	
26	PENGADILAN NEGERI MAMUJU	SUZUKI FD125	BAIK	KASUBBAG	
		SUZUKI FD125	BAIK	KASUBBAG	
		SUZUKI FD125	BAIK	PANMUD	
		YAMAHA VEGA	BAIK	PANMUD	
		HONDA NF125	BAIK	KASUBBAG	
		HONDA NF125	BAIK	KASUBBAG	
27	PENGADILAN NEGERI PASANGKAYU	YAMAHA MX KING	BAIK	KASUBBAG	
28	PENGADILAN NEGERI MASAMBA	HONDA SUPRA X125	BAIK	SEKRETARIS	
		HONDA VIERZA	BAIK	PANMUD	
		HONDA SUPRA X125	BAIK	STAF	

C. Pengelolaan Teknologi Informasi

Teknologi Informasi di era modern seperti saat ini sangatlah memiliki peranan penting dalam meningkatkan kualitas dan kuantitas Pengadilan sebagai lembaga Pelayanan Publik di Bidang Hukum.

Berdasarkan SK KMA No.1-144/KMA/SK/I/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan, maka di setiap pengadilan di Indonesia diwajibkan untuk memenuhi kebutuhan yang berhubungan dengan pelayanan tersebut. Baik itu perangkat keras maupun perangkat lunak. Teknologi informasi merupakan faktor penting pendukung kinerja instansi,

khususnya pada Pengadilan Tinggi Makassar. Saat ini fasilitas teknologi informasi pada Pengadilan Tinggi Makassar telah dioperasikan non-stop selama 24 jam setiap harinya. Sehingga pengisian data dan akses informasi dapat diakses setiap waktu oleh seluruh warga Pengadilan Tinggi Makassar di lingkungan kantor. Berikut akan diulas secara detail mengenai pengelolaan teknologi informasi pada Pengadilan Tinggi Makassar. Mayoritas hampir semua ketua pengadilan telah menetapkan Tim Teknologi Informasi dalam bentuk surat keputusan ketua pengadilan.

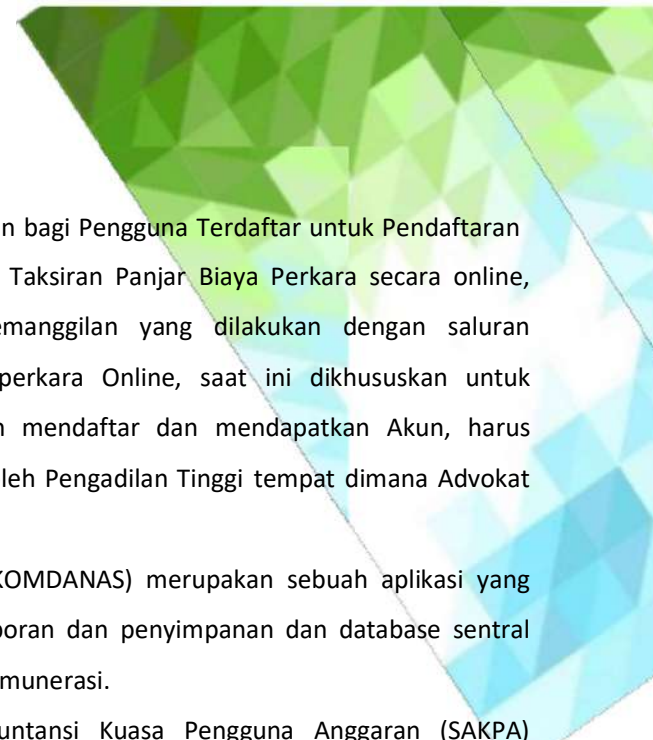
- Perangkat lunak

Perangkat lunak yang digunakan dalam pengadilan adalah:

1. Aplikasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP)

Perkara, ini merupakan aplikasi wajib yang harus dimiliki setiap pengadilan di Indonesia. Aplikasi ini digunakan sebagai aplikasi bantu register perkara dalam proses menuju pelaporan yang paperless. Selain itu aplikasi CTS versi web, bisa diakses oleh para pencari keadilan untuk mencari informasi perkara yang sedang berlangsung.

Sekarang ini sudah ada aplikasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara untuk tingkat pengadilan banding. Aplikasi ini menampung data banding yang dikirim oleh pengadilan tingkat pertama yang mengajukan banding dengan memasukkan data banding melalui aplikasi SIPP pada pengadilan tingkat pertama. Sehingga baik pengadilan tingkat pertama dan pengadilan tingkat banding sama-sama sudah memiliki aplikasi SIPP sehingga dapat menjadi alat kontrol pengadilan tingkat banding kepada pengadilan tingkat pertama.

- 
2. Aplikasi *e-Court*, *e-Court* adalah layanan bagi Pengguna Terdaftar untuk Pendaftaran Perkara Secara Online, Mendapatkan Taksiran Panjar Biaya Perkara secara online, Pembayaran secara online dan Pemanggilan yang dilakukan dengan saluran elektronik. Dalam hal pendaftaran perkara Online, saat ini dikhususkan untuk Advokat. Pengguna terdaftar setelah mendaftar dan mendapatkan Akun, harus melalui mekanisme validasi Advokat oleh Pengadilan Tinggi tempat dimana Advokat disumpah;
 3. Aplikasi Komunikasi Data Nasional (KOMDANAS) merupakan sebuah aplikasi yang berfungsi utama sebagai media pelaporan dan penyimpanan dan database sentral berisi data-data aset, keuangan, dan remunerasi.
 4. Aplikasi SAKPA, Aplikasi Sistem Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran (SAKPA) merupakan aplikasi keuangan untuk satker, yang menghasilkan sebuah laporan keuangan seperti laporan realisasi belanja, realisasi pendapatan dan realisasi2 lain yang berhubungan dengan keuangan.
 5. Aplikasi SIMAK-BMN aplikasi untuk pencatatan Aset, baik aset tetap berupa gedung dan bangunan, peralatan dan mesin, jalan dan irigasi maupun jaringan.. dan juga dapat mencatat aset2 tak berwujud seperti software komputer.
 6. Aplikasi Persediaan, adalah aplikasi khusus untuk pencatatan transaksi barang2 yang peruntukannya sebagai persediaan atau biasa disebut dengan barang habis pakai.
 7. Aplikasi gaji (GPP), Aplikasi ini sebenarnya memiliki 2 (dua) fungsi, yaitu sebagai aplikasi pencetakan dokumen perhitungan gaji pegawai PNS/Hakim/Polisi, dan juga sebagai aplikasi pendukung pada aplikasi RKAKL DIPA.
 8. Aplikasi RKAKL-DIPA, aplikasi ini merupakan aplikasi awal terkait dengan penyusunan dokumen Rencana Kerja Anggaran (RKA) Kementerian/lembaga.
 9. Aplikasi Forecasting Satker (AFS), Aplikasi ini merupakan bagian awal dari sebuah proses pelaksanaan anggaran.
 10. Aplikasi SPP-SPM, Aplikasi ini berfungsi untuk membuat dokumen tagih yang akan diajukan ke negara melalui KPPN.
 11. Website, semua pengadilan sudah memiliki website pengadilan masing-masing, tujuan dari website ini adalah sebagai bentuk pelayanan informasi publik.
 12. Sikep

- Implementasi e-court di lingkungan Peradilan Umum

Tahun 2021 untuk bidang kepaniteraan demi mendukung tujuan Mahkamah Agung RI menjadi peradilan berbasis teknologi diaplikasikan dengan peradilan berbasis elektronik melalui aplikasi E-Court. Dengan E-Court pendaftaran bisa melalui online web base atau fitur E-Filing, Perhitungan dan Pembayaran Eskum online atau fitur E-Payment, Pemanggilan Pihak secara online atau elektronik email dengan fitur E-summon, dan yang terakhir persidangan secara elektronik atau E-litigasi.

Pelaksanaan e-Court pada Pengadilan Negeri Se-Sulawesi Selatan dan Barat dan Pengadilan Tinggi Makassar sejauh ini telah berjalan lancar. Selanjutnya perlu adanya peningkatan instrumen pendukung e-Court berupa sosialisasi informasi e-Court kepada advokat maupun masyarakat pengguna e-Court seperti adanya banner, buku saku, brosur, dan media informasi lain tentang layanan e-Court.

Pada Tahun 2021 Pengadilan Tinggi Makassar telah melakukan sosialisasi informasi e-Court karena dengan menggunakan e-Court banyak kelebihan yang didapat, diantaranya adalah efisiensi waktu serta biaya e-Court lebih murah daripada persidangan konvensional. Dengan sistem ini juga nantinya bisa meminimalisir terjadinya korupsi dan pungutan liar, pasalnya intensitas para pencari keadilan untuk bertemu aparat keadilan otomatis berkurang. Dengan demikian integritas pengadilan menjadi terjaga.

Dasar hukum layanan e-Court adalah Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI nomor 129/KMA/SK/VIII/2019 tentang Petunjuk Teknis Administrasi Perkara Dan Persidangan Di Pengadilan Secara Elektronik dan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI nomor 271/KMA/SK/XII/2019 tentang Petunjuk Teknis Administrasi Perkara Dan Persidangan Di Pengadilan Tingkat Banding, Kasasi Dan Peninjauan Kembali Secara Elektronik, disampaikan sehubungan dengan telah tersedianya pengelolaan Aplikasi e-Court sebagai layanan bagi pendaftaran perkara secara online, di seluruh Pengadilan Negeri Se-Sulawesi Selatan dan Barat dan Pengadilan Tinggi Makassar sudah menggunakan aplikasi e-Court.

Tabel IV.6. Implementasi e-court di lingkungan Peradilan Umum Tahun 2021

NO	SATUAN KERJA	DAFTAR ONLINE	BAYAR	SKUM	GUGATAN	PERMOHONAN	BANTAHAN	GUGATAN SEDERHANA	TOTAL
1	PN MAKASSAR	720	720	720	402	226	23	48	720
2	PN SUNGGUMINASA	269	269	269	89	174	-	6	269
3	PN MAMUJU	82	82	82	30	40	4	8	82
4	PN WATAMPONE	83	83	83	46	26	0	11	83
5	PN MAROS	150	150	150	57	89	2	2	150
6	PN MAKALE	330	330	330	253	72	1	4	330
7	PN PALOPO	60	60	60	29	26	2	3	60
8	PN SENGKANG	118	118	118	48	58	3	9	118
9	PN BULUKUMBA	154	154	154	33	116	0	5	154
10	PN PANGKAJENE	46	56	56	32	19	0	5	56
11	PN BARRU	34	34	34	19	0	2	12	34
12	PN PAREPARE	114	114	114	35	78	0	1	114
13	PN SIDENRENG RAPPANG	66	66	66	40	22	4	0	66
14	PN PINRANG	52	52	52	23	15	5	9	52
15	PN TAKALAR	45	45	45	38	5	0	2	45
16	PN JENEPONTO	35	35	35	28	4	1	2	35
17	PN BANTAENG	18	9	9	9	16	1	2	28
18	PN SINJAI	19	19	19	19	79	1	0	156
19	PN WATANSOPPENG	34	34	34	11	21	0	2	34
20	PN SELAYAR	100	100	100	10	88	0	2	100
21	PN MALILI	85	85	85	58	23	0	2	83
22	PN MASAMBA	45	45	0	33	11	0	1	45
23	PN ENREKANG	43	43	43	17	25	0	1	43
24	PN POLEWALI	154	154	154	75	69	1	9	154
25	PN MAJENE	30	30	30	12	18	0	0	30
26	PN PASANGKAYU	25	25	25	11	15	0	0	25
27	PN BELOPA	81	81	81	26	54	1	0	81

- **Implementasi SIPP di lingkungan Peradilan Umum**

Untuk implementasi SIPP di lingkungan Peradilan Umum di wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Makassar dapat dilihat pada tabel di dibawah ini.

Tabel IV.7. Implementasi SIPP di lingkungan Peradilan Umum Tahun 2020

NO	SATUAN KERJA	SISA LALU	MASUK	PUTUS	SISA	RASIO PENANGANAN PERKARA
1	PN Makassar	866	3,170	3,262	774	80.82%
2	PN Sungguminasa	44	269	267	46	85.30%
3	PN Takalar	20	287	296	11	96%
4	PN Jeneponto	11	210	189	32	85.52%
5	PN Bantaeng	1	153	148	5	96%
6	PN Maros	41	2,079	2,083	25	98.25%
7	PN Pangkajene	51	403	409	45	91.29%
8	PN Barru	11	1,308	1,299	20	92.91%
9	PN Parepare	17	793	791	19	97.65%
10	PN Sidrap	22	349	328	43	88%
11	PN Pinrang	70	1,008	1,025	53	95.08%
12	PN Enrekang	26	113	117	22	84.17%
13	PN Watansoppeng	42	197	215	24	89.96%
14	PN Bulukumba	8	1,604	1,568	44	89.96%
15	PN Selayar	13	458	444	14	96.94%
16	PN Sinjai	23	124	125	22	99%
17	PN Watampone	33	292	296	29	91.08%
18	PN Sengkang	34	3,168	3,142	61	98.13%
19	PN Palopo	62	484	514	32	94.14%
20	PN Makale	84	532	527	89	85.55%
21	PN Malili	17	267	255	29	89.79%
22	PN Masamba	18	211	193	18	84.28%
23	PN Belopa	33	220	227	26	89.72%
24	PN Mamuju	76	3,436	3,436	76	97.83%
25	PN Polewali	30	3,251	3,328	33	101.43%
26	PN Majene	27	114	125	125	86%
27	PN Pasangkayu	14	236	209	27	88,55 %

BAB V

PENINGKATAN PELAYANAN PUBLIK

- Akreditasi Penjaminan Mutu

Dalam upaya meningkatkan pelayanan publik, Pengadilan Tinggi Makassar dan satker dibawahnya melakukan berbagai upaya demi mewujudkan visi Badan Peradilan Yang Agung. Salah satunya adalah mengikuti program Akreditasi Penjaminan Mutu Badan peradilan Umum. Akreditasi Penjaminan Mutu yang dibentuk Dirjen Badilum ini dimaksudkan untuk menjawab tantangan dan tuntutan masyarakat pada saat ini dan untuk mewujudkan Performa/Kinerja Peradilan Indonesia yang Unggul (Indonesian Court Performance Excellent/ICPE). Adapun kriteria penilaian yang digunakan meliputi tujuh area yaitu:

1. Kepemimpinan (leadership);
2. Perencanaan Strategis (strategic planning);
3. Fokus Pelanggan (customer focus);
4. Sistem Dokumentasi (document system);
5. Manajemen Sumber Daya (resource management);
6. Manajemen Proses (process management); dan
7. Hasil Kinerja (performance results).

Seluruh Pengadilan Negeri di wilayah hukum Pengadilan Tinggi Makassar telah diakreditasi dan pada tahun 2021 telah diassessment surveilance kecuali Pengadilan Negeri Enrekang karena terdapat temuan mayor atas penyalahgunaan keuangan APBN. Berikut rincian akreditasi Pengadilan Negeri di wilayah hukum Pengadilan Tinggi Makassar :

Tabel V.1. Peradilan Umum di Wilayah Pengadilan Tinggi Makassar Yang Telah Terakreditasi

NO	NAMA SATKER	KELAS	LOKASI	AKREDITASI
1	PT MAKASSAR	Type A	Makassar	A
2	PN MAKASSAR	Kelas 1 A Khusus	Makassar	A
3	PN SUNGGUMINASA	Kelas 1 A	Sungguminasa	A
4	PN TAKALAR	Kelas II	Takalar	A
5	PN JENEPONTO	Kelas II	Jeneponto	A
6	PN BANTAENG	Kelas II	Bantaeng	A
7	PN MAROS	Kelas I B	Maros	A
8	PN PANGKAJENE	Kelas II	Pangkajene	A
9	PN BARRU	Kelas II	Barru	A
10	PN PAREPARE	Kelas II	Parepare	A
11	PN SIDRAP	Kelas II	Sidrap	A
12	PN PINRANG	Kelas II	Pinrang	A
13	PN POLEWALI	Kelas II	Polewali	A
14	PN ENREKANG	Kelas II	Enrekang	A
15	PN MAMUJU	Kelas 1 A	Mamuju	B
16	PN MAJENE	Kelas II	Majene	A
17	PN WATANSOPPENG	Kelas II	Watansoppeng	A
18	PN PASANGKAYU	Kelas II	Pasangkayu	A
19	PN BULUKUMBA	Kelas I B	Bulukumba	A
20	PN SELAYAR	Kelas II	Selayar	A
21	PN SINJAI	Kelas II	Sinjai	A
22	PN WATAMPONE	Kelas 1 A	Watampone	A
23	PN SENGKANG	Kelas I B	Sengkang	A
24	PN PALOPO	Kelas I B	Palopo	B
25	PN MAKALE	Kelas I B	Makale	A
26	PN MALILI	Kelas II	Malili	A
27	PN MASAMBA	Kelas II	Masamba	A
28	PN BELOPA	Kelas II	Belopa	A

- **Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP)**

Dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat pencari keadilan dan guna mewujudkan pelayanan yang cepat, mudah, transparan, terukur, dan terjangkau Pengadilan Negeri Se-Sulawesi Selatan dan Barat dan Pengadilan Tinggi Makassar telah melaksanakan pelayanan yang dilaksanakan secara terintegrasi dalam satu kesatuan proses dimulai dari tahap awal sampai dengan tahap penyelesaian produk pelayanan terpadu melalui satu pintu, yang mana PTSP ini bertujuan untuk :

- a. Mewujudkan proses pelayanan yang cepat, mudah, transparan, terukur sesuai dengan standar yang telah ditetapkan;
- b. Memberikan pelayanan yang prima, akuntabel, dan anti korupsi, kolusi, nepotisme.

Prinsip dalam pelaksanaan PTSP yaitu :

- a. Keterpaduan;
- b. Efektif, Efisien, Ekonomis;
- c. Koordinasi;
- d. Akuntabilitas; dan
- e. Aksesibilitas.

Ruang lingkup PTSP meliputi seluruh pelayanan administrasi yang menjadi kewenangan Pengadilan Negeri maupun Pengadilan Tinggi sebagaimana diatur dalam Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor: 026/KMA/SK/II/2012 Tanggal 9 Februari 2012 tentang Standar Pelayanan Peradilan dan peraturan perundangan lainnya yang berlaku.

Pengadilan Negeri Negeri Se-Sulawesi Selatan dan Barat dan Pengadilan Tinggi Makassar telah menyediakan sarana keterbukaan informasi secara langsung bagi pengunjung berupa Pelayanan Terpad Satu Pintu (PTSP) yang terdiri dari Meja Pelayanan dan Meja Informasi, yang ada di bagian depan/lobi gedung pengadilan, berdasarkan SK. Ketua Pengadilan masing-masing setiap harinya telah ditunjuk petugas piket untuk meja informasi dan juga petugas pelayanan. Bagi pengunjung yang datang ke pengadilan petugas meja informasi yang akan memberi penjelasan ataupun mengarahkan masyarakat di meja mana akan mendapatkan layanan sesuai dengan yang dituju.

Pada perlombaan PTSP Tahun 2021 yang diselenggarakan Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum MA RI, Pengadilan Negeri Maros dan Pengadilan Negeri Parepare masuk dalam nominasi.

- **Inovasi Pelayanan Publik**

Untuk meningkatkan dan menjaga kemadirian dalam pemberian layanan kepada pencari keadilan beberapa Pengadilan Negeri Se-Sulawesi Selatan dan Barat telah menerapkan beberapa inovasi, diantaranya :

a. Penerapan Security Justice

Gedung Pengadilan Negeri telah menerapkan *security justice* dan *area steril* guna menindaklanjuti penerapan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM). *Security justice* yang dimaksud adalah jalur menuju masuk atau keluar dari ruang sidang tidak ada pertemuan antara pencari keadilan baik Jaksa, Pengacara, Terdakwa, Saksi maupun Penasehat Hukum dengan Majelis Hakim atau Panitera Pengganti. Sehingga memberikan rasa keamanan Majelis Hakim atau Panitera Pengganti.

b. Steril Area dan Himbauan Anti Gratifikasi Melalui Pengeras Suara

Sedangkan untuk area steril adalah area dimana pengunjung sidang atau pencari keadilan tidak bisa masuk ke area internal kantor Pengadilan Negeri, yang mana dapat memungkinkan terjadinya pembicaraan atau pertemuan untuk memberikan intervensi terkait dengan suatu perkara. Pelayanan yang diberikan seluruhnya harus melalui Meja PTSP. Area steril tersebut dilengkapi dengan kunci otomatis atau kunci elektrik yang menggunakan finger print atau kartu.

Dan juga himbauan kepada pencari keadilan untuk tidak memberikan gratifikasi kepada Aparatur Pengadilan Negeri melalui pengeras suara dengan sistem komputerisasi.

c. Website Resmi Untuk Sarana Informasi

Pengadilan Negeri juga telah mempunyai website resmi yaitu sebagai fasilitas dalam menerapkan keterbukaan informasi kepada publik, pencari informasi yang ingin mendapatkan informasi tentang Pengadilan Negeri tanpa harus mendatangi langsung dapat mengakses website resmi tersebut.

d. Ruang Tunggu Pelayanan

Disediakan Ruang Tunggu dimana pencari keadilan dapat beristirahat sejenak sambil menunggu antrian untuk mendapatkan layanan.

e. Anjungan Terpadu dan Pojok e-Court

Disediakan pula Anjungan Terpadu berupa komputer yang dapat mengakses layanan E-Court, Eraterang, SIPP, Website Pengadilan Negeri dan Aplikasi SIWAS. Selain itu anjungan terpadu tersebut sudah terhubung dengan jaringan internet sehingga apabila pencari keadilan ingin mendapatkan informasi yang lain dapat juga menggunakannya.

Disediakan pula Pojok E-Court untuk memudahkan para pencari keadilan dalam mendaftarkan perkara perdata secara online.

f. Pembayaran Panjar Biaya Perkara di Tempat

Disediakan pula *Payment Point* yang dapat dimanfaatkan oleh para pencari keadilan untuk melakukan pembayaran panjar biaya perkara perdata.

g. Anjungan Survey

Untuk mengetahui kualitas pelayanan pada masyarakat dan indeks persepsi korupsi di Pengadilan Negeri, telah disediakan anjungan survey kepuasan masyarakat dan survey persepsi korupsi.

h. Pelayanan Difabel

Untuk memberikan layanan kepada penyandang difabel, di Pengadilan Negeri juga disediakan sarana dan prasarananya.

Tabel V.2. Daftar Inovasi pada Pengadilan Negeri di Wilayah Pengadilan Tinggi Makassar

NO	NAMA	URAIAN	MANFAAT	PENGUNA LAYANAN
1	Pengadilan Negeri Makassar	Aplikasi SMS Gateway	Aplikasi untuk memberikan pelayanan informasi berupa : • info perkara • info tilang • notifikasi ke pegawai / eksternal • pemberitahuan perpanjangan penahanan • penundaan sidang • notifikasi jadwal sidang kepada jaksa • panggilan sidang kepada para pihak	Pegawai dan Masyarakat
		Aplikasi PN Makassar Mobile	PN Makassar Mobile adalah sebuah aplikasi yang dibuat untuk memberikan pelayanan informasi kepada masyarakat melalui aplikasi berbasis Android. Sehingga kemudahan akses informasi Pengadilan Negeri Makassar kepada masyarakat terpenuhi dengan membuka aplikasi PN Makassar Mobile.	Masyarakat
		Layanan Informasi Online melalui Whatsapp	Layanan informasi online secara realtime melalui whatsapp yang dapat diakses oleh masyarakat melalui Website Pengadilan Negeri Makassar. Whatsapp akan menjawab secara otomatis dengan mendeteksi kata kunci dari pertanyaan yang diajukan, seperti info perkara, jadwal sidang, informasi tilang, surat keterangan, e-Court, Panjar Biaya Perkara, dan lainnya.	Masyarakat
		Aplikasi Madeceng	Aplikasi e-Tracking Madeceng (Manajemen Data Persuratan Pengadilan) sebagai bentuk layanan Pengadilan Negeri Makassar untuk memberikan informasi yang cepat dan transparan dalam melakukan pencarian elektronik/penelusuran status tata kelola persuratan, sebagai wujud Visi Misi Pengadilan Negeri Makassar, terhadap keterbukaan Informasi Publik guna mewujudkan Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani.	Masyarakat
		Aplikasi Simonas	Aplikasi Sistem Monitoring dan Evaluasi Kinerja (Simonas) pada Pengadilan Negeri Makassar, bermanfaat dalam rangka penyediaan data monitoring menjadi lebih cepat, tepat, akurat dan responsif, kemudian Penyajian data monitoring lebih akurat, jika terjadi perbedaan dilapangan bisa ditangani dengan segera, Proses Evaluasi dapat dilakukan secara berjenjang dan dilaksanakan secara Periodik, setiap bulan, triwulan, semester dan Tahunan.	Pegawai dan Masyarakat
2	Pengadilan Negeri Sungguminasa	Info Tilang	Aplikasi pencarian perkara tilang pada Pengadilan Negeri Sungguminasa	Masyarakat
		Mobile Apps	Aplikasi berbasis web dengan mobile view untuk pencarian informasi perkara pada Pengadilan Negeri Sungguminasa	Masyarakat
3	Pengadilan Negeri Maros	SP5	Aplikasi ini digunakan untuk pengajuan izin penggeledahan, penyitaan, perpanjangan penahanan, pinjam pakai dan pelimpahan perkara. Selain itu juga digunakan untuk permohonan izin besuk, pembantaran dan ijin berobat.	Pengadilan, Kejaksaan, Polisi, Masyarakat
		2. SIRAD - Aplikasi ini merupakan aplikasi ramah difabel yang menyajikan informasi mengenai layanan-layanan yang ada di Pengadilan Negeri Maros.	Aplikasi ditujukan untuk penyandang disabilitas sehingga user interface dibuat mudah dan simpel sehingga memudahkan saat digunakan. Pada aplikasi ini terdapat fitur text to voice yang digunakan untuk mengubah informasi text menjadi suara. Untuk menggunakan fitur ini yaitu dengan cara menselect pada text informasi yang ada kemudian akan keluar suara	Masyarakat Umum dan Disabilitas
		3. Aplikasi PADAIDI - Pencarian Data & Informasi Denda Tilang	Aplikasi PADAIDI (Pencarian Data & Informasi Denda Tilang) adalah aplikasi yang dipergunakan untuk pencarian informasi tilang, dimana pihak yang ingin melakukan pencarian informasi tilang cukup memasukkan nama pelanggar atau nomor polisi kendaraan atau nomor blangko tilang ataupun nomor register, baik lengkap maupun sebagian kata/angka pada kolom yang disediakan.	Masyarakat Pencari Keadilan

		4. VIRA - Virtual Assitant PN Maros)	VIRA (Virtual Assitant PN Maros) adalah robot penjawab otomatis yang membantu untuk mengelola layanan informasi PN Maros. Aplikasi ini berupa WhatsApp Bot Auto Reply yang dirancang untuk membalas setiap pertanyaan dan menjawab sesuai dengan data yang ada di dalam database.	Masyarakat Pencari Keadilan dan Pegawai
4	Pengadilan Negeri Bulukumba			
5	Pengadilan Negeri Mamuju	E-Penyitaan, E-Penggeledahan, E-Perpanjangan Penahanan	Layanan secara elektornik untuk mengajukan permohonan surat izin Penyitaan, ijin Penggeledahan, dan Perpanjangan penahanan pada Pengadilan Negeri Mamuju	Penyidik Kepolisian dan Kejaksaan
6	Pengadilan Negeri Sengkang	SUTERA (Sistem Unggahan Terintegrasi)	Layanan yang mempermudah pengiriman dan pertukaran data persidangan. Yang terintegrasi	Jaksa Penuntut Umum, Majelis Hakim, PP, dan Penasehat Hukum.
		VIRA (VIRTUAL ASSISTANT)	VIRA (Virtual Assitant PN Sengkang) adalah robot penjawab otomatis yang membantu untuk mengelola layanan informasi PN Sengkang. Aplikasi ini berupa WhatsApp Bot Auto Reply yang dirancang untuk membalas setiap kata-kata yang mereka dapatkan dan menjawab sesuai dengan yang ada di dalam database PN Sengkang	Masyarakat Pencari Keadilan dan Pengguna Layanan Pengadilan
		PADAIDI (Pencarian Data & Informasi Denda Tilang)	Aplikasi PADAIDI (Pencarian Data & Informasi Denda Tilang) adalah aplikasi yang dipergunakan untuk pencarian informasi tilang, dimana pihak yang ingin melakukan pencarian informasi tilang cukup memasukkan nama pelanggar atau nomor polisi kendaraan atau nomor blangko tilang ataupun nomor register, baik lengkap maupun sebagian kata/angka pada kolom yang disediakan. Aplikasi ini terkoneksi dengan database SIPP, sehingga database tilang dalam aplikasi padaidi langsung mengambil dalam SIPP web dan tidak perlu dilakukan penginputan data manual	Masyarakat Pencari Keadilan dan Pengguna Layanan Pengadilan
7	Pengadilan Negeri Watampone	Aplikasi Tana Bangkalae	Aplikasi Tana Bangkalae yang merupakan Sistem Informasi Terpadu antara Pengadilan Negeri, Kepolisian, Kejaksaan, dan Lapas untuk manajemen pengiriman data permohonan penetapan ijin penyitaan, penggeledahan, perpanjangan penahanan, permohonan salinan putusan dan petikan putusan secara elektronk.	Pengadilan, Kejaksaan, Polisi, Masyarakat
		Aplikasi Maccani	Aplikasi Maccani, aplikasi ini adalah sebuah asisten virtual yang dapat memberikan informasi yang dibutuhkan oleh pengguna pengadilan baik internal dan eksternal. Untuk internal pengadilan negeri watampone dimana salah satu fiturnya dapat mengirimkan informasi Surat yang masuk ke Pengadilan Negeri Watampone melalui Whatsapp Ketua dan dan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Watampone untuk segera ditindaklanjuti. Untuk eksternal pengadilan Negeri Watampone fiturnya dapat memberi informasi tentang Informasi Perkara, Langganan Perkara, Informasi Layanan, Informasi Anggaran, Informasi Statistik, Informasi E-Court, Informasi Surat Keterangan, Informasi Kinerja, Informasi Evaluasi, Informasi Pengaduan, Informasi Corona.	Masyarakat Pencari Keadilan dan Pengguna Layanan Pengadilan
8	Pengadilan Negeri Palopo	eForm Pengadilan Negeri Palopo	Aplikasi yang mempermudah dalam bermohon Izin/Persetujuan Penggeledahan, Izin/Persetujuan Penyitaan, Perpanjangan Penahanan, dan Penetapan Diversi ke Pengadilan Negeri Palopo	Penyidik Kepolisian, Penyidik Kejaksaan, Penyidik Bea Cukai, Penyidik BNN
9	Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang	1. E-SIGAP (Elektronik Sistem Gapai Pelayanan PN SIDRAP)	Aplikasi E-SIGAP dirancang untuk memudahkan pengguna layanan dan pencari keadilan dalam mendapatkan akses pelayanan PN SIDRAP menggunakan teknologi informasi yang dapat meningkatkan pelayanan serta mencegah penyebaran COVID-19. Menu yang disediakan E-SIGAP antara lain Menu SIPP mobile yang menampilkan fitur statistik perkara, info gugatan, serta direktori putusan PN SIDRAP. Selain itu ada menu E-PTSP yang dapat mengakses E-COURT, ERATERANG, E-BESUK, E-TILANG, E-BROSUR, menampilkan jadwal persidangan, serta dapat juga mengisi survei yang mengarah langsung ke SISUPER. Melalui E-SIGAP pula, pengguna layanan dapat melakukan pengaduan atas penyimpangan yang terjadi di PN SIDRAP.	Masyarakat Pencari Keadilan dan Pengguna Layanan Pengadilan

		2. E-BESUK	Sistem izin tahanan yang diajukan secara online berbasis website dan terintegrasi dengan sistem database tahanan/terdakwa di Rutan. Aplikasi ini untuk mempermudah dan mempercepat pelayanan izin besuk dengan pelayanan yang prima, akuntabel, dan bebas dari KKN pada PN SIDRAP. Hadirnya aplikasi ini juga untuk meminimalisir adanya percaloan terkait pengajuan surat izin besuk tahanan.	Masyarakat Pencari Keadilan dan Pengguna Layanan Pengadilan
10	Pengadilan Negeri Pangkajene	E-Tilang	Aplikasi untuk melihat Pencarian Data Tilang yang masuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Pangkajene	Masyarakat Pencari Keadilan dan Aparat Penegak hukum
11	Pengadilan Negeri Barru	1. e-SPRINT (Surat Izin Penyitaan, Ijin Keluar Tahanan, Pengeledahan, dan Perpanjangan Penahanan)	Permohonan surat izin Penyitaan, ijin keluar tahanan, ijin pengeledahan, dan Perpanjangan penahanan secara elektronik	Pengadilan, Kepolisian, Kejaksaan dan Rutan
12	Pengadilan Negeri Pare-Pare	1. E-TAHAN	Meminimalisir waktu tatap muka petugas dan pengguna layanan sehingga resiko penularan COVID-19 dan praktik KKN dapat berkurang	Penyidik dan Penuntut Umum
		2. C-EKS	Meminimalisir waktu tatap muka petugas dan pengguna layanan sehingga resiko penularan COVID-19 dan praktik KKN dapat berkurang	Masyarakat Umum
13	Pengadilan Negeri Pinrang	SIGAPP (Surat Izin Pengeledahan, Penyitaan, Perpanjangan Penahanan, dan Pemberitahuan Putusan)	permintaan surat izin baik surat Izin Pengeledahan, Penyitaan, Perpanjangan Penahanan, dan Pemberitahuan Putusan secara online	Kepolisian,kejaksaan, Rutan
14	Pengadilan Negeri Majene	Virtual Assistant/Chatbox	Asisten virtual berupa chatbox yang terhubung langsung dengan petugas PTSP. Bertujuan membantu masyarakat pencari keadilan untuk dapat bertanya atau berkonsultasi secara langsung melalui website PN Majene tanpa harus datang ke kantor.	Masyarakat Pencari Keadilan
13	Pengadilan Negeri Polewali	AVANDI (Asisten Virtual Pengadilan Negeri Polewali)	Intelegensi buatan yang akan membantu Anda untuk mendapatkan informasi serta layanan di Pengadilan Negeri Polewali. Beberapa Informasi yang didapatkan adalah: Perkara,E-court,Elitigasi,Suket, Jadwal Dan Tilang.	Masyarakat pencari keadilan, Kejaksaan,Lapas Dan Kepolisian.
16	Pengadilan Negeri Pasangkayu	1. Whatsapp Interaktif (WA BOT)	Layanan Whatsapp dengan Sistem Auto Reply yang bertujuan untuk memudahkan Para Pencari Keadilan untuk mencari Informasi Seperti Jadwal Sidang, Info Perkara, Denda Tilang, Biaya Perkara dan beberapa informasi lainnya dengan lengkap. Whatsapp Interaktif ini sudah terintegrasi lewat Website, Instagram dan Facebook agar memudahkan para pencari keadilan mendapatkan Layanan ini	Masyarakat Pencari Keadilan
17	Pengadilan Negeri Makale	SIGUNAPERI(SISTEM PENGGUNA PENGADILAN NEGERI)	Memudahkan para pencari keadilan untuk mengakses layanan digital dari mahkamah agung, badilum, dan pn makale melalui smartphone	Masyarakat pencari keadilan
18	Pengadilan Negeri Malili	SI-EKO (Sistem Informasi Eksekusi Online)	Memudahkan para pencari keadilan untuk melakukan pendaftaran permohonan eksekusi di mana saja dan kapan saja.	Masyarakat pencari keadilan
19	Pengadilan Negeri Masamba	-	-	-
20	Pengadilan Negeri Watansoppeng	Anjungan PTSP dan Layanan informasi Mandiri	Anjungan PTSP dan layanan informasi digunakan untuk memudahkan para pencari keadilan yang datang ke Pengadilan Negeri Watansoppeng untuk memperoleh layanan online dan memudahkan pengunjung untuk mendapatkan informasi secara mandiri serta para aparatur Pengadilan Negeri Watansoppeng bisa langsung memberikan bantuan secara langsung dengan menggunakan komputer yang sudah disediakan.	Masyarakat Pencari Keadilan
		Asisten Virtual PTSP	Asisten virtual PTSP digunakan untuk memberikan kemudahan bagi masyarakat pencari keadilan untuk memperoleh informasi (informasi perkara, informasi biaya perkara, informasi e-court, informasi eraterang dll) hanya dengan cukup menggunakan whatsapp.	Masyarakat Pencari Keadilan
21	Pengadilan Negeri Jeneponto	1. Turatea Smart Court (Whatsapp Bot)	Aplikasi yang digunakan untuk memudahkan para pencari keadilan dan pegawai dalam mencari informasi, antara lain informasi mengenai perkara, denda tilang, e-court, e-litigasi, surat keterangan, jadwal persidangan pidana dan perdata, evaluasi SIPP.	Masyarakat dan Pegawai

22	Pengadilan Negeri Bantaeng	1. Aplikasi ANDALAN (Asisten Digital Aparatur Peradilan) :	merupakan aplikasi “peringat” bagi seluruh aparaturnya Pengadilan Negeri Bantaeng, khususnya dalam penanganan perkara. ANDALAN ini akan mengingatkan dengan dua acara, yaitu melalui grup resmi Pengadilan Negeri Bantaeng pada aplikasi whatsapp dan secara pribadi kepada pihak yang bersangkutan khususnya dalam penanganan perkara. Aplikasi ini juga menyampaikan informasi mengenai pengukuran kinerja pegawai khususnya Hakim, Panitera Pengganti dan Jurusita melalui grup resmi milik pengadilan Negeri Bantaeng melalui aplikasi Whatsapp. Aplikasi ini juga dapat diakses secara mandiri oleh Masyarakat luas dengan mengirimkan pesan melalui aplikasi whatsapp ke nomor +62 823-9444- 7782 dan langsung saja ketikkan “hai” maka setelah itu ANDALAN akan merespon secara otomatis. Meningkatnya pelayanan kepada masyarakat, Masyarakat lebih mudah mendapatkan Informasi Pengadilan setiap saat, Mengurangi interaksi antara petugas dan masyarakat secara langsung, Penyediaan data informasi perkara lebih real time dan validg tanpa harus mengurangi kualitas pelayanan, Monitoring dan penyelesaian pekerjaan lebih cepat, Aparatur Peradilan mempunyai asisten digital yang akan selalu mengingatkan beban pekerjaan masing- masing baik yang sudah selesai maupun yang harus segera diselesaikan, Efektifitas dan efisiensi penyelesaian perkara semakin meningkat, Pengawasan pimpinan terhadap kinerja aparaturnya pengadilan lebih maksimal	Pimpinan, Seluruh Aparatur Pengadilan, Kejaksaan, Pengacara, Masyarakat
		2. PTSP Online, merupakan aplikasi yang mereplika layanan PTSP secara langsung menjadi Online atau Daring	Mengurangi intensitas tatap muka dalam pemberian layanan sebagai adaptasi terhadap pandemic covid-19; Memudahkan masyarakat untuk mendapatkan Pelayanan Pengadilan Negeri Bantaeng dengan biaya murah, mudah dan transparan; Sebagai Call Center, menerima Tamu Virtual, dan terhubung ke beberapa aplikasi seperti Aplikasi ANDALAN, Informasi Jadwal Sidang, Aplikasi e-court, Aplikasi SIPP, Aplikasi eraterang, Aplikasi Direktori Putusan, Aplikasi e-Pasti	Masyarakat pengguna layanan
		3. e-PASTI (Elektronik Perkara Secara Terpadu dan Integrasi).	Mempermudah pihak terkait dalam melakukan izin dan persetujuan untuk Permohonan penggeledahan dan penyitaan, Tuntutan, dan Replik	Pengadilan, Kejaksaan, Kepolisian
		4. e-Brosur	Mempermudah bagi masyarakat untuk mendapatkan informasi pelayanan pada Pengadilan Negeri Bantaeng. Masyarakat hanya tinggal melakukan scan pada QR code yang tercantum kemudian akan langsung terbuka brosur yang memberikan informasi mengenai layanan pengadilan	Masyarakat
23	Pengadilan Negeri Sinjai	1. Inovasi Kepaniteraan Pidana yaitu Pengiriman Berkas Melalui Email (E-Pidana) Kepada Pihak Pihak yang membutuhkan (Penyidik, Kejaksaan, Rutan dan Bapas)	Pengiriman berkas yang dilakukan secara online kepada penyidik, Kejaksaan dan Rutan dimana berkas dikirim melalui email Pengadilan Negeri Sinjai kepada Penyidik, Kejaksaan, Rutan dan Bapas yang di sebut E-Pidana (Email Pidana). Sehingga data bisa tersampaikan dengan tepat waktu, serta disertai dengan pengiriman berkas fisik kepada pihak Penyidik, Kejaksaan, Rutan dan Bapas, ataupun pihak penerimaan dapat mengambil berkas fisik setelah mendapatkan berkas secara elektronik.	Polisi, Jaksa, Rutan, Bapas
		3. Inovasi Pelayanan Publik Pengadilan Negeri Sinjai melalui Whatsapp SILANJI (Sistem Informasi Pelayanan Pengadilan Negeri Sinjai)	Inovasi ini bertujuan untuk memudahkan masyarakat mendapatkan informasi tentang perkara, jadwal sidang, sidang perkara lalulintas (denda tilang), pengaduan dan tentang biaya perkara yang bisa didapatkan melalui WA di 085299913966, masyarakat melakukan pencarian informasi dengan menggunakan kode atau format yang tersedia sesuai kebutuhan dan kemudian dibalas secara otomatis oleh sistem yang terhubung di aplikasi Whatsapp.	Masyarakat
24	Pengadilan Negeri Selayar	-	-	-
25	Pengadilan Negeri Takalar	-	-	-
26	Pengadilan Negeri Enrekang	DANGKE (Pengeledaan, Penyitaan, Tuntutan, Perpanjangan Penahanan, dan Dakwaan Secara Elektronik)	Aplikasi untuk permintaan surat izin baik surat Izin Pengeledaan, Penyitaan, Tuntutan, Perpanjangan Penahanan, dan DAKwaan secara Elektronik	

		SIMANIS (Sistem Manajemen Informasi PN Enrekang) Simanis adalah Asisten Virtual yang akan membantu menjawab pertanyaan Anda mengenai informasi pelayanan di Pengadilan Negeri Enrekang. Akses SIMANIS dengan Search Link https://bit.ly/SimanisPNEnkang	PN Masamba mengadakan sudut pelayanan khusus dengan menyediakan perangkat komputer dan printer yang dapat digunakan oleh Para Pencari Keadilan untuk mencetak dokumen dalam keadaan darurat.	
27	Pengadilan Negeri Belopa	e-Tilang (Aplikasi Pencarian Data Tilang)	Pencarian Data Tilang bertujuan memudahkan Masyarakat dalam mencari berkas tilang yang masuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Belopa, Aplikasi ini dapat di akses melalui website pn-belopa.go.id pada menu Layanan Publik -) Informasi Perkara -) Pencarian tilang. Pada kolom yang disediakan silahkan ketik Nomor Tilang atau Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (TNKB), kemudian tekan Enter/klik Go.	Masyarakat Pencari Keadilan

BAB VI

PENGAWASAN

A. Internal

Sebagai Pengadilan Tingkat Banding Pengadilan Tinggi Makassar melakukan pengawasan bidang oleh Hakim Pengawas Bidang baik di Kepaniteraan dan Kesekretariatan dilingkungan Pengadilan Tinggi Makassar. Pengawasan Daerah pada Pengadilan Negeri dilakukan oleh Hakim Pengawas Daerah.

Untuk melakukan Pengawasan Bidang dan Pengawasan Daerah Ketua Pengadilan Tinggi Makassar menunjuk Hakim Tinggi dengan Surat Keputusan. Selama Tahun 2021 karena ada mutasi Hakim Tinggi maka Surat Keputusan Ketua Pengadilan Tinggi Makassar tentang Pengawas Daerah dan Pengawas Bidang terdapat beberapa revisi sebagai berikut:

1. Pengawas Bidang:

a. Tanggal 8 Oktober 2021 Nomor 128/KPT/Kp.I/SK/10/2021

Untuk Pengawasan Bidang dilakukan secara berkala setiap bulan dan hasilnya dilaporkan pada saat pelaksanaan Rapat Pegawai setiap bulan dan dilakukan pembahasan atas temuan yang ada untuk dilakukan perbaikan dan mencari solusinya.

2. Pengawas Daerah:

a. Tanggal 8 Oktober 2021 Nomor 129/KPT/Kp.I/SK/10/2021

Untuk Pengawasan Daerah dilakukan kepada 27 (Dua Puluh Tujuh) Satuan Kerja Pengadilan Negeri di Sulawesi Selatan dan Barat wilayah hukum Pengadilan Tinggi Makassar minimal 1 (satu) kali dalam satu tahun, namun apabila diperlukan dapat dilakukan pengawasan secara esidentil kepada Pengadilan Negeri yang bersangkutan. Untuk Laporan dikirim ke Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI. Untuk pelaksanaannya baik Pengawasan Bidang maupun Pengawasan Daerah Hakim Tinggi dibantu oleh Pejabat Fungsional dan Struktural serta staf.



B. Evaluasi

Evaluasi Pengadilan Tinggi Makassar dilakukan secara berkala terhadap semua unsur baik Hakim Tinggi, Tenaga Kepaniteraan maupun Kesekretariatan baik pejabat maupun staf juga Tenaga Honorer dilakukan setiap bulan pada saat Rapat Bulanan, selain membahas temuan hasil pengawasan bidang, juga tentang disiplin kerja, disiplin waktu, hasil kerja/kinerja baik perkara, kepaniteraan maupun kesekretariatan dan hasil evaluasi tersebut harus ditindak lanjuti sebagai langkah perbaikan dan dibuat dokumen notulen rapat. Untuk Tenaga Honorer/Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri (PPNPN) juga dilakukan Penilaian secara tertulis terdiri dari beberapa kriteria termasuk daftar hadir masing - masing oleh pejabat yang berwenang setiap akhir tahun. Hasil evaluasi tersebut menjadi dasar pertimbangan untuk dapat atau tidaknya yang bersangkutan diperpanjang sebagai tenaga PPNPN pada Pengadilan Tinggi Makassar untuk tahun berikutnya.

BAB VII

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari Uraian yang ada dalam laporan tahunan Pelaksanaan Kegiatan Tahun 2021 Pengadilan Tinggi Makassar dan Pengadilan Negeri Se-Sulawesi Selatan dan Barat dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut :

1. Seluruh Pengadilan Negeri di Sulawesi Selatan dan Barat telah terakreditasi;
2. Seluruh Pengadilan Negeri di Sulawesi Selatan dan Barat telah melaksanakan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
3. Rekapitulasi perkara Perdata banding, sisa tahun 2020 : 99 perkara, masuk tahun 2021: 383 perkara, putus tahun 2021 : 431 perkara, cabut tahun 2021: 0 perkara, sisa tahun 2021: 51 perkara;
4. Rekapitulasi perkara Pidana, sisa tahun 2020 : 86 perkara, masuk tahun 2021 : 912 perkara, putus tahun 2021 : 895 perkara, sisa tahun 2021 : 103 perkara;
5. Rekapitulasi perkara Tipikor, sisa tahun 2020 : 7 perkara, masuk tahun 2021 : 41 perkara, putus tahun 2021 : 48 perkara, sisa tahun 2021 : 0 perkara;
6. Rekapitulasi perkara Pidana Anak, sisa tahun 2020 : 0 perkara, masuk tahun 2021 : 32 perkara; putus tahun 2021 : 31 perkara, sisa tahun 2021 : 1 perkara;
7. Seluruh sisa perkara Perdata, Pidana, Tipikor dan Pidana Anak tahun 2020 telah diputus di tahun 2020;
8. Untuk Posbakum seluruh Pengadilan Negeri di Sulawesi Selatan dan Barat mendapatkan anggaran dan rata-rata realisasi mencapai 99,99%;
9. Untuk Sidang Keliling hanya ada 3 satuan kerja yang mendapat anggaran dengan rata-rata realisasi sebesar 100%, untuk Tahun Anggaran 2021;
10. Dari DIPA 01 yaitu anggaran Badan Urusan Administrasi penyerapan pada Pengadilan Negeri di Sulawesi Selatan dan Barat untuk Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Belanja Modal mencapai 97,92%;
11. Dari DIPA 03 yaitu Anggaran Dirjen Badilum Penyerapannya di masing-masing Pengadilan Lingkungan Peradilan Umum untuk Belanja Barang mencapai 96,16%;

12. Barang Milik Negara berupa Tempat Sidang Tidak Tetap/Setting Plat yang ada di beberapa Pengadilan Negeri wilayah Pengadilan Tinggi Makassar dalam kondisi rusak berat dan perlu anggaran untuk pemeliharaan atau renovasi guna peningkatan fungsi;
13. Rumah dinas dimasing-masing satker belum mencukupi kebutuhan terutama untuk para hakim pengadilan dan belum dilengkapi dengan inventaris / meubelair ;
14. Beberapa satuan kerja belum tersedia Rumah Dinas untuk Sekretaris;
15. Untuk gedung Pengadilan Tinggi Makassar dan Pengadilan Negeri di Sulawesi Selatan dan Barat rata-rata masih belum seluruhnya sesuai prototype gedung pengadilan yang ditetapkan oleh Mahkamah Agung RI;
16. Pengadilan Negeri Se- Sulawesi Selatan dan Barat sudah menggunakan sistem keterbukaan informasi dengan fasilitas website dan email;
17. Perangkat keras dan perangkat lunak yang digunakan di Pengadilan Negeri sudah hampir semuanya lengkap.
18. Setiap satker yang berada pada wilayah Pengadilan Tinggi Makassar sudah menerapkan aplikasi Sistem Penelusuran Perkara (SIPP) dan e-court baik untuk pengadilan tingkat pertama maupun tingkat banding.
19. Pembinaan dan pengawasan dilaksanakan secara rutin berdasarkan Surat Perintah Ketua Pengadilan Tinggi Makassar.

B. Rekomendasi

1. Perlu adanya anggaran khusus untuk menunjang jalannya Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) pada pengadilan tingkat pertama, yaitu salah satunya mengenai infrastruktur pada jaringan baik jaringan lokal maupun internet;
2. Perlu adanya pelatihan secara rutin bagi operator IT di wilayah Pengadilan Tinggi Makassar mengenai perawatan dan pengelolaan perangkat lunak dan perangkat keras untuk membantu menunjang kerja operator IT;
3. Perlu adanya anggaran khusus untuk renovasi gedung sesuai prototype pengadilan guna terpenuhinya sarana dan prasarana gedung kantor;
4. Perlu adanya penambahan ruang kerja hakim khususnya hakim tinggi pada Pengadilan Tinggi Makassar dikarenakan ruang kerja hakim pada Pengadilan Tinggi Makassar kurang memadai demikian pula dengan meubelairnya;

5. Usulan anggaran untuk kebutuhan yang diperlukan sebagai sarana dan prasarana pelaksanaan tupoksi agar diprioritaskan guna pelaksanaan tugas yang efisien dan efektif dengan harapan bisa mencapai hasil optimal;
6. Personil yang ada di setiap unit organisasi/satker hendaknya ditugaskan pada bidang yang sesuai dengan disiplin ilmu yang dimiliki guna pelaksanaan tugas pokok dan fungsi peradilan guna hasil yang optimal, efektif dan efisien;
7. Dalam rangka pembinaan menuju profesionalisme pegawai perlu adanya peningkatan Diklat Pegawai sesuai dengan sasarannya;
8. Perlunya penambahan daya internet seiring penggunaan aplikasi-aplikasi terkait inovasi satuan kerja dan Pengadilan Tinggi Makassar sebagai kawal depan Mahkamah Agung RI di wilayah Sulawesi Selatan dan Barat.
9. Idealnya personil yang menangani kepegawaian di PT Makassar ini adalah personil yang trampil dalam menggunakan peralatan perkantoran yang modern, utamanya faximile dan komputer, serta telah mengikuti diklat atau bimbingan teknis di bidang kepegawaian. Hal ini untuk menunjang di dalam pelaksanaan tugas-tugas kedinasan di bidang kepegawaian yang hampir tiap hari menemui kasus-kasus di bidang kepegawaian. Untuk itu, selaku Kepala Sub Bagian Kepegawaian, kami berharap agar para pegawai yang bertugas dibidang kepegawaian ini diikut sertakan di dalam program- program kegiatan untuk meningkatkan/pengembangan pegawai berupa mengikutkan mereka di dalam diklat-diklat dan bimbingan teknis di bidang komputer, kepegawaian dan kearsipan.
10. Mohon kiranya dapat ditinjau untuk peningkatan kelas Pengadilan Negeri yang ada di Sulawesi Selatan dan Barat;